Sejarah POLITIK dan KEKUASAAN

Islam, Nasionalisme dan Komunisme dalam Pusaran Kekuasaan Di Indonesia

Dr. Tappil Rambe, S.Pd., M.Si
Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum., M.Si
Syahrul Nizar Saragih, S.Hum., M.A
Dr. Leylia Khairani, S.Pd., M.Si

Sejarah Politik dan Kekuasaan

Tappil Rambe
Pristi Suhendro Lukitoyo
Syahrul Nizar Saragih
Leylia Khairani

Penerbit Yayasan Kita Menulis

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, buku Sejarah Politik dan Kekuasaan ini akhirnya rampung tepat waktu di tengah-tengah kesibukan akan tugas dan kewajiban yang hadir bersamaan dalam penyelesaian buku ini. Segala puja dan puji syukur tak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas karunianya wujud naskah ini dapat hadir ke tengah-tengah pembaca. Buku ini terwujud atas kegelisahan akan perlunya naskah akademik sebagai pegangan mahasiswa dalam memahami politik dan kekuasaan dari sudut pandang sejarah, khususnya pada ilmu pendidikan. Dengan menguraikan secara kronologis, buku ini dapat menjadi panduan atau pedoman bagi siapa saja yang perlu tahu bagaimana politik dan kekuasaan itu hadir tahap demi tahap di Indonesia.

Dalam penguraian narasi di dalam buku Sejarah Politik dan Kekuasaan, terdapat cakupan yang luas. Namun, bukan berarti melebar ke sana kemari, sebab terdapat narasi umum hingga khusus. Uraian tentang politik dan kekuasaan dimulai dari istilah dan makna yang dipaparkan oleh para teoritikus. Sementara tetap mengarahkannya pada kebutuhan akademik, khususnya kalangan mahasiswa yang memerlukan beragam teori dan pendapat dari para pakar. Pemahaman teori dapat membimbing pembacanya dalam memahami fenomena politik dan kekuasaan di Indonesia. Namun, lagi-lagi penggiringan tersebut tidak langsung menghujam situasi kekinian, sebab seperti judulnya bahwa kronologis politik dan kekuasaan harus dijelaskan secara kronologis. Oleh sebab itu masa priode pra-sejarah hingga Hindu-Budha adalah mula-mula yang mendapat tempat penguraian di dalam isi buku.

Selanjutnya adalah masuknya Islam ke Indonesia, disertai dengan pengaruh nasionalisme dan komunisme. Ketiga warna tersebut justru menjadi bagian judul, sebab ketiganya lahir menjadi wujud langsung dalam terbentuknya negara yang kita kenal: Indonesia. Porsi Islam mendapat lebih banyak dalam politik dan kekuasaan pada embrio Indonesia itu sendiri. Ia bersentuhan langsung dengan situasi dan kepercayaan masa silam hingga menghantarkan pada pengenalan nasionalisme bahkan komunisme. Ideologi terakhir telah mati karena menjadi antagonis terhadap Islam dan membentuk sistem ideologi sekarang. Sementara nasionalisme semakin diperkuat dengan ajaran Islam itu sendiri. Oleh sebab itu Islam menjadi masa silam, masa kini, dan masa yang akan datang yang kiranya tak lekang dimakan waktu selama Indonesia masih berdiri.

Meskipun pemaparan kekuasaan dalam setiap periode telah lugas dijelaskan, konsep politik dan kekuasaan itu sendiri juga dijelaskan dalam sistem kenegaraan. Istilah dan pengertian politik dan kekuasaan diurut lebih detail pada model kenegaraan. Konsepnya terbentuk mulai dari lahir hingga struktur kekuasaan di Indonesia. Inilah yang menjadi kerangka berpikir dalam memahami isi buku tersebut. Dengan penjelasan yang umum lalu pelan-pelan menuju ke hal khusus dalam model perpolitikan dan kekuasaan di Indonesia. Mulai dari konsep hingga kronologis politik dan kekuasaan yang masuk ke Indonesia. Justru keunikan dalam buku ini adalah politik dan kekuasaan dalam tingkat lokal yang dijelaskan akhir buku.

Di tingkat lokalitas (baca: Sumatera Utara), politik dan kekuasaan hadir tak hanya sekadar kolonisasi, kolonialismee, atau bahkan integrasi bangsa. Namun, secara lebih spesifik mewujud pada model kapital. Politik dan kekuasaan dari sistem kapital ini hadir sejal kolonialisme hingga sekarang. Politik uang juga bukan sekadar nilai mata uang, melainkan pada konsep uang itu sendiri, di mana munculnya sistem pembayaran dari uang yang memang khusus dikeluarkan di tempat itu sendiri. Tak berlaku di wilayah lain, bentuk politik dan kekuasaan dengan uang sangat lokal khusus dipakai di daerah lokal pula, sistem ini tak lagi sekadar sebagai nilai tapi mewujud dalam kekuasaan itu sendiri. Dalam sudut pandang sejarah, situasi ini sangat menarik jika

melihat bagaimana uang itu benar-benar berkuasan pada diri seseorang. Tak sekadar secara mental melainkan secara faktual.

Meskipun buku ini memiliki keunikan sendiri dalam menjabarkan politik dan kekuasaan, bukan berarti secara sempurna dapat hadir ke tangan pembaca. Tak ada gading yang tak retak. Begitu juga dengan buku ini yang bisa dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis menghaturkan maaf pada berbagai kesalahan, baik itu ejaan, makna atau narasi yang barangkali menyinggung satu atau berbagai pihak. Penulis berharap buku ini dapat menjadi proses pengembangan akademik sehingga memerlukan diskusi lanjutan dalam memahami isi buku ini, termasuk pada uraian-uraian yang dianggap memerlukan diskusi khusus pada periode-periode selanjutnya. Kritik dan masukan adalah harapan penulis bagi para pembaca. Akhir kata penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, baik kalangan umum maupun akademik. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bangsa. Selamat membaca!

Medan, 25 September 2019

Penulis

Daftar Isi

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Politik dan Kekuasaan

Politik dan Kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu.

Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita sering mendengar kata kekuasaan dan politik, kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain. Namun, untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik, serta apa hubungan di antara keduanya, memerlukan pembahasan yang luas dan terperinci.

Pada hakekatnya, kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

A. KONSEP POLITIK

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara (city state). Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan *zoon politikon* yang kemudian terus berkembang menjadi polites (warga negara), politeia (hal-hal yang berhubungan dengan negara), politika (pemerintahan negara), lalu terakhir menjadi politikos (kewarganegaraan).

Miriam Budiardjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut.

Sebagai suatu kegiatan dalam sistem politik maka politik sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan politik yang ada di Indonesia dan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum.
2. Adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis.
3. Adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.
5. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara.
6. Menjaga keamanan dan perdamaian negara.
7. Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa.

Sistem Politik sendiri menurut Prof. Sri Sumantri merupakan pelembagaan dari hubungan antara manusia yang berupa hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga legislatif negara, lembaga eksekutif negara, dan lembaga yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari 5 komponen, yaitu tokoh politik, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, serta alat komunikasi politik.

Ada beberapa sistem politik secara umum digunakan dan yang dikenal di Indonesia. Berikut ini beberapa macam sistem politik:

1. Sistem Politik Liberalisme.
2. Sistem Politik Fasisme.
3. Sistem Politik Komunisme.
4. Sistem Politik Monarki.
5. Sistem Politik Totaliteralism.

6. Sistem Politik Oligarki.
7. Sistem Politik Demokrasi.

Selain ketujuh sistem politik tersebut, masih ada beberapa jenis sistem politik lainnya yang digunakan di negara-negara lain. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara akan berbeda satu dengan lainnya. Hal ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam negara tersebut serta kondisi tiap-tiap negara. Sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam penyelenggaraan politik negara.

Konsep politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau alokasi. Konsep politik yang paling utama adalah negara. Seperti arti dari kata politik yang bermakna negara, maka segala bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik ini adalah sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara.

Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh sosiologi dari ruang lingkupnya, yaitu masyarakat. Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi, Indonesia menempatkan rakyatnya dengan kekuasaan kedaulatan tertinggi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diatur dalam negara bersumber dan untuk rakyat.

Konsep pengambilan keputusan menyangkut segala cara pengambilan keputusan dalam dunia politik yang diambil secara kolektif dan ditujukan kepada masyarakat seluruhnya. Proses pembuatan kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat semua melalui proses pengambilan keputusan. Konsep kebijaksanaan umum digunakan oleh pengambil keputusan dalam dunia politik dalam usaha untuk memilih tujuan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijaksanaan umum dalam politik hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya seperti contohnya kepala

negara maupun ketua partai politik. Konsep alokasi pada politik memiliki arti pembagian atas nilai-nilai sosiologi. Pembagian disini ditujukan kepada masyarakat yang diupayakan dapat merata sesuai kondisi masyarakat.

Perilaku politik dapat disimpulkan sebagai bentuk respon masyarakat atas sistem politik yang ada dalam suatu negara. Beberapa sikap perilaku politik antara lain:

- Pertama radikal. Sering kali kita mengenal kata radikal, namun untuk sikap perilaku radikal politik sendiri berarti perilaku yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada dan ingin adanya perubahan secara cepat dan mendasar. Kebanyakan masyarakat yang memiliki perilaku radikal akan cenderung kuat pendirian dan tidak mudah diajak kompromi. Perilaku radikal dapat menyebabkan adanya perselisihan hingga kerusuhan apabila tidak ditindak dengan cermat dan hati-hati, sebab kelompok radikal cenderung tidak mengindahkan orang lain dan semaunya sendiri.
- Kedua liberal. Perilaku politik satu ini mengindikasikan suatu masyarakat yang berpikiran bebas dan maju. Perilaku liberal dicerminkan dengan masyarakat yang ingin adanya suatu perubahan secara cepat dan progresif. Perubahan yang diinginkan yaitu untuk mencapai tujuan diinginkan dengan dasar hukum yang legal dan kuat.
- Ketiga konservatif. Perilaku konservatif adalah suatu cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan keadaan politik yang ada. Perilaku konservatif cenderung berusaha untuk bertahan terhadap perubahan yang terjadi.
- Keempat moderat. Kelompok perilaku politik moderat mengindikasikan suatu kelompok yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang ada. Perilaku ini mencerminkan masyarakat yang mampu berpikiran maju,

namun belum dapat menerima perubahan secara cepat seperti yang ada pada perilaku radikal.

- Kelima status quo. Perilaku politik status quo yaitu perilaku masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan kondisi politik yang ada. Perilaku ini berusaha mempertahankan keadaan yang sudah ada tanpa ada perubahan.

Masalah politik yang ada harus dicermati bagi tiap-tiap masyarakat untuk berusaha membuka pikirannya bahwa setiap pilihan dalam dunia politik pasti akan ada nilai positif dan negatif. Akan adapula beragam pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Oleh karenanya perlu adanya sikap mau menerima kekurangan dan menerima pendapat orang lain, apabila pendapat lain memang lebih baik dan memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan isu identitas, bagaimana identitas masyarakat tercermin dari pilihan mereka di dunia politik. Dimana kelompok mayoritas akan cenderung menang terhadap kelompok minoritas.

Isu ekonomi menjadi bagian dari politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara dapat terus berkembang dengan adanya pergerakan ekonomi. Saat ini keadaan ekonomi di Indonesia masih beragam, banyak orang yang mampu dengan penghasilan tinggi, di sisi lain banyak masyarakat penghasilan rendah mengeluhkan lapangan kerja yang sedikit. Hal ini tentu menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan politik di Indonesia. Sebab tujuan dari penyelenggaraan politik adalah untuk menjamin hak-hak masyarakatnya.

B. KONSEP KEKUASAAN

Kekuasaan selalu muncul di waktu dan tempat tertentu, untuk menyimpulkannya, dikonstruksi asal usulnya serta dilakukannya analisis hubungan kekuasaan. Kekuasaan bagi Foucault merupakan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan ilmu pengetahuan merupakan kekuasaan itu sendiri (Foucault, 1980: 199, 139).

Menurut Ketut Wiradnyana, Kekuasaan yang merupakan hasil dari savoir tersebut dapat bergerak bebas secara tiba-tiba dari satu sistem dominasi (berdasarkan pengetahuan) ke sistem dominasi yang lain, sehingga diyakini pengetahuan dan kekuasaan selalu bersaing (Ritzcr & Goodman, 2004: 613). Kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara langsung berdampak pada yang lain, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan bidang ilmu pengetahuan. Sebaliknya pada saat yang sama tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak mengisyaratkan dan merupakan hubungan kekuasaan (Ritzcer, 2004: 94). Jadi kekuasaan itu menghasilkan, juga kekuasaan melakukan dan yang pada gilirannya, mereproduksi kekuatan (Foucault, 2003: 25). Kekuasaan itu bisa bertahan dan diterima jika didasarkan atas fakta, menjadi kekuatan untuk memproduksi pengetahuan dan dioperasionalkan secara terus menerus dalam kehidupan sosial (Foucault, 1980:119-120).

Dalam konteks pembentukan sebuah organisasi pemerintahan yang baru, kerap aspek-aspek kebudayaan menjadi salah satu acuan dalam dasar pembentukannya. Hal tersebut merupakan gambaran perihal apa yang menjadi pengetahuan masyarakat merupakan bentuk kekuasaan yang bersaing dengan sistem dominasi kekuasaan lainnya. Sehingga konsep Foucault tersebut dapat dinyatakan bahwa pengetahuan dan kekuasaan bergerak dalam permainan bahasa dan pertunjukan, artinya pengakuan terhadap kebenaran sosial. Kebenaran sosial itu sendiri dalam berbagai bentuk, sehingga Foucault menentang paham kekuasaan yang disatukan dari atas oleh pusat kekuasaan negara.

Namun demikian, Foucault juga mengakui adanya kekuasaan dari atas. Dalam konteks kekuasaan yang bersifat *bottom up* tersebut, Foucault menekankan pentingnya manginfestasi kekuasaan lokal atau mikro, peran pengetahuan profesional dalam melegitimasi kekuasaan (lihat Foucault, 1980: 201). Dalam konteks inilah pengetahuan yang dimiliki masyarakat sebuah etnik atas hasil penelitian arkeologi untuk melegitimasi kekuasaan. Dengan kekuasaan tersebut maka berbagai situasi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat etnik tersebut dianggap sebagai sebuah jalan bagi beroperasinya kekuasaan itu. Konsep kekuasaan tersebut berbeda dengan kekuasaan Marxisme, yang mana kekuasaan terlihat nyata, terpusat pada negara dan dijelaskan ada sarana produksi. Sedangkan pandangan Foucault

mengenai kekuasaan lebih samar dengan penekanan pada pentingnya pengetahuan dan informasi. Tekanan pada hubungan kekuasaan dan subjek mangandaikan banyaknya hubungan kekuasaan. Kekuasaan tidak mengacu pada satu sistem umum dominasi satu kelompok terhadap yang lain, tetapi beragamnya hubungan kekuasaan. Kekuasaan bukan suatu institusi, bukan Struktur, bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki, tetapi nama yang diberikan pada suatu situasi strategis dan kompleks dalam suatu masyarakat (Foucault, 1980: 2336). Foucault juga menyatakan bahwa kekuasaan terjalin dengan jenis hubungan lain (produksi, kekerabatan, keluarga, seksualitas, dan lain-lain), bahwa hubungan ini tidak mengambil satu-satunya bentuk larangan dan hukuman, tapi adalah berbagai bentuk, interkoneksinya menggambarkan kondisi dominasi umum (Foucault, 1980: 214).

Karena beragamnya hubungan kekuasaan itu maka, Foucault juga menyatakan bahwa kekuasaan ada di mana-mana, hubungannya tetap ada pada jenis hubungan yang lain (ekonomi, politik, sosial). Ketika kekuasaan ada di mana-mana maka kondisi resistensi terhadapnya ada di mana-mana, jadi kembali pada mikro kekuasaan. Mengingat kekuasaan itu harus dipandang sebagai satu aspek dalam semua hubungan maka pemahamannya sebaiknya berkonsentrasi pada apa yang terjadi dalam hubungan sosial dan hubungan politik dan berpusat pada sarana-sarana pelaksanaan kekuasaan (Rigzer, 2011: 652). Dengan demikian Foucault menolak pandangan kekuasaan sebagai subjek yang berkuasa (raja, negara, pemerintah, ayah, laki-laki) dan subjek dianggap melarang, membatasi, atau menindas.

Strategi kuasa tidak bekerja melalui penindasan, melainkan melalui normalisasidan regulasi/hukum (lihat Foucault, 1980:141), menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik tetapi dikontrol, diatur dan didisiplinkan lewat wacana (Foucault, 2012:67). Konsep seperti itu dapat juga dilakukan dengan berbagai bentuk folklor yang pada akhirnya memunculkan pandangan akan sesuatu hal atau tujuan tertentu. Seperti halnya folklor asal usul etnik Gayo misalnya yang dikatakan berasal dari pesisir akan memunculkan kebenaran di dalarn pikiran individu gtau masyarakat. Folklor etnik lainnya, seperti folklor tentang Batak Toba sebagai awal etnik Batak lainnya atau folklor asal

usul masyarakat Nias yang berasal dari Gomo juga akan memunculkan kebcnaran dalam pikiran masyarakatnya. Konsep seperti ini juga sejalan dengan panopticon, dimana secara tidak langsung masyarakat mengontrol sendiri bahwa dirinya berasal dari pesisir dan bagian yang tak terpisahkan dengan etnik Aceh. Atau berasal dari etnik Batak Toba atau juga berasa dari Gomo, jadi keseluruhan masyarakat etnik berasal dari Wilayah budaya tersebut. Konsep folklor dan panopticon tersebut sejalan dengan konsep upaya penaklukan diri sendiri melalui tatapan (Foucault, 19802155; Goldstein, 2005:45), begitu juga dengan keberadaan hasil penelitian arkeologis yang menenegaskan genealogi Gayo, atau kesejarahan Batak Toba dan kesejarahan masyarakat Nias menjadikan berbagai tindakan-tindakan individu maupun kelompok dipresentasikan yang juga merupakan upaya penaklukan melalui pencerahan ilmiah.

Adanya pemahaman folklor tersebut di atas itu, juga merupakan bentuk kekuatan ideologi dan sekaligus wacana, sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat etnik. Pandangan tersebut menjadikan rusaknya etika, norma rasional dalam pandangan Nietzchean, mengingat kelompok masyarakat (senioritas) menjadi superior dan masyarakat lainnya termarjinalkan, dalam bcrbagai bentuk kegiatan dari sejak dulu hingga sekarang. Hal tersebut biasanya tidak hanya dalam Bentuk ungkapan-ungkapan semata tetapi juga berbagai perlakuan aktif. Bahwa dalam kondisi tersebut adanya hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan sebagai upaya untuk mengatur orang lain.

Dalam perspektif Foucault, hubungan kekuasaan dan pengctahuan yang rutinitas produktif membentuk pesanan dari organisasi. Mengkritik pesanan ini berarti mempertanyakan pengetahuan sama dengan membuka hubungan kekuasaan (Mesner, & Silvia Jordan, 2014:1-19). Bagi Foucault hal tersebut dianggap sebagai sejarah Ilmu pengetahuan, pada awalnya abad 17-18 (masa klasik) pengetahuan itu merupakan penyatuan antara mikrokosmos dengan makrokosmos dan oleh Hegel pengetahuan yang hanya membangun dirinya sendiri menghasilkan wacana yang disebut dengan efek pengetahuan (lihat Goldstein, 2005:40-41). Namun dalam perkembangannya ketika pengetahuan itu digunakan untuk kepentingan kekuasaan maka

pengetahuan itu tidak untuk pengetahuan tetapi untuk kelompok tertentu, artinya ada perubahan fungsi.

Kondisi itu sejalan dengan pemikiran Foucault bahwa kekuasaan dijalankan dengan dua cara: Pertama, kekuasaan dilaksanakan agar suatu wacana terwujud. Kedua, kekuasaan dilaksanakan oleh suatu wacana, karena kekuasaan menentukan identitas-kekuasaan menentukan apa yang dipikirkan dan diketahui orang, dan dengan demikian mcnentukan bagaimana orang bertindak (Jones, 2005:204). Gagasan hasil penelitian Sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan juga digunakan sebagai bagian dari kepentingan politik sejalan dengan pemikiran Foucault perihal peranan intelektual. Dalam arti tertentu, intelektual universal serupa dengan anggapan tentang Penguasa sejauh mcreka sama-sama melontarkan klaim-klaim totalitas. Sebagai lawan bagi penguasa, intelektual universal sebetulnya beroperasi dalam wilayah yuridis-politis yang serupa Gagasan mengenai intelektual spesifik merupakan tandingan bagi gagasan tentang kekuasaan yang merembes (Ketut Wiradnyana: 2005).

C. SUMBER DAN UNSUR KEKUASAAN

1. Sumber Kekuasaan

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, sumber kekuasaan berasal dari berbagai bentuk. Ada yang muncul dari dalam diri manusia, ada pula yang berasal dari luar atau eksternal manusia. Kekuasaan ini berbeda-beda dalam pemaknaan setiap manusia di bumi ini. Terdapat lima sumber utama kekuasaan yang hadir dalam diri manusia.

- **Kekuasaan menghargai (reward power).** Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. (bonus sampai senioritas atau persahabatan).

- **Kekuasaan memaksa (coercive power).** Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan (teguran sampai hukuman).
- **Kekuasaan sah (legitimate power).** Kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu.
- **Kekuasaan keahlian (expert power).** Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. (professional atau tenaga ahli).
- **Kekuasaan rujukan (referent power).** Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada indentifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi (karisma, keberanian, simpatik dan lain-lain).

Di antara keinginan-keinginan manusia yang paling penting adalah keinginan untuk memperoleh kekuasaan dan keagungan. Keduanya tidak identik tapi erat sekali hubungannya, perdana menteri mempunyai lebih banyak kekuasaan dibandingkan keagungan. Raja mempunyai lebih banyak keagunan daripada kekuasaan. Akan tetapi biasanya, cara yang paling mudah untuk memperoleh keagungan adalah melalui kekuasaan. Dorongan untuk berkuasa memiliki dua bentuk eksplisit, dalam diri pemimpin, dan yang implisit, dalam diri pengikutnya (Russell, 1988). Apabila orang bersedia mengikuti pemimpin, mereka berbuat demikian dengan maksud agar kelompok yang mereka pimpin memperoleh kekuasaan, dan meereka merasakan kemenangan-kemenangan sebagai kemenangan mereka juga.

Kebanyakan orang merasa tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memimpin kelompok mereka untuk meraih kemenangan, dan oleh sebab itu mereka mencari seorang pemimpin yang kelihatannya memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai keunggulan. Bagaimana sebenarnya kekuasaan tersebut dapat diperoleh oleh seorang di dalam suatu organisasi? Semakin besar legitimasi yang diperoleh seseorang, semakin besar kemungkinannya seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Legitimasi kekuasaan tersebut dapat diperoleh melalui suatu organisasi formal dan biasanya dengan suatu surat keputusan. Pengaruh secara informal (informal influence) sering diperlukan oleh mereka yang memiliki pengaruh formal (formal influence), apabila mereka menginginkan hubungan antara atasan dan bawahan lebih dari sekedar hubungan formal.

Pemimpin yang hanya memiliki kekuasaan formal dan tidak memiliki pengetahuan yang dianggap membantu dan menguntungkan para bawahannya, akan sulit untuk mempengaruhi dan mengatasi bawahannya. Pada saat suatu organisasi menjadi lebih kompleks dan dituntut keahlian secara teknis, maka lebih banyak orang di dalam posisi kepemimpinan yang tidak memiliki keahlian teknik yang layak untuk mempengaruhi orang lain, akan sulit bagi mereka untuk dapat bekerja sama dengan bawahan yang lebih tahu tentang pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa mereka harus mencari cara atau metode mendapatkan pengaruh informal melalui kemampuan dan performa mereka dalam membuat suatu hubungan yang ramah, atau mereka harus menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan kondisi bawahannya. Mungkin sumber yang paling utama tentang kekuasaan adalah kemampuan untuk meningkatkan atau mengembangkan organisasi secara positif dalam hubungannya dengan lingkungannya atau problem-problem pokoknya (key problems).

Mereka yang mampu membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatasi problem-problem yang paling sulit, yang menekan dan berbahaya adalah yang mungkin untuk mencapai kekuasaan. Seseorang yang melaksanakan tugas yang telah menjadi rutin atau established akan memperoleh sedikit kekuasaan dibandingkan orang yang mengembangkan metode atau prosedur

baru, memulai suatu unit atau tugas baru, dan menciptakan proyek atau produk yang baru. Kekuasaan tidak saja terdapat pada mereka yang mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan memuaskan namun juga mereka yang memiliki kemungkinan besar untuk mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Walaupun ada yang sinis yang menyatakan bahwa sungguh sulit untuk tetap mempertahankan kekuasaan jika seseorang benar-benar telah tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Pengakuan oleh orang lain juga sangat penting dalam mempertahankan kekuasaannya oleh karena itu mereka yang menginginkan kekuasaan harus berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan hal itu kadang menyangkut proses politik. Oleh karena kekuasaan merupakan suatu proses sosial untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak, maka bagi mereka yang sedang mencari atau ingin memperoleh kekuasaan perlu mencari cara atau metode yang bermanfaat bagi orang lain dalam organisasi. Kesukarelaan untuk mengerjakan tugas yang tidak menyenangkan, mencari metode-metode baru sehingga mempermudah pekerjaan orang lain dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan kapan saja adalah caracara dalam mencari atau memperoleh kekuasaan, sehingga banyak para politisi yang melakukan hal demikian untuk membangun kekuasaan. Cara lain yang dapat digunakan untuk membangun kekuasaan adalah mengontrol hadiah (reward) dan hukuman (punishment) dalam organisasi. Kekuasaan merefleksikan mengenai pemberian *reward* dan hukuman agar orang lain mau melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh seseorang yang perlu segera dilaksanakan.

Semakin seseorang mempunyai akses untuk mengontrol hadiah dan hukuman semakin besar kekuasaannya. Dengan demikian, orang yang dapat memberikan *reward* formal atau menggunakan hukuman formal dalam suatu organisasi seperti menyewa, memecat, promosi, penyesuaian gaji, memberi rekomendasi, dsb dan memberikan *reward* atau hukuman secara informal seperti bantuan, informasi, atau kesenangan, akan memiliki banyak kekuasaan. Para pencari kekuasaan perlu menentukan *reward* apa yang telah dapat mereka kontrol sehingga mereka dapat lebih mudah menggunakannnya untuk

menciptakan kewajiban atau mendorong ke arah kerja sama yang diinginkan.

Dalam hubungan antara *power* dan *reward* adalah kekuasaan yang diperoleh dengan memberi bantuan untuk membebaskan seseorang dari kecemasan dan mengurangi tekanan-tekanan. Kekuasaan yang diperoleh seseorang adalah orang yang mampu mengurangi atau menghilangkan ketidakpastian dalam situasi yang penuh kekacauan. Orang yang dapat mengurangi ketidakpastian memiliki kemungkinan dapat menarik pengikut-pengikutnya. Dalam konteks yang sama, Kotter (1997) menjelaskan bahwa sumber-sumber kekuasaan dalam kaitan hubungan antara atasan dan bawahan.

Ia mengatakan bahwa apabila kita sedang bekerja dalam suatu posisi yang memiliki sejumlah kekuatan dan kekuasaan, kepemimpinan nantinya akan mengharuskan kita menggunakan kuasaan ini untuk menstruktur sistem bawahan sehingga pola keragaman dan saling ketergantungan itu cocok dengan kebutuhan sebenarnya dari keseluruhan misi Anda, dan tidak hanya sejarah, politik yang picik, dan yang sejenisnya. Kepemimpinan yang kuat berarti menciptakan suatu lingkungan yang di dalamnya konflik-konflik dapat secara potensial mengarah pada putusan yang kreatif melalui kerja sama kelompok yang efektif, dan lingkungan yang memperkecil pertentangan kekuasaan yang merusak, perselisihan birokrasi, dan politik yang picik. Aset-aset tersebut, kekuasaan, kemampuan dan kemauan untuk menggunakan kekuasaan untuk mengelola semua hubungan dalam lingkungan sosial yang rumit dapat membuat suatu perbedaan yabng sangat besar.

Apabila ada lebih banyak orang telah mendapatkan aset-aset tersebut terutama orang-orang dalam posisi kunci, pertentangan kekuasaan yang merusak yang mereka alami mungkin dapat dikurangi ruang lingkupnya atau dihilangkan seluruhnya. Namun demikian mengembangkan semua sumber kekuasaan yang dibutuhkan untuk menciptakan agenda dan jaringan kerja yang kuat tidaklah mudah. Itu membutuhkan waktu dan tenaga serta perhatian yang terus menerus.

Kekuasaan Berdasarkan Kedudukan memiliki pengaruh potensial yang berasal dari kewenangan yang sah karena kedudukannya dalam organisasi terdiri dari:

a. **Kewenangan Formal:** Kewenangan Formal, yaitu kewenangan yang mengacu pada hak prerogatif, kewajiban dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial. Kontrol terhadap sumber daya dan imbalan, merupakan kontrol dan penguasaan terhadap sumber daya dan imbalan terkait dengankedudukan formal. Makin tinggi posisi seseorang dalam hirarki organisasi, makin banyak kontrol yang dipunyai orang tersebut terhadap sumber daya yang terbatas.
b. **Kekuasaan Pribadi:** Kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa kelompok sumber kekuasaan berdasarkan kedudukan akan berlimpah pada orang-orang yang secara hirarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Pengaruh potensial yang melekat pada keunggulan individu terdiri dari:
   - Kekuasaan keahlian (expert power) Kekuasaan keahlian (expert power) merupakan kekuasaan yang bersumber dari keahlian dalam memecahkan masalah tugas-tugas penting. Semakin tergantung pihak lain terhadap keahlian seseorang, semakin bertambah kekuasaan keahlian (expert power) orang tersebut.
   - Kekuasaan kesetiaan (referent power) Kekuasaan kesetiaan (referent power) merupakan potensi seseorang yang menyebabkan orang lain mengagumi dan memenuhi permintaan orang tersebut. Referent power terkait dengan keterampilan interaksi antar pribadi, seperti pesona, kebijaksanaan, diplomasi dan empati. Kekuasaan karisma merupakan sifat bawaan

dari seseorang yang mencakup penampilan, karakter dan kepribadian yang mampu mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu.

2. Unsur Kekuasaan

Kekuasaan terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan, cara, dan hasil. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara yang dipilih juga akan baik. Dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik, misalnya dengan mengancam. Kemudian, unsur yang terakhir atau hasil dari kekuasaan dapat dilihat dari jumlah individu yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi, dan seberapa besar pengaruh kekuasaan tersebut. Sikap pihak yang dikuasai, turut menentukan kualitas kekuasan yang berlaku atas dirinya. Jika diterima dan didukung, maka kekuasaan itu merupakan wibawa. Kekuasaan yang demikian tidak banyak memerlukan paksaan (kekuatan) dalam penggunannya.

Sumber kekuasaan menurut John Brench dan Bertram raven adalah kekuasaan balas jasa (reward power). Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah (bonus sampai senioritas atau persahabatan).

Kekuasaan paksaan (coercive power). Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan (teguran sampai hukuman). Kekuasaan sah (legitimate power). Kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu.

Kekuasaan keahlian (expert power). Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai

keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi (professional atau tenaga ahli). Kekuasaan panutan (referent power). Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada indentifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi. (karisma, keberanian, simpatik dan lain-lain). Kekuasaan Pengendalian Informasi (Control of Information power). Berasal dari pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain, ini dilakukan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.

Sumber kekuasaan muncul di karenakan adanya pengetahuan dan pengaruh, dimana pengetahuan mengacu pada perkembangan seseorang. Dilihat dari seberapa besar ia mengetahui sesuatu hal tentang berpolitik, meski pengetahuan politik yang ia miliki hanya sederhana dan sebatas pengetahuan tentang menguasai orang lain dan memerintah orang lain, maupun seberapa ahli ia dalam memiliki argumen yang menyakikan orang lain agar menganggap dirinya yang memiliki kemampuan untuk memimpin orang lain, banyak terjadi hal tersebut di kehidupan kita. Contoh kecil dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam lingkungan sekolah. Dimana seseorang akan menjadi seorang peimpin yang memegang kekuasaan penuh atas suatau hal tersebut karena ia memilki karisma atau perawakan yang menggambarkan bahawa ia adalah seseorang yang dapat menjadi oarang yang di tinggikan. Atau juga sesuai dengan pemahaman primusinterpatrens, dimana sumber-0sumber kekuasaan di dapatkan dari dalam diri seseorang yang mengacu kebergunaan dan keterlibatan yang besar dalam lingkungan masyarakat yang menyebabkan orang lain memiliki kepercayaan penuh kepada seseorang tersebut. Hal ini juga berdampak pada seberapa besar ia menjadi pengaruh bagi orang lain, bahkan segala sesuatu yang berhungunan antara banyak hal selalu melibatkan orang tersebut.

Pengetahuan akan memberikan wewenang kekuasaan untuk melakukan segala hal, dan pengetahuan juga sangat bersinergi dengan pengaruh, dimana pengaruh seseorang yang di timbulkan karena adanya reaksi berupa apapun yang di mualai dengan pengetahuan yang membawa seseorang mencapai puncak keinginan yang ingin

dilakukan untuk membuat orang lain mau melakukan perintah dan wewenang yang telah dibuat.

Pengetahuan dianggap dapat merasionalkan wacanawacana yang ada sebelumnya, sehingga berbagai pihak (unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat) menggunakannya sebagai jembatan penguatan identitas. Berbagai struktur yang menggunakan pengetahuan itu lambat laun akan melegitimasi etnisitasnya atas pengetahuan yang didapat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Foucault bahwa pengetahuan yang ada pada satu wewenang menimbulkan kekuasaan yang terlembaga. Wacana yang terbentuk hanyalah suatu bentuk dominasi dari sistem kekuasaan. Kebenaran menurut Foucault adalah produk atau dongeng, regulasi, distribusi dan pernyataan, sehingga sistem kebenaran berada dalam hubungan timbal balik dengan sistem kekuasaan. Sistem kekuasaan menciptakan dan mempertahankan kebenaran, sedangkan kebenaran adalah produk dari praktik-praktik tertentu. Kekuasaan pengetahuan mewujudkan diri dalam wacana yang menciptakan kebenaran secara sewenang-wenang demi kepentingannya. Dengan demikian pengetahuan menciptakan realitas (Basis, 2002 dalam Wibowo, 2009).

Pengetahuan memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan tanpa pengetahuan (Sarup, 2011:102). Kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara langsung berdampak pada yang lain, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan bidang ilmu pengetahuan. Sebaliknya, pada saat yang sama tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak mengisyaratkan dan merupakan hubungan kekuasaan. Selanjunya Foucault menyebutkan bahwa kebenaran sangat ditentukan oleh kekuasaan dan sumber kekuasaan adalah ilmu pengetahuan. Semakin tinggi penguasaan ilmu pengetahuan, semakin tinggi pula kekuasaan yang didapatkan (Rimr, 2009:94; Suhamadji, 2010:371). Oleh karena itu tingkat pengetahuan yang dihasilkan dari sebuah penelitian tergantung dengan metode yang digunakan atau semakin banyak metode yang digunakan maka semakin kuat legitimasi pengetahuan tersebut. Hal tersebut tampaknya berkaitan dengan semakin kuat kekuasaan yang dimiliki pengetahuan tersebut terhadap subjek, seperti yang dikemukakan Foucault tersebut di atas.

BAB II

Struktur Kekuasaan dan Lahirnya Kekuasaan

A. LAHIRNYA KEKUASAAN

Kekuasaan telah dimulai semenjak era Yunani kuno dan terus berlangsung sampai zaman ini. Para filsuf klasik pada umumnya mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Para pemikir religius menghubungkan kekuasan itu dengan Tuhan. Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk mengabdi tujuan negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.

Diskusi tentang kekuasaan tetap penting terutama ketika umat manusia berkepentingan untuk terus menemukan cara bagaimana menyeimbangkan kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikonotasikan negatif jika dikaitkan dengan isu politik. Padahal dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau *power* berarti suatu kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya *power* tersebut memberikan konotasi yang positif bahkan sangat diperlukan. Konotasi negatif dari kekuasaan sering kali muncul

dikarenakan terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau sebuah organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal yang positif.

Kekuasaan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan, atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Karena organisasi merupakan kumpulan orang dalam pencapaian tujuan, maka organisasi ditujukan untuk mengubah situasi melalui orang-orang agar perubahan terjadi. Agar perubahan ini dapat terjadi, maka kekuasaan diperlukan. Menurut French dan Raven, sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman dan Gilbert (1995), terdapat lima faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan (sources of power). Kelima faktor tersebut adalah *reward power, coercive power, legitimate power, expert power,* dan *referent power*.

Setiap bagian dari struktur organisasi sebagaimana diterangkan di bagian awal bab ini memiliki jenis kekuasaannya masing-masing, terutama di bagian yang berada pada hierarki yang paling tinggi dalam suatu organisasi, seperti direktur, presiden direktur, dan sejenisnya. Pada umumnya kekuasaan tersebut lebih disebabkan karena legitimasi tertentu yang ditentukan oleh mekanisme dalam organisasi. Kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan untuk memerintah, mengoreksi, atau pun mengoordinasikan bagian yang berada di bawahnya. Namun, dikarenakan kekuasaan pengertiannya sangat luas dan lebih banyak digunakan dalam istilah politik, maka dalam organisasi, istilah kekuasaan cenderung jarang dipergunakan. Sebagai gantinya istilah kewenangan atau authority lebih sering dipergunakan.

Terminologi kekuasaan selalu terkait dengan hakekat, wewenang dan dasar legitimasinya. Berbicara mengenai hakikat kekuasaan adalah bersentuhan dengan hal yang sebenar-benarnya. Dari segi hakekat, kekuasaan adalah kekuatan, kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Mengandung pula wewenang atas sesuatu. Dalam berbagai pandangan pemikiran, pengertian ini berkembang dan mempunyai heterogenitas persepsi sesuai dengan perspektif yang digunakan. Seperti halnya terminologi kekuasaan yang dianalisis dari perspektif filsafaf ketuhanan akan berlainan dengan terminologi dari

perspektif sosiologi.

Dalam perspektif filsafat Ketuhanan, kekuasaan dibedakan antara kekuasaan mutlak dan kekuasaan nisbi atau relatif. Kekuasaan mutlak hanya ada pada Allah, Adapun yang nisbi atau relatif ada pada manusia. Sebab kemahakuasaan adalah suatu kemestian bagi Allah. Allah adalah pemillk otoritas tertinggi atau pemilik dan pemegang tahta otoriter. Karena itu dalam perspektif ini, wewenang atau kekuatan untuk menguasai secara mutlak hanya milik Allah, penguasa atas alam makro kosmos dan alam mikro kosmos serta alam materi dan non-materi (ghaib). Adapun kekuasaan yang diberikan kepada manusia adalah amanat yang berasal dari tahta otoritas. Sebab manusia memerlukan institusi kekuasaan yang lebih konkrit dalam mengkoordinir massa (umat) untuk mewujudkan tata kehidupan yang makmur, tertib dan adil.

Selain perspektif filsafat Ketuhanan yang diwakili Islam sebagaimana tersebut diatas, kekuasaan juga dianalisa dengan perspektif sosiologis, yaitu melihat kekuasaan sebagai gejala empiris yang harus diamati di dalam masyarakat. Sebagai titik tolak terminologi kekuasaan dalam perspektif sosiologis adalah rumusan dari Max Weber yang mengatakan bahwa dalam suatu hubungan sosial kekuasaan ialah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri, apapun dasar kemampuan ini sekalipun mengalami perlawanan. Adapula yang merumuskan kekuasaan sebagai suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan keinginan ataupun tujuan dari pihak yang menentukan.

Rumusan ini dikemukakan oleh D. Laswelldan Abraham Kaplan. Sementara itu Van Doom merumuskan kekuasaan sebagai suatu kemungkinan pembatasan tindakan bagi seseorang atau kelompok orang sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh pihak pertama yaitu penguasa. Rumusan Van Doom ini mendapat kritik sebab kekuasaan tidak hanya membuka kemungkinan tindakan yang lebih besar dan leluasa.

Kekuasaan juga diartikan sebagal dominasi dan pengawasan. Barrington Moore memberikan definisi yang diorlentasikan pada

metode atau cara bagaimana golongan-golongan ataupun. Individu-individu tertentu berhasil melakukan dominasi terhadap sesamanya. Adapun Talcot Parsons dan Robert Lynd cenderung merumuskan kekuasaan sebagal kekuatan untuk mengawasi atau melakukan pengawasan. Parsons menganggap kekuasaan sebagai pemilihan fasilitas-fasilitas untuk menguasai. Sedangkan Robert Lynd menganggap kekuasaan sebagai sumber sosial yang utama untuk mengadakan pengawasan. Meskipun berbau sosialis, barangkali ada benarnya pernyataan Frederich Engels bahwa kekuasaan itu sesuatu yang berasal dari masyarakat dan berkuasa di atas masyarakat.

Dari berbagai rumusan itu, ternyata kekuasaan dapat ditarik pada pengertian yang lebih umum yaitu sebagai suatu kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam bentuk suatu aksi sosial baik tehadap mereka yang menentang kehendak maupun tidak. Sebenarnya kekuasaan dalam perspektif sosiologis ini mempunyai landasan asas kedaulatan rakyat atau rakyat dianggap sebagai suatu *supremacy* dalam struktur kekuasaan yang legal. Tetapi ketika kekuasaan itu dilembagakan maka rakyat menjadi komunitas yang dikuasai dan diserahkan kepada kebijakan-kebijakan penguasa. Rakyat juga dibatasi geraknya dalam sistem, aturan main yang dibuat oleh penguasa. Karena Itulah terjadi dominasi. Dalam segala jenis dan skala organisasi apapun struktur kekuasaan yang dominatif itu selalu ada. Kekuasaan dalam terminologi sosial ini timbul karena ada interaksi sosial dimana didalam interaksi sosial para pihak tidak selalu berada pada posisi egaliter.

Dari perspektif sosiologi ini pada dasarnya hakekat kekuasaan relatif tidak berbeda dengan perspektif filsafat Ketuhanan. Sebab, sama-sama mengarah pada kemampuan, kekuatan dan wewenang. Perbedaannya terletak pada basis nilai yang melandasi adanya kekuasaan. Nilai religius begitu dominan dalam filsafat ketuhanan bahkan menjadi basis kekuasaan. Sedang nilai-nilai sosial yang dianggap rasional menjadi acuan bagi perspektif sosiologis.

Teori Kekuasaan

Dalam *The Dominant Perspective* menjelaskan *state of the art* dari kemunculan konsep kekuasaan yang meliputi *power over*, yang menggapai tujuan melalui mobilisasi sumber daya. Definisi kekuasaan semacam ini secara tegas muncul dalam pemikiran Parsons. Ia mendudukkan kekuasaan sejajar dengan otoritas, sehingga memiliki keresmian dan legitimasi untuk mendesakkan keinginan ke orang lain, sekalipun orang itu tidak menginginkannya.

Sementara Parsons meletakkan kekuasan pada suatu struktur sosial AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integation, Latency), Giddens menempatkan kekuasaan dan otoritas ke dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, agensi tidak saja tergantung kepada struktur sosial yang lebih luas, melainkan dalam konteks ketergantungan itu sang agensi juga mampu menyusun stuktur baru. Stewart mencatat, bahwa dalam teori strukturasi memang proses liberasi mulai muncul (dan ini juga memberikan ide tentang ruang pemberdayaan), namun pemikiran utama Giddens tetap berupa dominasi struktur terhadap agensi.

Didasari oleh pemikiran Nietszhe, terutama mengenai keinginan untuk berkuasa (will to power), pemikiran Foucault tentu saja lebih menekankan liberasi tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi Foucault masih mengidap pandangan tentang dominasi pihak yang berkuasa kepada pihak lain yang dikuasai. Pendapat ini terutama disandarkan kepada inkonsistensi antara konsep menuju kekuasaan, tetapi tanpa menganalisis adanya konsep kebenaran yang hendak dituju (dinginkan) serta liberasi dari dominasi untuk mencapai kebenaran itu. Melalui pelembagaan kekuasaan yang diikuti dengan hukuman (punishment), maka dominasi itu kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dimana individu telah membatasi dirinya sendiri (mengingatkan diri akan adanya hukuman) dalam berpikir dan bertindak. Namun demikian, Stewart masih menyisakan harapan akan adanya peluang penyusunan politik pemberdayaan dari konsep kekuasaan ala Nietszhe dari Foucault.

Dengan membaca beragam teori-teori pasca-modernisme (post-modernism theories), muncul pandangan bahwa telah muncul suatu pandangan politik baru, yang biasa disebut sebagai politik pasca-

modernisme. Pandangan politik Foucault sendiri telah dikembangkan oleh sosiolog lain, dan sudah lazim pula menyebut pemikiran politik pasca-modernisme tersebut sebagai kekuasaan yang menciptakan solidaritas sosial dan pembebasan, bukan kekuasaan yang mengkooptasi (Foucault: 2002; Best dan Kellner: 2003). Pemikiran liberasi ini sejalan dengan kaidah lain dalam pasca-modernisme tentang penolakan terhadap teori agung dan aturan yang memusat, sebaliknya menghargai posisi-posisi politis maupun teoritis yang lokal.

Berikutnya Stewart mengemukakan konsep kekuasaan dari Mann. Untuk sampai kepada kebutuhan akan konsep kekuasaan, mula-mula masyarakat (society) dipandang sebagai jaringan kekuasaan yang saling berimpitan maupun saling tumpang tindih. Adapun sumber kekuasaan pada masa modernitas akhir terdiri atas ideologi, ekonomi, militer dan politik. Agar kekuasaan tersebut terlegitimasi, maka masing-masing sumber kekuasaan tersebut kemudian menyusun lembaga dan organisasi masing-masing. Di samping itu, masing masing sumber kekuasaan tersebut juga menciptakan mekanisme kontrolnya masing-masing. Untuk melihat proses penggunaan sumber-sumber kekuasaan, Mann meminjam teori-teori tentang elite kekuasaan. Dengan cara ini, sayangnya, Mann menjadi sulit memperlihatkan pola-pola pemberdayaan dari lapisan bawah.

Bagian *Analysing Power and Domination* berisi alternatif pemaknaan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Hannah Arendt dan Habermas. Dari sini muncul kerangka yang menghubungkan kekuasaan dengan komunitas, kepentingan, dan dominasi. Struktur dominasi tidak bisa dipandang secara monolitik, mekanistik, dan mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Lebih tepat memandang struktur dominasi sebagaimana wadah-wadah untuk bertahan hidup (sites of struggle). Hubungan ketidaksamaan muncul dalam antara proses resolusi konflik dan distribusi sumberdaya. Di antara kedua proses itu tersembul peluang transformasi sosial melalui proses pemberdayaan. Dialektika ini terwujud dalam pola kelompok dominan saat berhubungan dengan komunitas, baik yang terbentuk karena kesamaan kepentingan maupun saling kenal antar anggota.

Kemudian, bagian *Capitalism and Straggle: From the Factory to the Smart*

Machine berisi dialektika antara pemberdayaan dan dominasi dalam wadah kapitalisme. Dalam sejarah kapitalisme, maka di dalamnya terdapat tiga wadah untuk persaingan mempertahankan kehidupan, yaitu pasar, organisasi produksi, dan organisasi politik. Sampai saat ini dominasi masih tumbuh melalui mobilisasi kapital. Negara dipahami sebagal sistem hukum yang memiliki wilayah teritoral sebagal basis legitimasi dominasi tersebut. Akan tetapi dalam masa modernisme akhir, melalui globalisasi sedang terjadi proses keruntuhan kekuasaan Negara (powerless state). Sebagai konsekuensi berikutnya, tumbuh relevansi peran masyarakat dan swasta.

Dari mazhab berikutnya kita masuk ke bagian kedua dari buku ini, mengenai alternatif untuk memandang kekuasaan sebagai pemberdayaan. Bab *Capitalism, States and Public Sphere I: Habermas' Political Journey* berisi hubungan antara kapitalisme dan demokrasi. Di sini dikemukakan pandangan Habermas menurut sejarahnya. Habermas mengemukakan pandangan sistem (sistem, dalam sosiologi umumnya disebut struktur) dan dunia kehidupan. Dominasi ditunjukkan oleh kolonisasi aturan-aturan sistem ke dalam dunia-kehidupan. Untuk mengatasi dominasi ini, maka perlu dibuka ruang yang bebas bagi terwujudnya komunikasi yang dialogis. Ruang publik (public sphere) tersebut merupakan jawaban Habermas sebagai bentuk demokrasi (terutama oleh feaorld) melawan dominasi negara (kolonisasi system).

Kemudian bagian *Capitalism, States and Public Sphere II: Empowerment in the Pablic Spherei* berisi pembatasan dalam kerangka pemikiran Habermas di atas. Dari data lapangan diketahui bahwa konsep tindakan komunikatif yang dilakukan tanpa saling memaksa ternyata tidak berlaku. Saya sendiri melihat pandangan Habermas tentang tindakan komunikatif secara bebas mirip dengan pandangan ekonom tentang pasar bersaing sempurna. Kedua konsep tersebut bersifat ideal, yang tidak (mungkin) terjadi dalam empirik sehari-hari. Bahwa Habermas menciptakan konsep ideal tersebut, menunjukkan ciri kental dari Frankurt. Dalam mazhab pengetahuan ini, kritik terhadap suatu teori atau masyarakat hanya mungkin terwujud jika ada suatu pandangan dasar yang mutlak, sehingga bisa menjadi pedoman bagi siapa saja untuk menilainya. Tidak heran analisis Habermas banyak

didasari oleh analisis filsafat juga, karena pandangan mendasar bisa dikelola oleh filsafat. Namun justru di sinilah muncul persoalan untuk menurunkannya ke tataran praktis.

Kemudian *Citicenship: Constinuting Political Commmumity* berisi hubungan antara kekuasaan negara dan politik perbedaan (poltics of difference). Kewarganegaraan sebetulnya sudah menjadl isu sentral sejak dari politik modernitas. Perbedaannya dari masa modernitas akhir ialah, sementara dahulu kewarganegaraan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat pasif dan warga yang didominasi oleh negara, maka kini muncul pemikiran tentang perbedaan. Dalam pemikiran ini disadari adanya perbedaan di antara warga negara sendiri, misalnya menurut gender maupun kebudayaan. Dengan mengusung perbedaan ini, isu kewarganegaraan kini dikaitkan dengan kekuatan komunitas untuk bersaing atau berkomplemen dengan negara dalam ruang hidup yang sama.

Kemudian *Nezo Social Movements: Politics of Identity and Politics of Disribution* berisi uraian sejauh mana peluang transformasi menuju pemberdayaan dalami diwujudkan, agar menjadi alternatif atau pelengkap bentuk-bentuk kelembagaan dominan. Gerakan sosial dipandang sebagai upaya untuk memobilisasi nilai-nilai imanen yang sebetulnya selalu ada dalam komunitas. Kelebihan dari gerakan sosial ialah kemampuannya untuk menumbuhkan solidaritas yang melewati batas-batas teritorial.

B. STRUKTUR KEKUASAAN

Istilah struktur kekuasaan dipopulerkan oleh Floyd Hunter, seorang sosiolog yang berasal dari Amerika untuk menggambarkan para pemimpin masyarakat yang menentukan kebijakan di Atlanta, Georgia. Istilah tersebut adalah bentuk dari "elit kekuasaan" yang memiliki struktur kekuasaan dari atas ke bawah. Berbagai kebijakan ditentutan dari struktur tertinggi dalam suatu pemerintahan. Dalam kelompok non-formal pun struktur kekuasaan berasal dari atas ke bawah (top-down). Dalam sebuah struktur, kekuasaan bergerak melalui atas ke

bawah hingga akhirnya memunculkan sebuah kebijakan yang harus ditaati oleh berbagai masyarakat.

Di Indonesia struktur kekuasaan tak terlepas dari bentuk negara yang ada. Bentuknya adalah negara kesatuan, yang berarti kekuasaan didasarkan pada kesatuan oleh rakyat Indonesia. Hampir mirip dengan demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, Indonesia juga seperti itu. Namun, perbedaannya adalah dalam setiap masyarakat memiliki golongan-golongan kecil yang terwakili dengan pemimpinnya atau kepala suku yang biasanya dihormati. Lalu kepemimpinan kecil tersebut memilih pemimpin yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena bentuk negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan berbagai suku dan ras yang menaunginya. Oleh sebab itu, bentuk negara adalah persatuan dan kekuasaan berada dalam lingkup persatuan tersebut.

1. Cita Persatuan dan Keragaman dalam NKRI

Prinsip persatuan dibutuhkan karena kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat majemuk. Keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman. Keragaman merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (united), tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (uniformed). Karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diindentikkan dengan atau dikacaukan atau dikaitkan dengan istilah kesatuan yang berkenaan dengan persoalan bentuk bangsa. Prinsip persatuan juga tidak boleh dipersempit maknanya ataupun diindentikkan dengan pengertian pelembagaan bentuk Negara Kesatuan yang merupakan bangunan negara yang dibangun atas motto 'Bhineka–Tunggal–Ika' (Unity in Diversity).

Bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan (Unitary State), sedangkan persatuan Indonesia adalah prinsip dasar bernegara yang harus dibangun atas dasar persatuan (unity), bukan kesatuan (uniformity). Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan 'negara persatuan' dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan

yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Dalam negara persatuan itu, otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Kehidupan orang per orang ataupun golongan-golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain, yang membuat seseorang atau segolongan orang berbeda dari orang atau golongan lain dalam masyarakat. Negara persatuan mengakui keberadaan masyarakat warga negara karena kewargaannya (civility).

Dengan demikian, negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena prinsip kewargaan yang bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Namun, konsepsi negara persatuan itu sering disalah-pahami seakan-akan bersifat 'integralistik', yang mempersatukan rakyat secara totaliter bersama-sama dengan pemimpinnya seperti konsepsi Hitler yang didasarkan atas pandangan Hegel tentang negara Jerman. Istilah negara persatuan cenderung dipahami sebagai konsepsi atau cita negara (staatsidee) yang bersifat totaliter ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan menafikkan otonomi individu rakyat yang dijamin hak-hak dan kewajiban asasinya dalam Undang Undang Dasar. Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan salah pengertian, istilah persatuan itu harus dikembalikan kepada bunyi rumusan sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia", bukan "Persatuan dan Kesatuan Indonesia" apalagi "Kesatuan Indonesia".

Persatuan adalah istilah filsafat dan prinsip bernegara, sedangkan kesatuan adalah istilah bentuk negara yang bersifat teknis. Bandingkan antara rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dan rumusan pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Negara Kesatuan adalah konsepsi tentang bentuk negara, dan Republik adalah konsepsi mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dalam kerangka UUD 1945. Indonesia adalah negara yang berbentuk Negara Kesatuan (unitry state). Kekuasaan asal berada di pemerintah pusat. Namun kewenangan

(authority) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hubungan-hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Propinsi serta pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, tidak diatur berdasarkan asas dekonsentrasi, melainkan hanya didasarkan atas asas otonomi atau desentralisasi dan tugas perbantuan (medebewin).

Di samping itu, dalam rumusan pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B (seluruhnya sebanyak 11 ayat), ditegaskan pula adanya pengakuan atas pluralisme di berbagai daerah. Pasal 18A ayat (1), misalnya menegaskan: "Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota atau antara propinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, pasal 18B ayat (1) menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang". Pasal 18B ayat (2) menegaskan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".

Dengan ketentuan-ketentuan konstitusional demikian, berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pengaturan antar daerah yang tidak seragam antara satu sama lain. Dalam hubungan antara pusat dan daerah atau daerah propinsi dengan kabupaten/kota dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat khusus seperti propinsi Papua. Pengaturan demikian dimaksud untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dengan keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan. Prinsip keadilan antar pusat dan provinsi dan daerah kabupaten/kota juga makin terjamin. Otonomi dan kebebasan rakyat dihadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah juga makin tumbuh dan berkembang sesuai prinsip demokrasi.

Untuk itu, susunan Negara Kesatuan dengan pengaturan yang bersifat khusus atau otonomi khusus dikembangkan sebagaimana mestinya

dengan memperhatikan perbedaan tingkat kemampuan antar daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan yang memungkinkan adanya pengaturan khusus berupa daerah otonomi khusus itu hendaklah dilaksanakan secara sistematis dan bertahap, daerah-daerah yang belum atau tidak dapat melaksanakannya, perlu diberi kesempatan mempersiapkan diri. Daerah-daerah juga tidak perlu memaksakan diri untuk secepat mungkin menerapkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan meninggalkan sama sekali atau mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Pemerintah pusat bertanggungjawab menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan secara bertahap itu. Di samping itu, meskipun susunan pemerintahan bersifat desentralistis, tetapi pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan koordinasi antar daerah propinsi, dan pemeritah daerah propinsi memiliki kewenangan koordinasi antar daearah kabupaten/kota sebagaimana mestinya.

2. Struktur Kekuasaan Eksekutif dalam Perspektif Model Integrasi

Jika berbicara tentang sistem pemerintahan sesungguhnya berbicara tentang relasi antara parlemen (legislatif) dengan eksekutif. Apabila dominasi dan konsentrasi kekuasaan terletak pada legislatif, maka model sistem pemerintahan adalah parlemen. Sistem pemerintahan ini dalam tinjauan model integrasi organisasi merupakan model *strong political* atau *weak executive*. Sedangkan apabila konsentrasi kekuasaan terpusat pada eksekutif, maka model ini menganut sistem pemerintahan presidensial.

Sistem pemerintahan ini dalam tinjauan model integrasi organisasi dapat dikatakan sebagai model *weak political* atau *strong executive*. Dengan kata lain berdasarkan pada pola kekuasaan dan kepemimpinan, kekuasaan eksekutif dibedakan atas sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem parlementer, pimpinan eksekutif atau administrator publik (kepala pemerintahan) yang biasa dijabat oleh Perdana Menteri (PM), presiden, dan lainnya bergantung pada mosi atau kepercayaan parlemen dan dapat turun dari jabatannya melalui mosi tidak percaya dari parlemen. Dalam sistem ini, PM dipilih oleh parlemen, yang kemudian diikuti dengan pengangkatan resmi oleh kepala negara. Biasanya PM berasal dari partai mayoritas, namun apabila tidak mencapai mayoritas, untuk membentuk pemerintahan dibentuk pemerintahan koalisi. PM merupakan pimpinan kabinet. Pemerintah bersifat kolegial atau kolektif, di mana PM dalam menerapkan kepemimpinannya bersifat kolektif melalui kekuasaan koordinasi terhadap menteri-menteri. Menteri-menteri merupakan kolega PM.

Masing-masing menteri bertanggung jawab kepada parlemen (Lijphart, 1995). Adapun ciri atau karakteristik dari sistem parlementer ini adalah sebagai berikut:

- Raja, ratu atau presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasan pemerintahan.
- Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
- Parlemen adalah satu-satunya lembaga yang anggotanya dipilih langsung rakyat melalui pemilihan Umum.
- Eksekutif adalah kabinet bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen.
- Bila parlemen mengeluarkan mosi tak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri maka kabinet harus menyerahkan mandatnya kepada kepala negara.
- Dalam sistem dua partai yang ditunjuk membentuk kabinet sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik pemenang pemilu.
- Dalam sistem banyak partai formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi dan mendapat kepercayaan parlemen.
- Bila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen maka kepala negara menganggap kabinet yang benar maka parlemen

dibubarkan oleh kepala negara (Verney, 1995) Presiden dalam sistem pemerintahan parlementer, (kecuali negara yang menganut sistem monarki konstitusional seperti Inggris dengan negara-negara *commonwealth*-nya), dipilih dan diangkat oleh atau menyertakan badan perwakilan rakyat.

Dalam pemilihan ini terdapat berbagai model, seperti di India dipilih oleh *electoral college* yang terdiri dari parlemen dan senat dan Presiden Italia dipilih dalam suatu rapat gabungan parlemen dan utusan daerah (regional delegates). Meskipun dia dipilih oleh parlemen, tapi dia tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden juga tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab pemerintahan ada pada kabinet. Presiden semata-mata sebagai kepala negara (chiep of state) yang merupakan simbol negara dan seremonial. Ia tidak bisa diganggu gugat (can do no wrong) (Ranney: 1990). Terdapat berbagai variasi negara-negara yang menerapkan sistem parlementer.

Ada negara yang bebentuk republik dan ada yang berbentuk kerajaan. Negara-negara seperti India, Singapura, Pakistan, Banglades, dan Israel adalah negera-negara republik yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Indonesia pada masa demokrasi liberal (1945-1959) adalah negara republik yang menerapkan sistem parlementer. Sedangkan negara kerajaan yang menerapkan sistem parlementer antara lain Inggris, Malaysia, Jepang, Belanda, Belgia, dan Swedia. Dalam menerapkan sistem parlementer ini, ada menteri-menterinya yang dilarang merangkap jabatan sebagai anggota parlemen, seperti Belanda, tetapi ada juga yang menteri-menterinya merangkap jabatan sebagai anggota parlemen, seperti Inggris (Romli: 2002).

Berdasarkan uraian tentang konsep sistem pemerintahan parlementer di atas, maka dapat dikatakan bahwa struktur kekuasaan eksekutif dibandingkan parlemen atau legislator sangat lemah dan wewenangnya sangat terbatas. Sementara kekuasaan parlemen (legislator) sangat kuat. Dia memiliki wewenang yang sangat luas, mengangkat dan memberhentikan kepala pemerintahan dan menteri-menteri. Jabatan pimpinan eksekutif (PM) rentan terhadap tindakan

pemberhentian dari jabatannya hanya berdasarkan mosi tidak percaya dari parlemen. Wewenang pimpinan eksekutif terhadap menteri-menterinya juga hanya sebatas koordinasi. Oleh karena itu dia tidak memiliki wewenang untuk mengganti apalagi memberhentikan menteri-menteri di bawah koordinasinya.

Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem ini, selain presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus juga sebagai kepala negara. Presiden dipilih baik secara langsung oleh rakyat maupun oleh suatu badan tertentu untuk masa jabatan tertentu, dan dalam keadaan normal tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri. Pada sistem presidensial, eksekutif (pemerintah) non-kolegial. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menterinya. Semua pejabat di bawah presiden adalah pembantunya. Jadi kepemimpinan dan kekuasaannya bersifat hirarkis, dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada presiden. Dengan kata lain, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Tidak seperti di sistem parlementer. Pertanggung jawaban presiden bukan kepada parlemen, karena itu tidak ada mosi tidak percaya, tetapi pertanggung jawabannya kepada konstitusi.

Namun demikian, presiden dapat diberhentikan dari jabatannya melalui mekanisme *impeacment* apabila melakukan pengkhianatan, menerima suap, dan melakukan kejahatan serius. (Romli: 2002). Beberapa ciri dari sistem presidensial ini adalah sebagai berikut:

- Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
- Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
- Menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen.
- Menteri bertanggung jawab kepada presiden.
- Masa jabatan mebteri tergantung pada keprcayaan presiden.
- Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem *check and balances* (Verney: 1995).

Sistem presidensial dianggap dapat menciptakan stabilitas eksekutif karena didasarkan pada masa jabatan presiden yang telah ditentukan di mana selama menjabat tidak ada yang mengganggu gugat kecuali ada situasi yang tidak normal atau melanggar UUD yang telah ditentukan. Ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemerintah (kabinet) suatu waktu dapat jatuh karena mosi tidak percaya.

Apalagi kabinet terbentuk dari koalisi sederhana maka akan rawan dari ancaman mosi tidak percaya. Meskipun dapat menciptakan stabilitas eksekutif, namun bila terjadi konflik antara eksekutif dengan legislatif akan menemui jalan buntu dan mandeg. Konflik menjadi tidak terselesaikan dan akan berlarut-larut. Ini terjadi karena masing-masing bertahan pada legitimasi yang dimiliki karena keduanya dipilih rakyat. Konflik ini akan menjadi rumit manakala eksekutif dan legislatif berasal dari kekuatan politik (partai politik) yang berbeda. Karena itu sistem presidensial dianggap kaku. Berbeda dengan sistem parlementer yang dianggap pleksibel, karena apabila ada konflik antara parlemen dengan kabinet dengan mudah diselesaikan, yaitu melalui mosi tidak percaya. Melalui mosi tidak percaya ini pemerintah dapat diganti kapan saja (Lijphart: 1995).

Dalam tinjauan model integrasi organisasi, struktur kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden dalam sistem presidensial ini menjadi kuat atau sebanding dengan legislatif. Jabatan eksekutif tidak dapat diganti semaunya oleh parlemen hanya karena alasan mosi tidak percaya. Kekuasaan kepala eksekutif juga menjadi lebih luas. Dia memiliki wewenang untuk mengatur para menteri yang berada di bawahnya, karena menteri-menteri tersebut merupakan pembantunya. Sistem pemerintahan ini dapat dikatakan sebagai model eksekutif yang kuat.

3. Struktur Kekuasaan pada Periodesasi Pemerintahan Indonesia

Era Orde Lama

Pada awal kemerdekaan, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana kekuasaan presiden bersifat mutlak. Dasarnya ada pada Pasal IV Aturan Peralihan dari UUD 1945, yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden, sehingga presiden dapat menjadi "diktator konstitusional". Sedangkan lembaga lain hanya sebagai pembantu presiden, apalagi ada Aturan Tambahan yang mengatakan bahwa presiden dapat mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh UUD 1945 (Romli: 2002). Era ini merupakan era kekuatan dan kejayaan kekuasaan eksekutif (Strong Executive Model), namun kekuasaan presiden yang besar itu ternyata tidak berlangsung lama, karena ada maklumat Wakil Presiden No.X Tanggal 16 Oktober 1945 yang mengatakan bahwa KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang semula sebagai institusi dengan tugas membantu presiden dirubah menjadi sebuah institusi yang diberikan kekuasaan legislatif dan ikut juga menetapkan GBHN. Tidak hanya itu, KNIP juga benar-benar, menjadi sebuah lembaga parlemen yang terdiri dari wakil-wakil partai serta mendesak agar dibentuk sebuah kabinet yang bertanggung jawab kepada KNIP (parlemen). Akhirnya dibentuklah Kabinet Syahrir.

Dengan dibentuknya kebinet ini, sistem pemerintahan berubah dari presidensial ke parlementer. Dalam sistem ini presiden hanyalah seorang kepala negara yang tidak mempunyai kekuasaan pemerintahan, kedudukannya hanya bersifat simbolik dan seremonial (Weak Executive Model). Sistem parlementer ini juga diterapkan pada masa Indonesia menjadi negara federal (Republik Indonesia Serikat/RIS) yang berdasarkan konstitusi RIS tahun 1949 dan ketika kembali menjadi negara kesatuan yang berdasarkan UUDS 1950.

Namun meskipun sama-sama menganut sistem parlementer, kedua institusi ini memiliki perbedaan yaitu:

a. Dalam konstitusi RIS 1949 menteri-menteri tidak boleh

menjadi anggota parlemen, sementara dalam UUDS 1950 menteri-menteri dapat menjadi anggota parlemen.

b. Dalam konstitusi RIS 1945 tidak ada ketentuan yang mengatur presiden dapat membubarkan parlemen, sedangkan pada UUDS 1950 ada ketentuan presiden dapat membubarkan parlemen (Strong Executive Model).

Akibat penerapan sistem parlementer ini, jalan pemerintahan menjadi tidak kondusif akibat multi partai dengan koalisi sederhana. Akhirnya presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan menerapkan demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan presiden, yakni Sukarno. Jumlah partai dikurangi. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPRGR yang anggotanya diangkat presiden. Ketua DPR, MPR, BPK, MA, dan kepala-kepala staf di ABRI diangkat jadi pembantu presiden dengan jabatan menteri (Strong Executive Model).

Namun demokrasi terpimpin ini tidak berlangsung lama. Akibat tragedi G 30 S/PKI, Sukarno yang semula diangkat sebagai presiden seumur hidup, oleh MPRS kemudian mencabutnya dan memberhentikan Sukarno sebagai presiden. Akhirnya berakhirlah periode orde lama.

Era Orde Baru

Pada era Orde Baru sistem pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Suharto tetap menerapkan sistem presidensial. Bagi Suharto, demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam menyikapi banyaknya partai politik yang diklaim sebagai biang kekacauan yang menimbulkan ketidakstabilan politik seperti orde lama, lagi-lagi Suharto mengurangi jumlah partai dari 10 menjadi 3 yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Namun berbeda dengan Sukarno, di mana setiap kebijakan tanpa konsultasi atau persetujuan dengan lembaga perwakilan rakyat, bahkan lembaga ini dibubarkan (Strong Executive Model), Suharto dalam mengeluarkan kebijakan selalu melalui persetujuan lembaga perwakilan (DPR/MPR). Sehingga Sukarno dianggap inkonstitusional, sedangkan Suharto dianggap

konstitusional. Namun meskipun bersifat konstitusional, tetapi watak kekuasaan Suharto tetap sama dengan Sukarno, otoritarianisme (Demokrasi Terpimpin Konstitusional) (Romli: 2002).

Jadi meskipun model kekuasaan lembaga eksekutif di bawah kepemimpinan Suharto ini termasuk salah satu ciri dari *Weak Executive Model*, namun secara umumnya era orde baru sistem pemerintahan Indonesia merupakan kejayaan eksekutif (Strong Executive Model). Terciptanya stabilitas politik lebih disebabkan oleh faktor *strong man*, yaitu sang pemimpin pemerintahan (Suharto). Dengan didukung oleh militer, Golkar, dan Birokrasi, Suharto melakukan politik kooptasi terhadap semua kekuatan politik, mengontrol rekreutmen politik (Anggota MPR, DPR, DPA, MA, BPK, lembaga eksekutif, dan organisasi politik). Era orde baru kekuasaan lembaga legislative benar-benar mandul. Oleh karena itu lembaga ini seringkali dikatakan hanya sebagai tukang stempel. Tiga fungsi lembaga ini yang semestinya, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Era Reformasi

Ketika era reformasi, di mana ada kebebasan sehingga tumbuh begitu banyak partai politik, ternyata sistem presidensial tidak dapat menciptakan stabilitas. Mestinya, sesuai dengan penjelasan UUD 1945 bahwa "Concentration of power in the hand of the president", seharusnya DPR (melalui MPR) tidak dapat menjatuhkan presiden. Artinya, berdasarkan UUD ini merupakan sistem pemerintahan adalah presidensial sehingga dalam tinjauan model integrasi adalah *Strong Executive Model*. Namun yang terjadi sebaliknya, DPR melalui MPR dapat menjatuhkan presiden. Oleh karena itu yang dipraktikkan adalah sistem parlementer. Bila sistem parlementer, seharusnya presiden dapat membubarkan DPR.

Jadi ada ketidakjelasan pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legisltaive disini, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Contoh aktualnya dari korban ketidakjelasan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang diturunkan di tengah jalan

oleh MPR. Meskipun Presiden diberi kekuasaan yang besar (sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, fungsi legislative, dan fungsi yudikatif), tetapi kekuasaannya itu suatu saat bisa dicabut oleh MPR. Inilah beberapa kasus struktur kekuasaan eksekutif dalam dua varian sistem pemerintahan yang pernah diberlakukan di Indonesia.

C. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidential. Akan tetapi, sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Percampuran itu antara lain tercermin dalam konsep pertanggung-jawaban Presiden kepada MPR yang termasuk ke dalam pengertian lembaga parlemen, dengan kemungkinan pemberian kewenangan kepadanya untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya, meskipun bukan karena alasan hukum. Kenyataan inilah yang menimbulkan kekisruhan, terutama dikaitkan dengan pengalaman ketatanegaraan ketika Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya. Jawaban atas kekisruhan itu adalah munculnya keinginan yang kuat agar anutan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang bersifat Presidentil dipertegas dalam kerangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain alasan yang bersifat kasuitis itu, dalam perkembangan praktek ketatanegaraan Indonesia selama ini memang selalu dirasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonsia berdasarkan UUD 1945. Sistem pemerintahan yang dianut, di mata para ahli cenderung disebut 'quasi presidentil' atau sistem campuran dalam konotasi negatif, karena dianggap banyak mengandung distorsi apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang mempersyaratkan adanya mekanisme hubungan 'checks and balances' yang lebih efektif di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Karena itu, dengan empat perubahan pertama UUD 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan Presiden langsung, dan dilakukannya

perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka anutan sistem pemerintahan kita menjadi makin tegas menjadi sistem pemerintahan Presidentil.

Dalam sistem Presidentil yang murni, pada pokoknya, tidak lagi perlu dipersoalkan mengenai pembedaan atau apalagi pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Pembedaan dan pemisahan antara kedua fungsi itu hanya relevan dalam sistem pemerintahan parlementer yang memang mempunyai dua jabatan terpisah, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan Presidentil cukup memiliki Presiden dan Wakil Presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian tidak perlu lagi ada pembedaan antara sekretariat negara dan sekretariat kabinet ataupun keputusan Presiden sebagai kepala negara dan keputusan Presiden sebagai kepala pemerintahan, Republik Indonesia berdasarkan sistem Presidentil hanya memiliki Presiden dan Wakil Presiden dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Bahkan, dalam konteks pengertian Negara Hukum, prinsip "the rule of law", dapat dikatakan bahwa secara simbolik, yang dinamakan Kepala Negara dalam sistem pemerintahan Presidentil itu adalah konstitusi.

Dengan perkataan lain, kepala negara dari negara konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden beserta semua lembaga negara atau subyek hukum tatanegara lainnya harusnyalah tunduk kepada konstitusi sebagai 'the symbolic head of state' itu. Presiden dan Wakil Presiden cukup disebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden saja dengan seperangkat hak dan kewajibannya masing-masing atau tugas dan kewenangannya masing-masing. Tidak ada keperluasn untuk membedakan kapan ia bertindak sebagai kepala negara dan kapan ia berperan sebagai kepala pemerintahan seperti kebiasaan dalam sistem pemerintahan parlementer. Oleh karena itu, dalam sistem kenegaraan yang dapat kita sebut 'constitutional democratic republic', kedudukan KONSTITUSI bersifat sangat sentral. Konstitusi pada dasarnya merupakan KEPALA NEGARA yang sesungguhnya.

1. Badan dan Lembaga Eksekutif yang Bersifat Independen

Selain lembaga-lembaga negara seperti tersebut di atas, bentuk keorganisasian banyak negara modern dewasa ini juga mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat pesat, khususnya berkenaan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakkan. Perkembangan-perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia di tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi empat tahun terakhir. Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian dan Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif.

Dari keempatnya, yang sekarang ini telah menikmati kedudukan yang independen adalah organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (POLRI) dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sedangkan Kejaksaan Agung sampai sekarang belum ditingkatkan kedudukannya menjadi yang independen. Pada tingkat kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Persaingan Usaha Pemberantasan Korupsi (KPPU), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain sebagainya, jika nanti, Undang-Undang tentang Penyiaran jadi disahkan, akan ada pula komisi baru lagi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang juga bersifat independen.

Di bidang administrasi dan pelaporan transaksi keuangan dibentuk pula lembaga baru yang bernama Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang juga ditentukan bersifat independen. Selain itu, ada pula komisi yang dibentuk hanya dengan Keputusan Presiden, misalnya, Komisi Hukum Nasional (KHN). Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campursari, yaitu

semi legislatif dan regulatif, semi-administratif, dan bahkan semi yudikatif. Bahkan, dalam kaitan itu muncul pula istilah 'independent and self regulatory bodies' yang juga berkembang di banyak negara. Di Amerika Serikat, Lembaga-lembaga seperti ini tercatat lebih dari 30-an jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara fungsional dikaitkan dengan Kongres Amerika Serikat. Yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini, misalnya, adalah *Federal Trade Commission* (FTC), *Federal Communication Commision* (FCC), dan sebagainya.

Kedudukan lembaga-lembaga ini di Amerika Serikat, meskipun secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan eksekutif, tetapi pengangkatan dan pemberhentian para anggota komisi itu ditentukan dengan pemilihan oleh Kongres. Karena itu, keberadaan Lembaga-lembaga seperti ini di Indonesia dewasa ini, betapapun juga, perlu didudukkan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia Modern, dan sekaligus dalam kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang lebih menjamin keadilan dan demokrasi di masa yang akan datang.

2. Instruktur Kemasyarakatan

Selain struktur kelembagaan negara dan pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, infrastruktur kemasyarakatan juga mengalami perubahan besar-besaran. Ada tiga agenda "institutional reform" yang penting dalam soal ini, yaitu reformasi kepartaian, reformasi keormasan, reformasi kelembagaan badan hukum (legal body).

Di masa reformasi, keran politik terbuka lebar, sehingga segala pembatas terhadap prinsip kebebasan berserikat ditiadakan. Sesuai dengan jaminan konstitusional mengenai prinsip kebebasan, semua orang diakui berhak mendirikan partai politik, sehingga berkembang menjadi sistem politik yang biasa dikenal dengan 'multi-party system'. Untuk mengatur dan mengarahkan agar kecenderungan dan nafsu orang untuk mendirikan partai politik menjadi rasional, perlu diadakan pembatasan jumlah partai politik. Apabila jumlah partai politik tidak dibatasi, maka jumlah yang terlalu banyak akan menurunkan citra partai itu sendiri secara keseluruhan di mata rakyat.

Jika legitimasi lembaga kepartaian buruk di mata rakyat dan tidak percaya, niscaya citra demokrasi di mata rakyat juga menjadi rusak. Akibatnya, kepercayaan dan apresiasi publik terhadap ide demokrasi dapat mengalami kemerosotan yang pada gilirannya dapat menjadi lahan subur bagi munculnya otoriterisme ataupun totalitarianisme baru di masa depan. Karena itu, demi demokrasi itu sendiri, jumlah partai mestilah dibatasi. Akan tetapi pembatasannya haruslah bersifat obyektif dan alamiah.

Beberapa kemungkinan yang dapat diterapkan adalah, *pertama* penerapan sistem pemilihan umum yang menjamin rakyat dapat menentukan pilihannya secara langsung dengan memilih 'orang' (bukan memilih tanda gambar partai) seperti yang terdapat dalam sistem yang dikenal dengan 'sistem distrik'. Sistem ini dengan sendirinya akan mendorong terjadinya kerjasama, 'koalisi' atau bahkan 'merger' antar partai politik, sehingga dalam jangka panjang dapat mendorong penyederhanaan jumlah partai secara alamiah; *kedua* penentuan adanya 'electoral tresshold' berdasarkan hasil perolehan dukungan suara dari pemilihan umum sebelumnya. Dengan adanya pembatasan 2 persen, 3 persen, ataupun 5 persen, maka dengan sendirinya, pada masa pemilihan umum berikutnya akan banyak partai politik yang membubarkan diri dengan sendirinya; ketiga kebijakan memberi bantuan kepada partai politik yang dapat memancing dan mendorong minat orang mendirikan partai dengan harapan dapat memperoleh dana bantuan dari pemerintah, bertentangan dengan kebutuhan untuk mengendalikan jumlah partai politik, dan karena itu sebaiknya dihentikan.

Di samping itu, untuk memperkuat derajat pelembagaan partai politik, disiplin internal partai perlu ditingkatkan, yaitu: pertama sistem hukum dan etika internal perlu dibudayakan dengan memperkuat infra struktur. Dewan Kehormatan yang dapat menjaga agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kode etika partai politik ditegakkan dengan sebaik-baiknya; kedua perlunya mekanisme yang menjamin agar anggota partai politik yang melanggar disiplin partai dapat ditindak oleh pemimpinan partai yang bersangkutan yang dapat berakibat pada pemberhentian status yang bersangkutan sebagai anggota parlemen (DPR); *ketiga* setiap partai politik harus didorong

untuk mentradisikan penyelenggaraan aktivitas rutin ke dalam, baik kegiatan penguatan kelembagaan dan kultur demokrasi internal, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan politik dan pemberdayaan anggota.

Penataan infrastruktur sistem politik nasional selain terkait dengan sistem kepartaian, juga berkenaan dengan sistem keorganisasian masyarakat. UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai instrumen untuk mengendalikan dan membatasi kebebasan orang untuk berserikat dan berorganisasi dan dipaksa untuk berasas tunggal, sudah tidak dapat lagi dipertahankan. UU keormasan dan juga UU partai politik sekarang cenderung melarang adanya afiliasi antara organisasi kemasyarakatan dengan partai politik. Meskipun motivasi pelarangan ini nampak baik, tetapi hal itu menyebabkan partai politik menghadapi kesulitan untuk akrab dengan rakyat. Padahal, untuk dekat dengan rakyat, partai politik harus mengembangkan aneka kegiatan sosial dan sebagainya. Mengapa partai harus dilarang mempunyai sayap kegiatan panti asuhan, misalnya keberadaan organ sayap kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti itu justru dapat mendorong partai politik berhubungan akrab dengan konstituennya masing-masing. Sudah tentu organisasi kemasyarakat non-partisan perlu diperkuat dan mendapat perhatian yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya ditentukan dilarang memberikan bantuan kepada organ-organ ormas yang berafiliasi kepada partai. Akan tetapi, partai tidak perlu dilarang mengembangkan sayap ormasnya masing-masing asalkan transparan.

Di Orde Baru, meskipun resminya dilarang, tetapi banyak ormas yang secara terselubung merupakan organ partai politik dan mendapat bantuan besar dari dana pemerintah (APBN). Hal ini tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Karena itu, partai politik sebaiknya diizinkan mengembangkan organisasi afiliasi, tetapi dilarang mendapatkan bantuan dari dana APBN. Selain itu, sama seperti kultur yang perlu dikembangkan dilingkungan partai politik, prinsip 'rule of law', 'rule of the game' dan kultur demokrasi perlu dibudayakan di dalam lingkungan organisasi kemasyarakatan. Karena itu, infrastruktur konstitusi organisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta infra struktur kode etik organisasi perlu ditegakkan

dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mekanisme Dewan Kehormatan internal organisasi kemasyarakatan hendaknya dapat dikembangkan menjadi mekanisme yang mentradisi di setiap lingkungan organisasi kemasyarakatan di tanah air kita. Untuk itu, di samping memperbarui sistem hukum kepartaian, sebaiknya pemerintah segera mengambil inisiatif untuk memperbarui pula sistem hukum organisasi kemasyarakatan di tanah air.

Lebih dari semua tersebut di atas, pada akhirnya harus kita sadari bahwa sistem demokrasi membutuhkan basis budaya yang rasional jujur, terbuka, akuntabel, dan menjamin egilitarianisme. Karena itu, pendidikan politik dan komunikasi politik yang mendorong pembudayaan kehidupan demokrasi menjadi sangat mutlak dibutuhkan. Di sinilah kita menganggap penting lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya serta media massa, baik cetak maupun elektronik, yang berperan penting untuk memperluas kesadaran koginitif maupun perilaku budaya yang demokratis di kalangan masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan reformasi di sektor pendidikan yang dapat mencerahkan dan membebaskan warga masyarakat kita dari berbagai belenggu pemikiran mereka. Demikian pula pers bebas dan kebebasan pers haruslah menghasilkan proses pembebasan bagi masyarakat pembacanya. Kebebasan pers bukanlah untuk dirinya sendiri. Jika pers bebas, tetapi bebas yang bersifat mendikte, menghakimi, dan memasung kreativitas pembacanya sendiri, maka pers demikian bukanlah pers yang mencerahkan dan membebaskan. Artinya, kita memerlukan pers yang bebas untuk mengontrol kemapanan, dan pada saat yang sama kita juga memerlukan pers yang mencerahkan.

BAB III

Politik dan Kekuasaan Indonesia Masa Kuno: Dari Pra-Sejarah Sampai Hindu-Budha

A. KULTUR *PRIMUS INTERPARES* MASA PRA-SEJARAH

Sampai sekarang pemilihan dengan metode *Primus Interpares* masih berlanjut di Indonesia, dinamika sejarah kebudayaan manusia dari waktu ke waktu selalu meninggalkan jejak budaya yang mencerminkan kehidupan pada zamannya. Dengan mencermati dan memanfaatkan nilai-nilai budaya masa silam, pada saatnya kelak kita akan dapat menegakkan jati diri sebagai suatu bangsa yang besar.

Sampai saat ini, sistem pemilihan pemilihan melalui musyawarah yang dilandasi dengan sistem Demokrasi masih banyak dilakukan. Secara langsung peserta pemilihan masih menggunakan menggunakan kultur

Primus Intepares. Para peserta masuh menggunakan kemampuan menganalisis mereka dengan melihat bagaimana kelebihan dari calon yang menngajukan diri dan bahkan dipilih secara tanpa adanya pencalonan diri. Peserta akan melihat bagaimana kemampuan dari para calon pemimpin. Namun di masa sekarang, akan dilakukan pemilihan dengan metode demokrasi yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perkumpulan.

Lahirnya figur kuat yang melampaui sistem dan institusi yang merusak bangunan politik karena sistem tercipta tidak lain adalah cermin dan kepanjangan dari dirinya sendiri. Seharusnya pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu membangun sistem yang berkelanjutan. Tidak perlu diingkari adanya orang-orang yang meraup keuntungan dari situasi paternalistik di dalam suatu organisasi. Masyarakat perlu diajak dan dididik untuk percaya pada sistem dan cita-cita, bukan semata-semata pada orang. Figur yang kuat harus secara sadar dilembagakan menjadi kekuatan sistem yang mapan.

Ilmu sosiologi mengenalkan "ascribed status" dan "achieved status." *Ascribed status* adalah status sosial yang melekat pada seseorang karena kelahiran atau afiliasi keturunan. Status ini tidak dapat dipilih atau diraih oleh seseorang namun "terberi" oleh keadaan. Sebaliknya, *achieved status* adalah posisi sosial yang diperoleh melalui usaha dan kemampuan seseorang.

Tantangan bagi budaya demokrasi adalah ketika *ascribed status* menjadi lebih penting dan determinan dibanding *achieved status* dalam masalah-masalah yang membutuhkan tanggung jawab. Lagi-lagi, itulah masalah yang akan mengerdilkan kebebasan, kompetisi, dan meritokrasi.

Tantangan terhadap budaya demokrasi yang tidak kalah pentingnya adalah yang menang tidak bisa atau tidak mau menerima yang kalah; dan yang kalah tidak mampu menghormati yang menang. Kerugian dari situasi ini adalah hilangnya potensi sinergi dari dua pihak yang memiliki kemampuan.

Muryanto kemudian menyatakan, maka kebebasan, kompetisi dan meritokrasi menjadi agenda terpenting dalam membangun budaya

demokrasi. Tiga persyaratan penting dalam budaya demokrasi harus dijaga dari polusi politik uang dan akan membentengi suatu organisasi dari politik uang. Ketiganya juga akan melahirkan sejumlah pemimpin yang kompeten setelah ditempa oleh proses dan memiliki akar penerimaan publik. Sehingga tidak akan melahirkan orang kuat yang melampaui sistem dan institusi karena pemimpin yang dihasilkan adalah "primus interpares" atau "yang utama dari yang setara" sehingga *check and balance*, baik secara formal maupun kultural, dapat berlangsung dengan efektif. Memaknai kebebasan, kompetisi dan meritokrasi membutuhkan komitmen dari semua pihak.

Sampai sekarang pemilihan dengan metode *Primus Interpares* masih berlanjut di Indonesia, baik dari kelompok kecil di masyarakat yang membutuhkan pemimpin dalam perkumpulan mereka maupun pemilihan pemimpin-pemimpin besar lainnya di Indonesia. Dalam sistem politik di Indonesia dapat kila lihat piramida Kekuasaan di Indonesia (Menurut W Liddle).

1. Presiden - primus interpares yang utama dan yang setara mengontrol *political resources*.
2. ABRI Sebagai stabilisator dan dinamisator.
3. Birokrasi sebagai pembina kepatuhan ''obedience".

Di atas merupakan bagaiman Presiden tetap dilihat masyarakat bagaimana kelebihan dan bagaimana kemenonjolan yang ia miliki dalam kepemimpinan. Presiden menjadi *primus Interpares* utama dalam pemilihan pemimpin di Indonesia.

B. STRUKTUR DAN KULTUR

Jika membahas perkembangan negara dari suatu organisasi yang sangat sederhana sampai yang modern, pada umumnya ahli-ahli ilmu politik selalu berpijak dalam bidang Antropologi. Dua bidang antropologi ini dalam hubungannya dengan negara membahas organisasi, pemimpin, tradisi, dan kebudayaan. Oleh karena itu bidang Antropologi politik sebagai pendekatan untuk menjelaskan sejarah

ketatanegaraan, tidak terlepas dari kerangka politik yang mendukungnya. Ada satu buku yang berjudul Antropologi Sosial: Sebuah Pengantar, karangan Huizinga, salah satu babnya membahas bentuk-bentuk negara yang primitif. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa bentuk yang paling umum dari sistem politik di antara masyarakat-masyarakat yang dipelajari oleh ahli antropologi ternyata masyarakat tersebut sudah dapat dinamakan *state*, meskipun masyarakat tersebut tergolong primitif yang tinggal secara terisolasi di pedalaman. Masyarakat kesukuan atau primitif ini oleh ahli antropologi di namakan tribe.

Dari pendekatan antropologi sosial dan politik tribe sudah mempunyai sistem politik. Masyarakat kesukuan berdasarkan kajian antropologi mempunyai ciri-ciri:

1. Jumlah penduduk biasanya sedikit dibandingkan dengan masyarakat modern ini, hanya ada beberapa keluarga yang mendiami wilayah-wilayah kesukuan.
2. Masyarakat kesukuan sangat tergantung pada alam, bahkan masyarakat tersebut mengisolasi di alam.

Berdasarkan teori antropologi, yang dibangun oleh para ahli antropologi Eropa Barat yang mempelajari masalah masyarakat di Asia sebagai tanah koloni, antara lain dijelaskan bahwa masyarakat-masyarakat kesukuan sebenarnya merupakan masyarakat yang sudah mempunyai sistem kekuasaan, dan hal ini dapat dilihat dari pemimpin-pemimpin sukunya.

Adapun ciri-ciri pemimpin atau kepala masyarakat kesukuan antara lain:

1. Mempunyai kelebihan dari kemampuan rata-rata anggota suku, misalnya keberanian, melindungi warga suku dari suku lain, yang oleh ahli antropologi disebut "primus inter pares", yang artinya satu-satunya primus inter class.
2. Mempunyai pengetahuan dalam hal adat-istiadat, memimpin ritual, dan penyerbuan.

3. Seorang pemimpin kesukuan mampu menciptakan suasana kekerabatan yang baik, sehingga unsur-unsur dendam dapat dihilangkan.

Oleh karena itu pemimpin kesukuan harus kerja sama dalam warga kesukuan. Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budayanya mencakup tahap ontologi, yaitu tahap dimana hakekat dasar hidupnya sangat tergantung pada alam. Tahap ini diperkuat dengan tahap mistis, yaitu tahap memitoskan alam dengan berbagai ritual seperti upacara. Sedangkan dalam masyarakat modern, tahapannya sudah memasuki tahap fungsional, di mana logika, nalar, pikiran, mulai digunakan untuk menguasai alam, dan tidak tergantung pada alam. Tetapi dalam beberapa kasus mesyarakat modern seringkali lari pada tahap mistis. Terbentuknya kepemimpinan masyarakat kesukuan, dapat dimulai dari Indonesia dan membandingkannya dengan suku lain di dunia terutama Afrika dan Amerika Latin. Untuk Indonesia dapat dipilih tentang masyarakat kesukuan yang ada di Irian Jaya.

Ini berarti bahwa masyarakat kesukuan dapat direkam ciri-ciri kepemimpinan kesukuan yang dalam beberapa literatur disebut *primus interpares*, yaitu satu-satunya tokoh dari sekian banyak orang. Salah satu buku yang menjelaskan primus interpares dalam masyarakat internasional adalah *Indonesian Sociologikal Studies*, karangan B. Schrieke terbitan tahun 1960 Sumur Bandung, Bandung. Dalam konsep *primus interpares* ini, maka membahas masyarakat kesukuan ini, masih sangat relevan. Dan pada umumnya konsep kepemimpinan *primus interpares* tidak dianut dalam masyarakat demokratis dan masyarakat modern.

Yang dimaksudkan dengan pemilu di sini adalah pemilihan oleh umum dalam urusan politik bersifat publik, seperti memilih anggota legislatif, gubernur, wakil gubernur, walikota dan wakil wali kota. Jabatan-jabatan ini mengurus kepentingan publik dan siapa yang menduduki jabatan-jabatan tersebut serta program yang ditawarkannya dalam kampanye pemilu untuk dilaksanakan akan berdampak publik, terhadap semua warga, baik yang memilih maupun yang tidak. Pemilihan oleh publik terhadap jabatan-jabatan publik sebenarnya mempunyai akar budaya dan sejarah yang sudah lama

dalam masyarakat kita. Bahkan jauh sebelum Republik Indonesia (RI) berdiri, kita sudah mengenal sistem pemilihan. Pemilihan dilakukan untuk menghormati rasa keadilan dan harapan publik. Yang dipilih mengemban kepercayaan untuk melaksanakan harapan, keinginan, mimpi bersama untuk hidup makin manusiawi. Bukan untuk menjadi tidak manusiawi dan memerosotkan kehidupan publik. Melihat kembali sejarah politik dan budaya di negeri kita, saya mempertanyakan: Apa benar negeri kita tidak mempunyai tradisi demokrasi dan hanya Barat (berbasiskan demokrasi selektif kota Yunani Kuno, Athena) yang mengenal demokrasi. Sehingga demokrasi Barat dikatakan sebagai model.

Dalam budaya dan sejarah pemilihan di bagai daerah negeri kita, termasuk di Tanah Dayak ini, jauh sebelum RI berdiri, orang-orang memilih warga sungai, kampung atau suku, yang terbaik sebagai pemimpin mereka. Kualitas baik ini dikenal oleh semua warga, sehingga yang memimpin sesungguhnya diakui sebagai warga terbaik di antara mereka. Seorang *primus interpares*. Rekam jejaknya (track record)-nya diketahui oleh semua orang. Ia dipilih dan dikampanyekan tanpa kampanye oleh rekam jejaknya. Demikian halnya dengan tampilnya tokoh damang, pambakal, pangirak, mantir. Rekam jejak ini membuat mereka yang dipilih mendapat kepercayaan penuh, dipilih secara bulat (aklamasi), dan mempunyai wibawa. Wibawa (authority) artinya pengaruh dan kekuasaan yang diterima dengan lega. Bukan kekuasaan bersandarkan pada kekuatan paksaan (power). Wibawa seorang tokoh merangkum kepercayaan, mutu tokoh (kemampuan mengorganisasi, tingkat visioner, kemampuan merekam dan memahami mimpi publik dalam program publik kemudian melaksanakannya, menghormati keadilan, pandai mendengar, memecahkan masalah dan pandai mempersatukan). Teladan bagi warganya. Seorang primus inter pares pada masa itu tidak lain adalah jiwa suku, sungai, dan kampung dengan ketrampilan menyeluruh. Demikian dulu di Masyarakat Adat (MA).

Bagaimana melihat, apakah tokoh itu seorang *primus interpares* relatif dalam syarat sekarang ini? Pertama-tama kita membaca rekam jejaknya. Karena itu sejarah diri termasuk prestasi kandidat perlu dibeberkan dan disimak. Dicek dan direcek. Rekam jejak bisa diusut

dan tercatat dalam sejarah, baik tulisan maupun lisan. Dalam rekam jejak ini, bisa dibaca kemampuan, pola pikir dan mentalitas kandidat, wacana dan mimpi-mimpinya. Kemampuannya menangani persoalan. Kedua, dengan membaca dan menelaah program menyeluruh yang ditawarkan oleh kandidat. Melalui program, bisa diketahui apa-apa yang akan dikerjakan oleh kandidat jika ia keluar sebagai pemenang. Sebaliknya dengan program ini pulalah pemilih/masyarakat mengontrol kecocokan janji dan perbuatan. Program ini oleh kandidat perlu disebarluaskan ke kalangan masyarakat untuk dipelajari, dikritisi, sehingga kandidat tidak menjadi "kucing dalam karung" yang diperjualbelikan kepada pemilih. Seniscayanya kampanye pemilukada adalah upaya mesosialisasikan program, bukan menabur janji dalam kalimat-kalimat cekak, jargonal, tanpa penjelasan.

Dengan penyebar luasan program oleh kandidat, maka program itu bisa dipelajari dan dikritis publik, baik dalam debat atau pun di rapat kampanye. Alasan debat tidak menyediakan waktu cukup untuk mengenal kandidat, saya kira kurang berdasar. Apalagi jika dalam kampanye, kandidat juga menjelaskan rekam jejaknya dan debat merupakan bagian dari kampanye. Kampanye tidakkah intinya mensosialisasikan program? Debat publik adalah salah satu cara terbaik untuk mengkhayati dan membedah program? Program kandidat sekaligus berfungsi sebagai standar dalam melakukan kontrol terhadap kandidat pemenang di kemudian hari.

Program sebagai standar kontrol terhadap gubernur atau kandidat pemenang menjadi penting dalam menyongsong keluarnya penguatan hak DPRD melalui revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, untuk mengajukan usul pencopotan gubernur yang melakukan penyimpangan (lihat: Harian Tabengan, Palangkaraya, 25 Januari 2010). Dalam konteks inilah maka peran kontrol masyarakat dan lembaga-lembaganya akan menjadi nyata, bahkan efektif. Kontrol untuk melahirkan pengelola kekuasaan yang sehat, bersih, efektif dan berkemampuan. Jika hal ini terjadi maka bisa diharapkan ada keseimbangan antara kekuatan rakyat dan negara. Negara menjurus ke arah perwujudan nilai republik (res publica, untuk kepentingan umum dan liberté, egalité dan fraternité) serta berkeindonesiaan.

Sementara itu, jika dalam proses pemilu, masih berlangsung praktek politik uang (money politic) dan "serangan fajar", maka perbuatan demikian mempertanyakan: Apakah kandidat memang calon yang berkualitas *primus interpares* dalam arti politik dan spiritualitas? Politik uang dan "serangan fajar" apakah bukannya lahir dari wacana "kekuasaan untuk kekuasaan", "kekuasaan untuk kami" bukan untuk "kita", wacana bahwa politik menghalalkan segala cara? Memilih *primus interpares* adalah cara pemilihan yang mempunyai dasar pada sejarah budaya dan politik Tanah Dayak. *Primus interpares* adalah kualitas menyeluruh yang dipilih dan terpilih serta membuka diri untuk kontrol. *Primus interpares* menunjukkan sekaligus mutu pemilu kada dan masyarakat kita. Untuk zaman sekarang memilih yang primus inter pares tentu bukanlah hal yang mudah. Dunia politik kita sudah demikian kompleks dan kotor, tapi paling tidak, primus inter pares bisa jadi patokan memilih yang primus di antara yang ada sebagai bagian dari upaya menata ulang republik ini.

C. KEKUASAAN ERA HINDU-BUDHA DI INDONESIA

Masyarakat Nusantara terkenal sebagai bangsa yang kuat dan pemberani. Mereka mampu berlayar hingga mencapai berbagai kawasan di dunia. Kegiatan pelayaran bukan hanya berlangsung untuk kegiatan mencari ikan, hasil alam, atau penjelajahan semata. Mereka juga melakukan hubungan pedagangan dengan masyarakat asing. Hubungan ini pelayaran dan perdagangan kuno ini sudah berkembang sejak jaman pra-aksara.

Didasari oleh prinsip kebutuhan dan ketersedaan barang hubungan perdagangan berkembang dengan baik. Hal ini diperkuat dengan keuntungan letak Nusantara yang sangat strategis. Kepulauan Nusantara terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Persilangan ini merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Memang pada tahun-tahun sebelum masehi jalur perdagangan tidak lagi melewati

jalur darat (jalur sutera). Kemudian pada awal abad Masehi, jalur perdagangan beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan anatara Cina dan India melewati selat Malaka.

Untuk itu kepulauan Nusantara menjadi bertambah ramai. Selain itu nyatanya Nusantara memiliki hasil alam yang melimpah. Hubungan pelayaran dan perdagangan awal masyarakat Nusantara dengan bangsa luar dapat dibuktikan dari berbagai sumber sejarah dan diruntut dari beberapa anggapan sejarawan yang antara lain:

1. Telah ditemukan adanya nekara perunggu tipe lokal dan buatan luar, seperti tipe nekara perunggu di Sangeang yang merupakan nekara yang mirip dengan tipe buatan luar. Heine Goldern meneliti nekara yang ditemukan dan menyatakan bahwa nekara yang ditemukan di daerah Sangeang diperkirakan dicetak di daerah Funan yang telah terpengaruh oleh budaya India pada 250 SM. Pengamatan menarik dari Berner Kempres menunjukkan bahwa semua nekara yang ditemukan di Bali memliki 4 patung katak pada bagian pukulnya. Hal ini menunjukkan bukti adanya pertukaran barang (dalam hal ini nekara) antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat luar.
2. Hubungan dagang antara Nusantara dan India lebih dulu berkembang dari pada hubungan Nusantara dan Cina. Hal ini seperti disampaikan oleh dua orang sejarawan yaitu J.C. van Leur & O.W. Waolters yang melihat adanya sifat tertutup bangsa Cina terhadap bangsa dan pengaruh asing.
3. Mulai berkembang sistem pelayaran yang lebih maju setelah Hippalos menemukan pelayaran berdasarakan arah mata angin. Hal ini sangat membantu pelayar dan pedagang yang sebelumnya hanya berpatokan pada arus dan perbintangan saja tanpa pengetahuan peta yang jelas.
4. Salah satu bentuk kebudayaan Nusantara yang juga terabadikan dalam relief Candi Borobudur yaitu perahu

bercadik diketahui telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Persebaran itu juga diikuti dengan pesebaran bahasa. Sejarawan H. Kern menyebutkan beberapa daerah yang menjadi wilayah persebaran keduanya yaitu Polonesia, Hawaii, Madagaskar, Benggala, dan India Selatan (Soekmono, 1993: 15).

Melalui hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan bangsa asing muncul berbagai pengaruh bagi kedua pihak. Salah satu bangsa asing yang melakukan hubungan dengan bangsa Nusantara adalah bangsa India. Masyarakat Nusantara mendapat berbagai kebudayaan baru dan kemudian mengadopsi sebagian kebudayaan dari bangsa India. Pengaruh tersebut muncul bukan merupakan hasil dari hubungan yang berlangsung secepat kilat. Dimulai pada awal tahun masehi dan berjalan hingga ratusan tahun lamanya hingga meninggalkan kesan dan pertukaran kebudayaan (Notosusanto, 1998: 311). Pengaruh hubungan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa bidang berikut:

Bidang Agama

Sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India ke Nusantara, masyarakat masih menganut kepercayaan anismisme dan dinamisme. Kepercayaan ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk ke Indonesia. Hingga membentuk periode sejarah di Nusantara yaitu sejarah pada masa Hindu-Budha.

Salah satu periode sejarah yang sangat berpengaruh di Nusantara adalah periode Hindu-Budha. Periode Hindu-Budha dimulai sekitar abad ke-3, dimana pada masa itu masyarakat Nusantara belum mengenal agama dan umumnya masih menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Begitu banyak opini dan teori yang diberikan para ahli-ahli sejarah tentang kedatangan atau bagaimana masuknya agama Hindu-Budha di Nusantara. Dikarenakan periode ini sangat berpengaruh dalam lukisan sejarah untuk Nusantara. Pengaruh yang diberikan pun sangat Beragam di berbagai bidang kehidupan. Dalam pembahasan kali ini, pengaruh yang akan dibahas adalah

bagaimana sistem politik atau birokrasi atau sistem penguasaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha di Nusantara. Jika membahasan tentang proses kedatangan, ada beberapa teori masuknya agama Hindu-Budha di Nusantara, meski masih banyak kontroversi tentang teori ini namun ada kekurangan dan kelebihan dari setiap teori. Berikut beberapa teori atau hipotesis masuknya agama Hindu-Budha:

Hipotesis Waisya

Hipotesis ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu melalui hubungan dagang antara India dan Indonesia. Kaum pedagang (Waisya) India yang berdagang di Indonesia mengikuti angin musim. Apabila angin musim tidak memungkinkan mereka untuk kembali, dalam waktu tertentu mereka menetap di Indonesia. Biasanya selama 6 bulan. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, mereka manfaatkan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha.

Hipotesis Kesatria

Hipotesis kesatria mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia adalah kaum Kesatria atau bangsawan. Menurut hipotesis ini, pada masa lampau di India terjadi peperangan antar kerajaan. Para prajurit yang kalah kemudian mengadakan migrasi ke daerah lain. Tampaknya diantara mereka ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni melalui penaklukan. Mereka menyebarkan budaya dan agama Hindu di Indonesia. Salah seorang pendukung hipotesis ini adalah sejarawan C.C. Berg.

Hipotesis Brahmana

Hipotesis ini diungkap oleh J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya

golongan Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas disini adanya peran Brahmana.

Hipotesis Sudra

Teori ini disampaikan oleh Von Van Faber yang menyebutkan bahwa peperangan yang terjadi di India menyebabkan golongan Sudra menjadi buangan. Mereka kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Waisya. Dengan jumlah yang besar, diduga golongan Sudra yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha ke Indonesia.

Hipotesis Arus Balik

Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch, yaitu banyak orang Indonesia yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan agama tersebut. Teori tersebut juga di dukung dengan pendapat Van Leur, dimana menurutnya orang Indonesia juga memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India.Para pedagang dari Indonesia, datang sendiri ke India karena penasaran dengan kebudayaan tersebut. Mereka menetap di India selama beberapa waktu kemudian pulang kembali dengan membawa kebudayaan India dan menyebarkannya.

Menurut Bosch (dalam Ririn Darini 2016:32), Indonesia berperan dalam proses masuknya pengaruh kebudayaan India ketika terjadinya arus balik biksu dari Indonesia setelah belajar di India. Mereka berperan dalam mengembangkan kebudayaan India di nusantara. Proses masuknya budaya India dimungkinkan dengan adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan proses penyuburan budaya terjadi karena inisiatif dari bangsa Indonesia. Dalam proses tersebut bangsa Indonesia aktif sehingga unsur-unsur budaya India tidak pernah menjadi unsur yang dominan dalam kerangka budaya Indonesia secara keseluruhan.

Jika membicarakan tentang kekuasaan, masyarakat menganut agama Hindu dan Budha dikarenakan penguasa mereka yang memerintah pada saat itu lebih dulu menganut agama Sehingga kedudukan kekuasaan mempengaruhi masyarakat untuk ikut menganut agama

tersebut. Peran penguasa sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana kondisi masyarakat dalam berbagai bidang khususnya bidang bidang kehidupan yang mempengaruhi politik. Proses datangnya Hindu dan Budha yang memiliki cerita yang panjang sehingga menuliskan banyak pengaruh untuk Nusantara. Setelah kedatangan India yang awalnya untuk berdagang namun diikuti dengan penyebaran agama kepercayaan mereka, lama kelamaan berdirilah kerajaan yang bercorak Hindu Budha di nusantara.

1. Kekuasaan di Kerajaan Kutai

Keterlibatan Indonesia dengan dunia luar telah dimulai sejak abad pertama Masehi. Mereka telah mengadakan komunikasi, hubungan dagang, dan diduga juga ada yang menikah dengan orang-orang India. Pernikahan menyebabkan orang-orang India menetap di wilayah Indonesia dan mulailah terjadi perubahan.

Pengaruh datangnya kebudayaan India terutama kebudayaan Hindu menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah sistem pemerintahannya. Kepala pemerintahannya yang semula seorang kepala suku berubah menjadi raja. Bukti yang menunjukkan adanya pengaruh India dalam kelompok masyarakat Kutai adalah penggunaan nama yang berunsurkan India pada salah satu pemimpin mereka dalam salah satu prasasti peninggalannya. Satu-satunya bukti yang dapat digunakan untuk menguak sejarah kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia, adalah ditemukannya 7 buah prasasti yupa yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400M/abad 5M. Yupa adalah tugu batu peringatan dan tempat menambatkan hewan kurban dalam upacara-upacara kurban Hindu. Tulisan di yupa berhuruf Pallawa, berbahasa Sanskerta.

Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Kutai, terdapat salah satu prasasti yang didalamnya tetulis "Sang Maharaja Kundungga yang amat mulia mempunyai putra yang mashur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman (Dewa Matahari) menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra tiga, seperti api (yang suci) tiga. Yang terkemuka dari

ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri (selamatan) emas amat banyak. Buat peringatan kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana."

Dari prasasti tersebut dapat diketahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai. Raja pertama bernama Kundungga yang merupakan nama Indonesia asli. Ia mempunyai seorang anak yang bernama Aswawarman yang dianggap sebagai pendiri dinasti atau pembentuk keluarga (Wamsakerta). Nama anak Kundungga di atas menunjukkan telah masuknya pengaruh Hindu dalam Kerajaan Kutai. Selanjutnya, dapat diketahui pula bahwa Aswawarman itu mempunyai 3 orang putra. Salah seorang di antara putranya itu sangat terkenal, bernama Mulawarman. Kedua nama terakhir menggunakan bahasa Sanskerta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa kerajaan Kutai, mereka telah mengenal sistem pemerintahan. Pemerintahan bukan lagi dipimpin oleh kepala suku, tetapi dipimpin oleh Raja.

Dalam prasasti tersebut juga membuktikan bahwa raja-raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang telah memeluk agama Hindu. Ada banyak raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai ini, namun yang paling memiliki peran pentingyang di tuliskan dalam sejarah diantaranya adalah:

Maharaja Kudungga

Adalah raja pertama di Kerajaan Kutai. Kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku, dengan masuknya pengaruh Hindu maka ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan menjadikan dirinya sebagai raja, dan pergantian kekuasaan dengan keturuanan-keturunannya.

Raja Kudungga merupakan penduduk asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan ajaran Hindu pada zamannya. Oleh karena itu, Raja Kudungga tidak dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan, melainkan anaknya yaitu Raja Aswawarman, karena pada masa pemerintahannya sudah masuk pengaruh agama Hindu dana Raja

Aswawarman menjadi pemeluk Hindu hingga keturunan berikut-berikutnya.

Kondisi keadaan politik pada masa pemerintahan kudungga adalah terpengaruh budaya Hindu dan belum adanya sistem kepemerintahan yang sistematis serta teratur. Hal ini di karenakan pada saat itu di peradaban Kutai Martadipura, menurut prasasti peninggalan sejarah peradapan Kutai Martadipura berada di abad 4 Masehi atau kurang lebih di tahun 350 Masehi dan saat itu Kudungga belum menjabat sebagai seorang Raja akan tetapi hanya sebatas kepala suku dan mendapatkan gelar Maha raja Kudungga Anumerta Dewawarman. Menurut prasasti pula dari seorang Kudungga ini lahirlah pemimpin-pemimpin kerajaan Kutai yang mahsyur, mendapat pengaruh budaya Hindu dari para pedagang India yang dulu bersistem kesukuan menjadi sistem kerajaan, pemimpin Kutai Martadipura yang tercatat dalam prasasti.

Maharaja Aswawarman

Raja Aswawarman adalah putra Raja Kudungga. Raja Aswawarman adalah Raja pertama yang menganut kepercayaan Hindu. Sebelumnya pada masa pemerintahaan Raja Kudungga, kerajaan Kutai menganut kepercayaan animisme.

Raja Aswawarman merupakan pendiri dinasti Kerajaan Kutai, sehingga mendapat gelar Wangsakerta yang artinya sebagai pembentuk keluarga raja. Pemberiaan gelar ini juga disebutkan pada stupa, selain itu stupa itu juga menjelaskan bahwa Raja Aswawarman mendapat sebutan sebagai Dewa Ansuman (Dewa Matahari).

Raja Aswawarman memiliki peranan besar dalam perluasan wilayah kekuasaan kersjaan kutai. Perluasan wilayah diakukan oleh Aswawarman dengan cara melakukan upacara Asmawedha, yaitu upacara pelepasan kuda untuk menentukan batas wilayah kerajaan. Kuda-kuda yang dilepaskan ini akan diikuti oleh prajurit kerajaan yang akan menentukan wilayah kerajaan sesuai dengan sejauh mana jejak telapak kaki kuda dapat ditemukan.

Maharaja Mulawarman

Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Aswawarman yang menjadi penerusnya. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari Kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya. Rakyat-rakyatnya hidup tentram dan sejahtera hingga Raja Mulawarman mengadakan upacara kurban emas yang amat banyak.

Kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air dikenal dengan sebutan Kerajaan Kutai Martapura atau disebut juga dengan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kerajaan yang berdiri sejak abad ke-4 itu melalui berbagai musim dan rintangan dalam mempertahankan kerajaan, tentu saja dilaukannya pergantian raja di interen kerajaan cukup membuat masalah tersendiri.

Selama bertahun-tahun bahkan berabad lamanya masa kejayaan Kutai Martapura mencatat kesuksesan raja-rajanya dalam memimpin kerajaan. Catatan tersebut didapat dari yupa yang masih utuh. Pada yupa yang tersebar tersebut tidak ada yang mencatat secara detail mengenai kelahiran hingga kematian tokoh mereka. Namun, pada yupa tersebut dicatat bagaimana masa kepemimpinan mereka dari awal hingga akhir. Tercatat seorang raja yang cukup terkenal di Kerajaan Kutai Martapura bernama Raja Mulawarman. Nama yang mengandung begitu kental unsur India ini merupakan anak dari Raja Aswawarman serta cucu dari Raja Kudungga yang dikenal sebagai raja pertama dan pendiri Kerajaan Kutai Martapura ini.

Nama Mulawarman cukup dikenal setelah ia menjadi pemimpin di abad ke-4 Masehi. Ia terctat sebagai raja dengan segudang prestasi dan kedermawanannya. Mulawarman adalah raja terkenal dari Kutai, seperti diungkapkan pada salah satu yupa berikut: "Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyur bernama Aswawarman. (Dia) mempunyai tiga orang putra yang seperti api. Yang terkemuka di antara ketiga putranya adalah sang Mulawarman, raja yang besar, yang berbudi baik, kuat, dan kuasa, yang telah upacara

korban emas amat banyak dan untuk memperingati upacara korban itulah tugu ini didirikan."

Mulawarman, menurut yupa tersebut, sering diwujudkan dengan Ansuman, yaitu Dewa Matahari. Raja Mulawarman dikenal sangat dekat dengan rakyatnya. Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan kaum brahmana yang datang ke Kutai. Diceritakan bahwa Mulawarman sangat dermawan. Ia memberikan sedekah berupa minyak dan lampu. Ia juga memberikan hadiah 20.000 lembu kepada brahmana di suatu tempat yang disebut Waprakeswara (tempat suci untuk memuja Dewa Siwa).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mulawarman menganut Hindu-Siwa. Dari besarnya sedekah raja Mulawarman ini memperlihatkan keadaan masyarakat Kutai yang sangat makmur. Kemakmuran ini didukung oleh peranan yang besar Kutai dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena letak Kutai yang strategis, yaitu berada dalam jalur perdagangan utama Cina-India. Masa keemasan Kuatai Martapura di tangan Mulawarman mencangkup daerah kekuasaan yang terus meluas hingga menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur juga sekitarnya. Dari luasnya kerajaan yang didapat Mulawarman, tak satu pun rakyatnya yang tidak merasakan kemakmuran. Kemakmuran ini dirasakan rakyat Kutai hingga raja selanjutnya. Tidak diketahui pasti kapan masa berakhirnya kepemimpinan Mulawarman. Namun, kejayaan yang diraihnya membawa kebaikan bagi raja dan rakyat setelahnya hingga masuknya pengaruh Islam dan kehadiran VOC Belanda.

Kemudian raja-raja selanjutnya yaitu Maharaja Irwansyah, Maharaja Sri Aswawarman, Maharaja Marawijaya Warman, Maharaja Gajayana Warman, Maharaja Tungga Warman, Maharaja Jayanaga Warman, Maharaja Nalasinga Warman, Maharaja Nala Parana Tungga, Maharaja Gadingga Warman Dewa, Maharaja Indra Warman Dewa, Maharaja Sangga Warman Dewa, Maharaja Singsingamangaraja XXI, Maharaja Candrawarman, Maharaja Prabu Nefi Suriagus, Maharaja Ahmad Ridho Darmawan, Maharaja Riski Subhana, Maharaja Sri Langka Dewa, Maharaja Guna Parana Dewa, Maharaja Wijaya Warman,

Maharaja Indra Mulya, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putera, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia.

Raja raja kerajaan kutai diatas merupakan seseorang yang berperan dalam kehidupan rakyar, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan letaknya, kerajaan kutai dijadikan sebagai jalur perdagangan dan pelayaran dari arah Barat maupun Timur. Perdagangan inilah yang menjadi mata pencaharian utama bagi rakyat kerajaan Kutai. Rakyat kerajaan Kutai juga ikut berperan aktif dalam perdagangan Internasional dan melakukan perdagangan ke perairan Indonesia Timur dan Jawa. Para rakyat Kutai memeluk agama Siwa yang dibuktikan dengan prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut terdapat tempat bernama Wapakeswara yaitu tempat pemujaan Dewa Siwa.

Di dalam sejarah disebutkan bahwa Kerajaan Kutai runtuh saat raja Kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi Kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara.

Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini (Kutai Martadipura) berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibukota di Kutai Lama (Tanjung Kute). Kutai Kartanegara inilah, di tahun 1365, yang disebutkan dalam sastra Jawa Negarakertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735 kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar Pangeran berubah menjadi bergelar Sultan (Sultan Aji Muhammad Idris) dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara.

2. Kekuasaan di Kerajaan Sriwijaya

Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang cukup besar, karena wilayah ini dilalui oleh perdagangan internasional. Dalam sistem pemerintahan Sriwijaya menerapkan aturan-aturan yang tidak

menghendaki kebebasan bertindak yang terlalu besar bagi para penguasa daerahnya, dengan memunculkan kutukan dan sumpah yang tertuang di dalam prasastinya.

Adapun prasasti yang ditemukan mengenai kerajaan Sriwijaya antara lain yaitu:

a. Prasasti tertua yang ditemukan terdapat di daerah Kedudukan Bukit dekat palembang, angka tahunnya 604 S atau 682 M.
b. Prasasti Talang Tuo dari sebelah barat kota Palembang sekarang, prasasti ini terdiri dari 14 baris berangka tahun 606 S. Isinya tentang perintah dari Dapunta hyang Sri Jayanasa untuk membuat taman Sri Ksetra yang berisi segala macam tumbuhan dan buah-buahan buat kemakmuran semua makhluk (Poerbatjaraka, 1952 : 35-38).
c. Prasasti Telaga Batu dekat Palembang, prasasti ini dihiasi dengan tujuh kepala ular kobra berbentuk pipih dengan mahkota berbentuk permata bulat, leher yang mengembang dengan hiasan kalung, prasasti ini berisi 28 baris dalam kondisi aus dan beberapa huruf tidak terbaca.
d. Di Pulau Bangka bagian barat, prasasti ini mungkin dibawa dari luar pulau karena melihat jenis batu yang diipakai tidak dijumpai di pulau bangka. Jumlah barisnya 10 baris dan berangka tahun 608 S.

Prasasti yang memuat mengenai kutukan bagi siapa saja termasuk raja-raja yang melakukan kejahatan dan rakyat biasa yang tidak mematuhi perintah raja ada di dalam prasasti Telaga Batu.

Menurut de Casparis, dengan berpatokan pada prasasti Telaga Batu, kedatuan Sriwijaya dapat dibagi menjadi beberapa mandala (semacam provinsi) dan setiap mandala dikuasai oleh seorang datu (Casparis, 1986: 18). Sesorang yang menjadi datu juga harus dari kalangan putra raja atau bangsawan, dibawah datu ada seorang pembesar yang

bergelar parvvanda yang bertugas sebagai ketua hulubalang dan bertanggung jawab dalam hal ketentaraan (Utomo, 2006: 152).

Berkenaan dengan struktur birokrasinya hanya dapat dilihat melalui sumber prasasti Telaga Batu. Kepala pemerintahannya adalah seorang raja, yang dalam istilah kerajaan Sriwijaya disebut sebagai Dapunta Hyang. Di bawah Dapunta Hyang berkuasa mentri dan pegawai tinggi di bawah martabat mentri yang dinamai Parvvanda. Diduga struktur tersebut adalah sebagai berikut (Yamin, 1958:31):

1. Dapunta hyang.
2. Yuwara, Pratiyuwaraja, raja kumara.
3. Samwarddhi (Pengangkatan menjadi datu atau pegawai tinggi).
4. Rajaputra, samantaraja (pegawai lain, baik yang dipusat atau di daerah).
5. Senapati, nayaka, pratyaya, hajipratyaya, dandanoyaka/hakim, murdaka (pegawai pelaksana hakim dan panglima perang).
6. Kumaramatya, cathachata, adhikarana (martabat menteri/amatya).
7. Koyastha, sthapaka/arsitek, puhawam, vaniyoga, pratisara, marsi haji, hulun haji (pegawai teknik).

Berdasarkan beberapa Prasasti yang ditemukan hampir keseluruhan prasasti bercerita mengenai kutukan atau sumpah yang akan diberikan bagi raja dan rakyat yang melakukan kejahatan. Di dalam prasasti diceritakan bahwa jika raja berlaku tidak setia, berbuat onar, bersepakat dengan orang jahat dan melindungi orang jahat maka akan dimakan oleh sumpah. Begitu juga bagi rakyat yang tidak setia maka akan dibunnuh oleh sumpah.

Kerajaan Sriwijaya yang merupakan sebuah negara maritim yang bertumpu pada sektor perdagangan telah mengembangka suatu diplomasi sehingga kerajaan tersebut menjadi lebih metropolitan sifatnya. Untuk dapat mempertahankan eksistensinya kerajaan Sriwijaya sangat sadar akan pentingnnya kekuatan militer. Kerajaan

Sriwijaya juga menjamin keselamatan pedagang yang menggunakan jalur-jalur perdagangan menuju Sriwijaya sehingga pedagang lebih merasa aman dan nyaman melewati jalur tersebut sehingga otomatis jalur tersebut ramai dilalui para pedagang asing.

Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan mahsyur dan dianggap sebagai pusat agama Buddha, hal ini ditulis dalam karya-karya I-tsing yang ditulisnya di Sumatera pada tahun 689 dan 692. Kemasyuhuran Sriwijaya sebagai pusat pengajaran agama Buddha tentu bukan hasil suatu perkembangan dalam waktu yang singkat. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung agama Buddha dan penganut yang taat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan agama Buddha yang sampai meluas ke luar negeri.

3. Kekuasaan di Kerajaan Tarumanegara

Tarumanegara dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai salah satu kerajaan yang didirikan oleh bangsa Sunda. Kerajaan ini juga digolongkan kedalam kerajaan-kerajaan tertua yang pernah berdiri di Indonesia. Adanya pandangan tersebut didasarkan pada penemuan-penemuan sumber sejarah baik prasasti maupun naskah kuno.

Berdirinya Kerajaan Tarumanagara masih dipertanyakan oleh para ahli sejarah. Satu-satunya sumber sejarah yang secara lengkap membahas mengenai Kerajaan Tarumanagara adalah Naskah Wangsakerta. Naskah Wangsakerta tersebut masih menjadi perdebatan diantara para sejarawan tentang keaslian isinya. Menurut Naskah Wangsakerta, pada abad ke-4 Masehi, pulau dan beberapa wilayah Nusantara lainnya didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadinya peperangan besar di sana. Para pengungsi itu umumnya berasal dari daerah Kerajaan Palawa dan Calankayana di India, pihak yang kalah dalam peperangan melawan Kerajaan Samudragupta (India).

Salah satu dari rombongan pengungsi Calankayana dipimpin oleh seorang Maharesi yang bernama Jayasingawarman. Setelah mendapatkan persetujuan dari raja yang berkuasa di barat Jawa (Dewawarman VIII, raja Salakanagara), maka Jayasingawarman membuka tempat pemukiman baru di dekat sungai Citarum.

Pemukimannya oleh Jayasingawarman diberi nama Tarumadesya (desa Taruma).

Sepuluh tahun kemudian desa ini banyak didatangi oleh penduduk dari desa lain, sehingga Tarumadesya menjadi besar. Akhirnya dari wilayah setingkat desa berkembang menjadi setingkat kota (Nagara). Semakin hari, kota ini semakin menunjukan perkembangan yang pesat, karena itulah Jayasingawarman kemudian membentuk sebuah Kerajaan yang bernama Tarumanagara.

Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti tugu yang menyatakan bahwa Raja Purnawarmantelah memerintahkan untuk menggali sebuah kali (Sejarah Daerah Jawa Barat, 1979:45). Penggalian sebuah kali ini sangat besar artinya, karena pembuatan kali ini berarti pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Dengan upaya itu, Raja Purnawarman dipandangsebagai raja besar yang memperhatikan kehidupan rakyatnya. Penjelasan tentang Tarumanagara cukup jelas di Naskah Wangsakerta.

Pada Naskah Wangsakerta dari Cirebonitu, Tarumanegara didirikan oleh Raja dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358, yang kemudian digantikan oleh putranya, Dharmayawarman (382-395). Jayasingawarman dipusarakan di tepi kali Gomati, sedangkan putranya di tepi kali Candrabaga. Maharaja Purnawarman adalah raja Tarumanagara yang ketiga (395-434 M). Iamembangun ibukota kerajaan baru pada tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai. Dinamainya kota itu Sundapura–pertama kalinya nama "Sunda" digunakan.

Prasasti Pasir Muara yang menyebutkan peristiwa pengembalian pemerintahan kepada Raja Sunda itu dibuat tahun 536 M. Dalam tahun tersebut yang menjadi penguasa Tarumanagara adalah Suryawarman (535-561 M) Raja Tarumanagara ke-7. Pemerintahan Candrawarman (515-535 M), ayah Suryawarman, banyak penguasa daerah yang menerima kembali kekuasaan pemerintahan atas daerahnya sebagai hadiah atas kesetiaannya terhadap Tarumanagara. Ditinjau dari segi ini, maka Suryawarman melakukan hal yang sama.

Baik sumber-sumber prasasti maupun sumber-sumber Cirebon memberikan keterangan bahwa Purnawarman berhasil menundukkan musuh-musuhnya. Prasasti Munjuldi Pandeglang menunjukkan bahwa wilayah kekuasaannya mencakup pula pantai Selat Sunda. Kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Salakanagaraatau Rajatapura (di daerah Teluk Lada Pandeglang) sampai ke Purwalingga (sekarang Purbolinggo) di Jawa Tengah. Secara tradisional Cipamali (Kali Brebes) memang dianggap batas kekuasaan raja-raja penguasa Jawa Barat pada masa silam di Tarumanegara hanyalah raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti tugu yang menyatakan raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Penggalian sebuah kali ini sangat besar artinya, karena pembuatan kali ini merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan.

Kehadiran Prasasti Purnawarman di Pasir Muara, yang memberitakan Raja Sunda dalam tahun 536 M, merupakan gejala bahwa Ibu kota Sundapura telah berubah status menjadi sebuah kerajaan daerah. Hal ini berarti, pusat pemerintahan Tarumanagara telah bergeser ke tempat lain. Contoh serupa dapat dilihat dari kedudukaan Rajatapura atau Salakanagara (kota Perak. Kota ini sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan Raja-raja Dewawarman (dari Dewawarman I-VIII). Prasasti tugu prasasti merupakan prasati yang terpanjang dan terpenting dari raja Purnawarman. Ketika pusat pemerintahan beralih dari Rajatapura ke Tarumangara, maka Salakanagara berubah status menjadi kerajaan daerah. Jayasingawarman pendiri Tarumanagara adalah menantu Raja Dewawarman VIII. Ia sendiri seorang Maharesi dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magada.

Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak kepada raja daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah bagian timur. Dalam tahun 526 M, misalnya, Manikmaya, menantu Suryawarman, mendirikan kerajaan baru di Kendan, daerah Nagreg antara Bandung dan Limbangan, Garut. Masa

keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi setelah kerajaan ini dipimpin oleh raja generasi ke-13 yang bernama Raja Tarusbawa. Runtuhnya kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya di hilir sungai Gomati.

Selain itu, gempuran beberapa kerajaan lain di nusantara pada masa itu terutama Kerajaan Majapahit memegang andil penting dalam keruntuhan Kerajaan Tarumanegara pada masa itu. Pada masa pemerintahan Sudawarman, Kerajaan Tarumanegara sudah mulai terlihat mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Tarumanegara tersebut, diantaranya adalah memberikan ekonomi pada raja-raja di bawah Kerajaan Tarumanegara yang di berikan kepada raja sebelumnya. Sudawarman secara emosional tidak menguasai persoalan di Kerajaan Tarumanegara, beliau dari kecil tinggal di kanci, wilayah pallawa, sehingga hal tersebut menyebabkan beliau tidak begitu perduli pada masalah yang menimpa di kerajaan tersebut. Diatas merupakan penjelasan singkat dari Kerajaan Tarumanegara, mulai dari silsilah, peninggalan, letak, agama, kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya hingga runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat.

Raja ke-12 Tarumanagara, Linggawarman, memiliki dua orang putri. Putri pertamanya bernama Dewi Manasih yang kemudian menikah dengan Tarusbawa dan Sobakencana yang kemudian menjadi isteri Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Tangku kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara pun jatuh pada suami Manasih yaitu Tarusbawa. Pada masa kepemerintahan Tarusbawa, pusat kerajaan Tarumanagara ke kerajaanya sendiri yaitu Kerajaan Sunda (Kerajaan bawahan Tarumanagara) dan kemudian mengganti Kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda.

4. Kekuasaan di Kerajaan Mataram Kuno

Pusat kerajaan Mataram Kuno terletak di Lembah sungai Progo, meliputi daratan Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Kerajaan mataram kuno dipimpin pertama kali oleh Raja Sanjaya yang

terkenal sebagai seorang raja yang besar, gagah berani dan bijaksana serta sangat toleran terhadap agama lain. Ia adalah penganut Hindu Syiwa yang taat.

Setelah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya meninggal dunia, beliau kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sankhara yang bergelar Rakai Panangkaran Dyah Sonkhara Sri Sanggramadhanjaya. Raja Panangkaran lebih progresif dan bijaksana daripada Sanjaya sehingga Mataram Kuno lebih cepat berkembang. Daerah-daerah sekitar Mataram Kuno segera ditaklukkan, seperti kerajaan Galuh di Jawa Barat dan Kerajaan Melayu di Semenanjung Malaya. Ketika Rakai Panunggalan berkuasa, kerajaan Mataram Kuno mulai mengadakan pembangunan beberapa candi megah seperti candi Kalasan, candi Sewu, candi Sari, candi Pawon, candi Mendut, dan Candi Borobudur. Kemudian setelah Rakai Panunggalan meninggal, beliau digantikan oleh Rakai Warak. Pada zaman pemerintahan Rakai Warak, ia lebih mengutamakan agama Buddha dan Hindu sehingga pada saat itu banyak masyarakat yang mengenal agama tersebut. Setelah Rakai Warak meninggal kemudian digantikan oleh Rakai Garung.

Pada masa pemerintahan Rakai garung pembangunan kompleks candi dilanjutkan di Jawa Tengah bagian utara terutama di sekitar pegunungan Dieng. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kompleks bangunan candi Hindu di dataran tinggi Dieng, seperti candi Semar, candi Srikandi, candi Punta dewa, candi Arjuna dan candi Sembadra. Selain itu di bangun pula kompleks candi Gedong Sanga yang terletak di sebelah kota Semarang sekarang. Setelah Rakai Garung meninggal ia digantikan oleh Rakai Pikatan. Berkat kecakapan dan keuletan Rakai Pikatan, semangat kebudayaan Hindu dapat dihidupkan kembali. Kekuasaannya pun bertambah luas meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur serta ia pun memulai pembangunan candi Hindu yang lebih besar dan indah yaitu candi Prambanan (Candi Lara Jonggrang) di desa Prambanan.

Setelah Raja Pikatan wafat ia digantikan oleh Rakai Kayuwangi. Pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi Kerajaan banyak menghadapi masalah dan berbagai persoalan yang rumit sehingga timbullah benih

perpecahan di antara keluarga kerajaan. Selain itu zaman keemasan Mataram Kuno mulai memudar serta banyak terjadi perang saudara.

Saat Rakai Kayuwangi meninggal ia digantikan oleh Rakai Watuhumalang. Rakai Watuhumalang berhasil melanjutkan pembangunan Candi Prambanan. Kemudian setelah Rakai Watuhumalang meninggal ia digatikan oleh Rakai Watukura Dyah Balitung. Pada masa pemerintahan Rakai Dyah Balitung dikenal 3 jabatan penting, yaitu rakryan i hino (pejabat tinggi sesudah raja), rarkyan i halu dan rarkyan i sirikan. Ketiganya merupakan tritunggal. Dyah Balitung memerintah sampai tahun 910 M dan meninggalkan banyak prasasti (20 buah).

Ada prasasti yang menyebutkan bahwa Raja Balitung pernah menyerang Bantan (Bali). Setelah Rakai Watukura Dyah Balitung wafat ia digantikan oleh Daksa dengan gelar Sri Maharaja Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya. Sebelumnya ia menjabat sebagai rakryan. Ia memerintah dari tahun 913-919 M. Pada masa pemerintahan Raja Daksa inilah pembangunan Candi Prambanan berhasil diselesaikan.

Bahwa perpindahan Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dilalukan sekitar perempat pertama abad X. Timbul berbagai teori kemungkinan alasan perpindahan Istana Kerajaan Mataram ke Jawa Timur. Menurut N.J. Krom perpindahan pusat kerajaan tersebut terjadi pada kurun perempat awal abad X, dengan alasan yang tidak begitu jelas. Sementara menurut B. Schrieke, yang menjadi penyebab kenapa pusat pemerintahan pindah ke Jawa Timur adalah karena pembangunan Candi Borobudur yang menghabiskan seluruh kejayaan kerajaan waktu itu yang sedang jaya-jayanya. Pembangunan Candi Borobudur yang menyita banyak tenaga dari rakyat Mataram dan meninggalkan pekerjaan seperti pertain, berdagang dan aktivitas yang lainya sehingga terjadilah migrasi missal ke Jawa Timur.

Mataram di Jawa Timur

Pusat pemerintahan dinasti ini terletak di Watuguluh, antara gunung Sumeru dan gunung Wilis.Empu sindok beragama Hindu syiwa. Jadi, kerajaan mpu Sindok termasuk kerajaan yang bercorak Hindu. Namun, pada saat itu agama Budha Tantrayana juga berkembang baik. Hal itu

membuktikan adanya toleransi agama sejak dahulu. Pada zamannya disusun sebuah kitab suci agama Budha Tantrayana yang berjudul Sang Hyang Kamahayanikan.

Dari sumber 23 prasasti Mpu Sindok dapat diketahui struktur pemerintahan kerajaan Mataram setelah pusatnya dipindahkan ke Jawa Timur, pada awalnya masih mengikuti struktur pemerintahan sebelumnya. Hal ini disebabkan Mpu Sindok pernah menjadi pejabat tinggi pada masa pemerintahan raja Rakai Layang Dyah Tulodhong dan raja Rakai Sumba Dyah Wawa. Demikian juga dengan sejumlah pejabat pada masa pemerintahan raja Wawa tetap dipakai sebagai pembantunya.

Dalam perkembangannya kemudian dilakukan perubahan, terutama pada pejabat yang menerima dan yang melaksanakan perintah raja, Serta pejabatan yang masuk dalam dewan penasehat raja. Sementara itu struktur perwilayahan juga mengalami perubahan.

Jika pada masa pemerintahan Raja Wawa, wilayah dibagi menjadi wilayah pusat pemerintahan di mana raja dan para pejabat tinggi kerajaan tuggal, dikenal dengan sebutan *wanna i jro turns* (wilayah di dalam tembok/benteng/pagar). Wilayah ini dibatasi dengan wilayah wanna yang ada di empat penjuru mata angin. Kemudian ada wilayah watak dengan para Rakai (bangsawan keluarga raja) sebagai penguasanya. Wilayah warak ini tidak selalu sama luasnya. Ada wilayah walak yang membawahi 4 wanna (desa), tetapi ada juga yang membawahi lebih dari 12 wanna.

Berdasarkan prasasti-prasasti yang didapatkan kembali pada Mpu Sindok hingga Airlangga, dapat diketahui bagaimana Keadaan sosial masyarakat pada waktu itu. Waktu Mpu Sindok Memindahkan istananya di Jawa Timur. Hampir tidak berbeda denganmasyarakat Jawa kuno pada masa Kerajaan Mataran kuno Jawa tengah, pola kehidupan masyarakat tampaknya terbagi menjadi dua, masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat Kota adalah mereka-mereka yang hidup di istana atau di sekitar Istana raja. Sedangkan masyarakat desa adalah mereka-mereka yang jauh dari istana. Mereka hidup di satu wilayah yang disebut wanua, Yang di atur oleh pejabat wanua, yaitu Rama. Pendudukdesa (disebut anak wanua pada masa Mpu Sindok,

disebut anak thani Pada masa Airlangga) hidup dari pola agraris yang ditunjang oleh macam-macam keahlian. Dalam prasasti disebut nama-nama pekerjaan mereka seperti petani, pengrajin, dan pedagang, atau sebagai apa saja yang menjadi mata pencahariannya.

5. Kekuasaan di Kerajaan Kediri (Panjalu)

Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Kuno. Keadaan politik pemerintahan dan keadaan masyarakat di Kediri ini dicatat dalam berita dari Cina, yaitu dalam kitab Ling-Wai-tai-ta yang ditulis oleh Chou K'u-fei pada tahun 1178 dan pada kitab *Chu-fan-chi* yang disusun oleh Chaujukua pada tahun 1225. Kitab itu melukiskan keadaan pemerintahan dan masyarakat zaman Kediri. Kitab itu menggambarkan masa pemerintahan Kediri termasuk stabil dan pergantian tahta berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara.

Raja pertama Kediri bernama Samarawijaya yang menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Selama menjadi raja Kediri, Samarawijaya selalu berselisih paham dengan saudaranya, Mapanji garasakan yang berkuasa di Jenggala. Keduanya merasa berhak atas seluruh tahta Raja Airlangga, ayahanda mereka berdua (Kerajaan Medang kamulan) yang meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Timur dan sebagian jaw Tengah. Akhirnya perselisihan tersebut menimbulkan perang saudara yang berlangsung hingga tahun 1052. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Samarawijaya dan berhasil menaklukan Jenggala.

Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Saat itu wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Selama menjadi raja Kediri, Jayabaya berhasil kembali menaklukan jenggala yang sempat memberontak ingin memisahkan diri dari Kediri. Keberhasilan tersebut diberitakan dalam prasasti hantang yang berangka tahun 1135. Prasasti ini memuat tulisan yang berbunyi Panjalu Jayati yang artinya Panjalu menang. Prasasti tersebut dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugrah dari Jayabay untuk penduduk Desa Hantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala.

Pada masa pemerintahannya kesusastraan diperhatikan. Mpu Sedah dan Mpu Panuluh menggubah karya sastra kitab Bharatayudha yang menggambarkan peperangan antara Pandawa dan Kurawa yang untuk menggambarkan peperangan antara jenggala dengan Kediri. Jayabaya juga terkenal sebagai Pujangga yang ahli meramal kejadian masa depan, terutama yang akan menimpa tanah Jawa. Ramalannya terkenal dengan istilah "Jangka Jayabaya".

Sebagai kemenangan atas jenggala, nama Jayabaya diabadikan dalam kitab Bharatayuda. Kitab ini merupakan kitab yang digubah oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh.Bharatayuda memuat kisah perang perebutan takhta Hastinapura antara keluarga Phandawa dan Kurawa.Sejarah partikaian anatar panjalu dan Jenggala mirip dengan kisah tersebut sehinggah kitab Bharatayuda dianggap sebagai legimitasi (klaim) Jayabaya untuk memperkuat kekuasaannya atas seluruh wilayah bekas Kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, untuk menunjukkan kebesaran dan kewibawaan sebagai Raja Kediri, Jayabaya menyatan dirinya sebagai keturunan Airlangga dan titisan Dewa Wisnu.Selanjutnya ia mengenakan lencana narasinga sebagai lambang kerajaan kediri.

Pada awal pemerintahan Jayabaya, kekacauan dikerajaan masih berlangsung. Pada tahun 1135 M, jayabaya berhasil memadamkan kekacauan tersebut. Sebagai bukti, adanya kata- kata Panjalu Jayati pada prasasti Hantang. Setelah kerajaan stabil, jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Mata pencaharian paling penting adalah pertanian dengan hasil uatama padi. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh Angkatan Laut Kediri yang cukup tangguh. Di Kediri telah ada Senopati Sarwajala (Panglima angkatan Laut). Barang perdagangan di Kediri antara lain emas, perak, gading, kayu, cendana, dan pinang. Kesadaran rakyat mengenai pajak juga cukup tinggi. Rakyat menyerahkan barang atau sebagian hasil buminya kepada pemerintah.

Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahaan Raja Kertajaya, dimana terjadi pertentangan antara raja dengan Kaum Brahmana. Raja Kertajaya dianggap melanggar agama dengan memaksakan mereka menyembah kepadanya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta pertolongan kepada Ken Arok, pemimpin daerah Tumapel yang ingin

memisahkan diri dari Kediri. Kemudian terjadilah perang antara rakyat Tumapel yang dipimpin Ken Arok dengan Kerajaan Kediri. Akhirnya pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan Kerajaan Kediri menjadi wilayah bawahan Tumapel atau Singhasari.

Sebagai pemimpin di Kerajaan Singhasari, Ken Arok mengangkat Jayasabha (putra Kertajaya) sebagai bupati Kediri. Jayasabha digantikan oleh putranya Sastrajaya pada tahun 1258. Kemudian Sastrajaya digantikan putranya Jayakatwang (1271). Jayakatwang berusaha ingin membangun kembali Kerajaan Kediri dengan memberontak Kerajaan Singhasari yang dipimpin Kertanegara. Terbunuhlah Raja Kertanegara dan Kediri berhasil dibangun oleh Jayakatwang.

6. Kekuasaan di Kerajaan Singasari

Pendiri Kerajaan Singasari ialah Ken Arok yang menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni Dinasti Rajasa (Rajasawangsa) atau Girindra (Girindrawangsa). Ken Arok hanya memerintah selama lima tahun (1222–1227). Pada tahun 1227 Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati (anak tiri Ken Arok). Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa– Buddha.

Dengan meninggalnya Ken Arok maka takhta Kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Dalam jangka waktu pemerintahaannya yang lama, Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyabung ayam.

Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga ke Tohjoyo (putra Ken Arok dengan Ken Umang). Tohjoyo mengetahui bahwa Anusapati gemar menyabung ayam sehingga diundangnya Anusapati ke Gedong Jiwa (tempat kediamanan Tohjoyo) untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat Anusapati asyik menyaksikan aduan ayamnya, secara tiba-tiba Tohjoyo menyabut keris buatan Empu Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk

Anusapati. Dengan demikian, meninggallah Anusapati yang didharmakan di Candi Kidal.

Dengan meninggalnya Anusapati maka takhta Kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Namun, Tohjoyo memerintah Kerajaan Singasari tidak lama sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjoyo dan kemudian menduduki singgasana.

Pada tahun 1248 M Ranggawuni dinobatkan menjadi raja dengan bergelar Sri Jayawisnuwardhana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala Kalana Kulama Dhumardana Kamaleksana (menurut prasasti Maribong 1248). Dalam menjalankan pemerintahannya dia dibantu oleh Mahisa Campaka. Hal ini merupakan penerapan dari adanya struktur birokrasi pemerintahan yang mana para kerabat kerajaan memegang jabatan tinggi pemerintahan baik dipusat maupun di daerah. Raja Wisnuwardhana mengangkat Mahisa Campaka sebagai Ratu Angabhaya dengan gelar Narasinghamurti. Pengadaan jabatan Ratu Angabhaya sengaja dilakukan oleh raja Wisnuwardhana. Fungsi dari Ratu Angabhaya, adalah sebagai peniadaan bahaya. Hal ini didasari dari adanya keinginan raja Wisnuwardhana untuk mempersatukan kerajaan Kediri dan Tumapel. Dalam proses pemersatuan kedua kerajaan yang terpisah ini, maka dilakukan beberapa upaya. Adapun upaya yang dilakukan tidak hanya dibidang politik, namun juga di bidang religi keagamaan. Pada bidang politik dengan mengadakan jabatan Ratu Angabhaya beserta pengurus-pengurus pemerintahan kerajaan.

Salah satu cara yang ditempuh oleh kedua pemimpin yang diprakarsai oleh Ken Dedes yaitu menyatukan kedua keturunan dari satu ibu yang berbeda ayah. Bisa dikatakan dengan pernikahan politik, yakni dengan menikahkan dua cucu keturunannya. Adapun cucu dari Ken Dedes adalah Ranggawuni (putra dari Anusapati) dan Waning Hyun (putri dari Mahisa Wonga Teleng). Pada tahun 1254 Wisnuwardhana meresmikan Singasari sebagai ibukota kerajaan Tumapel, yang sebelumnya nama ibukotanya adalah Kutaraja. Namun seiring berjalannya waktu nama kerajaan Singasari lebih terkenal

dibandingkan dengan nama kerajaan Tumapel. Pada tahun yang sama Raja Wisnuwardhana menobatkan puteranya Sri Kertanegara sebagai Yuwaraja.

Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik takhta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh tiga orang mahamentri, yaitu **mahamentri i hino**, **mahamentri i halu**, dan **mahamenteri i sirikan**. Untuk dapat mewujudkan gagasan penyatuan Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan yang baru, seperti Patih Raganata digantikan oleh Patih Aragani. Banyak Wide dijadikan Bupati di Sumenep (Madura) dengan gelar Aria Wiaraja.

Setelah Jawa dapat diselesaikan, kemudian perhatian ditujukan ke daerah lain. Kertanegara mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu 1275 yang berhasil menguasai Kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan mengirimkan patung Amogapasa ke Dharmasraya atas perintah raja Kertanegara. Tujuannya untuk menguasai Selat Malaka. Selain itu juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura (Kalimantan Barat) dan Gurun (Maluku). Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan raja Champa, dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kublai Khan dari Dinasti Mongol. Kublai Khan menuntut raja-raja di daerah selatan termasuk Indonesia mengakuinya sebagai yang dipertuan. Kertanegara menolak dengan melukai utusannya yang bernama Mengki. Tindakan Kertanegara ini membuat Kublai Khan marah besar dan bermaksud menghukumnya dengan mengirikan pasukannya ke Jawa.

Mengetahui sebagian besar pasukan Singasari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol, maka Jayakatwang menggunakan kesempatan untuk menyerangnya. Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya - Raja terakhir Kerajaan Kediri. Serangan dilancarakan oleh Jayakatwang dari dua arah, yakni dari arah utara merupakan pasukan pancingan dan dari arah selatan merupakan pasukan inti. Pasukan Kediri dari arah selatan dipimpin langsung oleh Jayakatwang dan berhasil masuk istana dan menemukan Kertanagera berpesta pora

dengan para pembesar istana. Kertanagera beserta pembesar-pembesar istana tewas dalam serangan tersebut. Raden Wijaya (menantu Kertanegara) berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura dengan maksud minta perlindungan dan bantuan kepada Aria Wiraraja (Buapati Sumenep). Atas bantuan Aria Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dan mengabdi kepada Jayakatwang serta diberikan sebidang tanah yang bernama Tanah Terik yang nantinya menjadi asal usul Kerajaan Majapahit.

Dengan gugurnya Kertanegara pada tahun 1292, Kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Ini berarti berakhirlah kekuasan Kerajaan Singasari. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara kemudian didharmakan sebagai Siwa-Buddha (Bairawa) di Candi Singasari. Sedangkan arca perwujudannya dikenal dengan nama Joko Dolog, yang sekarang berada di Taman Simpang, Surabaya.

Masa kegemilangan Kerajaan Singasari pada era kepemimpinan Kertanegara, ternyata menjadi akhir eksistensi dari Singasari. Kehancuran Singasari berasal dari pemberontakkan yang dilakukan oleh Jayakatwang. Pada awalnya, Jayakatwang dianggap tidak akan menghianati kekuasaan Kertanegara, karena sudah dilakukan pernikahan diantara putra-putri mereka. Raja Kertanegara telah mengambil langkah untuk menjaga hubungan politik yang baik dengan Jayakatwang, yaitu dengan jalan mengambil anaknya yang bernama Arddharaja sebagai menantunya. Alasan dari pemberontakan yang dilancarkan oleh Jayakatwang yaitu motif balas dendam, karena keturunan Singasari sudah menghabisi Kertajaya sebagai nenek moyang dari Jayakatwang.

Ketika melaksanakan perlawanan kepada Kertanegara, Jayakatwang dibantu oleh Kebo Mundarang dan Arya Wiraraja yang merupakan Adipati Sumenep. Serangan Jayakatwang dilancarkan antara pertengahan bulan Mei dan Pertengahan bulan Juni 1292 M. Serangan yang dipimpin oleh Jayakatwang sendiri dibagi menjadi dua wilayah. Pertama dari utara kerajaan yang berfungsi sekedar menyebarkan ketakutan dikalangan Singasari. Kedua yaitu menyerang dari arah selatan, yang pasukannya berjumlah lebih banyak dari pasukan utara. Pasukan Singasari berhasil dipukul mundur, sehingga pasukan

Jayakatwang berhasil memasuki kawasan Istana dari arah selatan. Pada saat pasukan Jayakatwang masuk istana, Kertanegara dan para pembesar istana sedang mengadakan upacara keagamaan dari aliran Tantrayana. Perlawanan tetap dilakukan oleh Kertanegara, meskipun akhirnya dia gugur dalam pertempuran tersebut. Para pengikut Kertanegara juga tewas dan berakhir tragis. Kematian tragis tersebut menjadikan akhir dari eksistensi Kerajaan Singasari di Nusantara. Atas kematiannya, Raja Kertanegara kemudian dicandikan di Singasari.

7. Kekuasaan di Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Budha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negarakertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, sementara wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan.

Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal lahir kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 M tahun yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293 M. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana.

Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Sebagai seorang raja yang besar, Raden Wijaya memperistri empat putri Kertanegara sebagai permaisurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang bernama Jayanegara, sedangkan dari Gayatri, Raden Wijaya mempunyai dua orang putri, yaitu Tribuanatunggadewi dan Rajadewi Maharajasa.

Para pengikut Raden Wijaya yang setia dan berjasa dalam mendirikan kerajaan Majapahit, diberi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Tetapi ada saja yang tidak puas dengan kedudukan yang diperolehnya. Hal ini menimbulkan pemberontakan di sana-sini. Pemberontakan pertama terjadi pada tahun 1295 yang dilakukan oleh Rangga Lawe (Parangga Lawe) Bupati Tuban. Rangga Lawe memberontak karena tidak puas terhadap kebijaksanaan Kertarajasa

yang dirasa kurang adil. Kedudukan Patih Majapahit seharusnya diberikan kepadanya. Namun, oleh Kertarajasa kedudukan itu telah diberikan kepada Nambi (anak Wiraraja). Pemberontakan Rangga Lawe dapat ditumpas dan ia tewas oleh Kebo Anabrang. Lembu Sora, sahabat Rangga Lawe, karena tidak tahan melihat kematiannya, kemudian membunuh Kebo Anabrang. Peristiwa itu dijadikan alasan Mahapatih yang mempunyai ambisi politik besar di Majapahit menyusun strategi agar raja bersedia menghukum tindakan Lembu Sora. Lembu Sora membangkang perintah raja dan mengadakan pemberontakan pada tahun 1298–1300. Lembu Sora gugur bersama sahabatnya, Jurudemung dan Gajah Biru. Susunan pemerintahan Raden Wiajaya tidak banyak berbeda dengan pemerintahan Singasari. Raja dibantu oleh tiga orang mahamenteri (i hino, i sirikan, dan i halu) dan dua orang pejabat lagi, yaitu rakryan rangga dan rakryan tumenggung. Pada tahun 1309 Raden Wiajay wafat dan didharmakan di Simping dengan Arca Syiwa dan di Antahpura (di Kota Majapahit) dengan arca perwujudannya berbentuk Harihara (penjelmaan Wisnu dan Syiwa).

Setelah Raden Wijaya mangkat, digantikan putranya yang bernama Kala Gemet dengan gelar Sri Jayanegara. Kala Gemet sudah diangkat sebagai raja muda (kumararaja) sejak ayahnya masih memerintah (1296). Ternyata, Jayanagara adalah raja yang lemah. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya terus dirongrong oleh sejumlah pemberontakan.

Pada tahun 1316 timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Nambi yang menjabat Rakryan Patih Majapahit. Nambi memusatkan kekuatannya di daerah Lumajang dan Pajarakan. Pemberontakan Nambi mendapat dukungan dari ayahnya (Wiraraja). Raja Jayanegara atas nasihat Mahapati memerintahkan Lumajang dan Pajarakan digempur sampai hancur. Terjadilah pertempuran sengit dan Nambi pun gugur.

Keadaan belum pulih, terjadi lagi pemberontakan Semi pada tahun 1318. Setahun kemudian (1319) terjadi pemberontakan Kuti. Semi dan Kuti adalah dua orang dari tujuh dharmmaputra. Pemberontakan inilah yang paling berbahaya karena Kuti berhasil menduduki ibu kota

Kerajaan Majapahit. Jayanegara terpaksa melarikan diri dan mengungsi ke Badander di bawah perlindungan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada.

Setelah raja dalam keadaan aman, Gajah Mada kembali ke Majapahit untuk melakukan pendekatan kepada rakyat. Ternyata masih banyak rakyat yang memihak raja dan Gajah Mada pun berhasil menanamkan rasa kebencian kepada Kuti. Dengan strategi yang jitu, Gajah Mada mengadakan serangan secara tiba-tiba ke pusat kerajaan. Pasukan Kuti dapat dihancurkan dan Kuti tewas dalam pertempuran itu. Setelah keadaan benar-benar aman, Jayanegara pulang ke ibu kota untuk meneruskan pemerintahannya. Karena jasanya yang besar, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan. Dua tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Patih Daha menggantikan Arya Tilan (1321).

Pada tahun 1328 terjadilah musibah yang mengejutkan. Raja Jayanegara dibunuh oleh Tanca (seorang tabib kerajaan). Tanca kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Peristiwa itu disebut Patanca. Jayanegara didharmakan di Candi Srenggapura di Kapopongan.

Raja Jayanegara tidak berputra sehingga ketika baginda mangkat, takhta kerajaan diduduki oleh adik perempuannya dari ibu berbeda (Gayatri) yang bernama Bhre Kahuripan. Ia dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwarddhani. Selama memerintah, Tribhuwanatunggadewi didampingi suaminya yang bernama Cakradhara atau Cakreswara yang menjadi raja di Singasari (Bhre Singasari) dengan gelar Kertawardhana. Berkat bantuan dan saran dari Patih Gajah Mada, pemerintahannya dapat berjalan lancar walaupun masih timbul pemberontakan.

Pada tahun 1331 timbul pemberontakan Sadeng dan Keta di daerah Besuki, tetapi dapat dihancurkan oleh pasukan Gajah Mada. Karena jasanya itu, Gajah Mada naik pangkat lagi dari Patih Daha menjadi Mahapatih Majapahit menggantikan Pu Naga. Setelah diangkat menjadi Mahapatih Majapahit, dalam suatu persidangan besar yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat negara lainnya, Gajah Mada mengucapkan sumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Sumpahnya itu dikenal dengan nama Sumpah

Palapa. Palapa berarti garam atau rempah-rempah yang dapat melezatkan berbagai masakan. Oleh karena itu, sumpah itu dapat diartikan bahwa Gajah Mada tidak akan makan palapa (hidup enak) sebelum berhasil menyatukan Nusantara.

Semula banyak pejabat negara yang menertawakannya, tetapi Gajah Mada sudah bertekad baja, bersemangat membara, dan maju terus pantang mundur. Gajah Mada mempersiapkan segala sesuatunya untuk mewujudkan sumpahnya, seperti prajurit pilihan, persenjataan, dan armada laut yang kuat. Setelah persiapannya matang, tentara Majapahit sedikit demi sedikit bergerak menyerang untuk menaklukkan wilayah kerajaan lain.

Pada tahun 1334 Bali berhasil ditaklukkan oleh Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dan Adityawarman. Adityawarman adalah seorang pejabat Majapahit keturunan Melayu dan berkedudukan sebagai werdhamantri dengan gelar Arya Dewaraja Pu Aditya. Setelah penaklukkan Bali, satu demi satu daerah di Sumatra, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian (Papua) bagian barat berhasil ditundukkan dan mengakui kekuasaan Majapahit. Tugas besar itu tercapai pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Agar pengakuan kekuasaan Majapahit di Sumatra kekal, Adityawarman diangkat menjadi raja di Melayu menggantikan Mauliwarmadewa (1343). Adityawarman segera menata kembali struktur pemerintahan dan meluaskan daerah kekuasaannya hingga Pagarruyung–Minangkabau. Setelah itu, Adityawarman memindahkan pusat kerajaan dari Jambi ke Pagarruyung. Adityawarman memerintah hingga tahun 1375. Pada tahun 1372 Tribhuwanatunggadewi meninggal dan didharmakan di Panggih dengan nama Pantarapurwa.

Hayam Wuruk setelah naik takhta bergelar Sri Rajasanagara dan dikenal pula dengan nama Bhre Hyang Wekasing Sukha. Ketika Tribhuwanatunggadewi masih memerintah, Hayam Wuruk telah dinobatkan menjadi rajamuda (kumararaja) dan mendapat daerah Jiwana sebagai wilayah kekuasaannya. Dalam memerintah Majapahit, Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada sebagai patih hamangkubumi.

Hayam Wuruk adalah raja yang cakap dan didampingi oleh patih yang gagah berani pula. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kebesaran. Wilayah kekuasaannya hampir seluas negara Indonesia sekarang. Bahkan, pengaruhnya terasa sampai ke luar Nusantara, yaitu sampai ke Thailand (Campa), Indocina, dan Filipina Selatan. Dengan kenyataan itu, berarti Sumpah Palapa Gajah Mada benar-benar terwujud sehingga seluruh pembesar kerajaan selalu hormat kepadanya. Kecuali sebagai seorang negarawan dan jenderal perang, Gajah Mada juga ahli hukum. Ia berhasil menyusun kitab Kutaramanawa yang digunakan sebagai dasar hukum di Majapahit.

Pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk, ada satu daerah di Pulau Jawa yang belum tunduk kepada Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda di Jawa Barat. Kerajaan Sunda itu diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Gajah Mada ingin menundukkan secara diplomatis dan kekeluargaan. Kebetulan pada tahun 1357 Raja Hayam Wuruk bermaksud meminang putri Sri Baduga yang bernama Dyah Pitaloka untuk dijadikan permaisuri. Lamaran itu diterimanya. Dyah Pitaloka dengan diantarkan oleh Sri Baduga beserta prajuritnya berangkat ke Majapahit. Akan tetapi, ketika sampai di Bubat, Gajah Mada menghentikan rombongan pengantin. Gajah Mada menghendaki agar putri Kerajaan Sunda itu dipersembahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda tunduk Raja Sunda kepada Majapahit. Tentu saja maksud Gajah Mada itu ditentang oleh raja dan kaum bangsawan Sunda. Akibatnya, terjadilah pertempuran sengit yang tidak seimbang. Sri Baduga beserta para pengikutnya gugur, Dyah Pitaloka bunuh diri di tempat itu juga. Peristiwa itu terkenal dengan nama Perang Bubat.

Setelah Raja Hayam Wuruk mangkat, terjadilah perebutan kekuasaan di antara putra-putri Hayam Wuruk. Kemelut politik pertama meletus pada tahun 1401. Seorang raja daerah dari bagian timur, yaitu Bhre Wirabhumi memberontak terhadap Raja Wikramawardhana. Raja Wikramawardhana adalah suami Kusumawardhani yang berhak mewarisi takhta kerajaan ayahnya (Hayam Wuruk), sedangkan Bhre Wirabhumi adalah putra Hayam Wuruk dari selir. Dalam kitab Pararaton, pertikaian antarkeluarga itu disebut Perang Paregreg. Pasukan Bhre Wirabhumi dapat dihancurkan dan ia terbunuh oleh Raden Gajah.

Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 dan digantikan oleh putrinya yang bernama Suhita. Penobatan Suhita menjadi Raja Majapahit dimaksudkan untuk meredakan pertikaian keluarga tersebut. Namun, benih balas dendam sudah telanjur tertanam pada keluarga Bhre Wirabhumi. Akibatnya, pada tahun 1433 Raden Gajah dibunuh karena dipersalahkan telah membunuh Bhre Wirabhumi. Hal itu menunjukkan bahwa pertikaian antarkeluarga Majapahit terus berlangsung.

Pada tahun 1447 Suhita meninggal dan digantikan Dyah Kertawijaya. Ia hanya memerintah selama empat tahun (1447–1451) karena pada tahun 1451 meninggal dan didharmakan di Kertawijayapura. Apa yang diperbuat oleh raja tidak ada keterangan yang jelas.

Sepeninggal Kertawijaya, pemerintahan Majapahit dipegang oleh Bhre Pamotan dengan gelar Sri Rajawarddhana. Rajawarddhana juga disebut Sang Sinagara. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa ia berkedudukan di Keling, Kahuripan. Ini lebih dikuatkan lagi oleh Prasasti Waringin Pitu yang dikeluarkan oleh Kertawijaya (1447). Sepeninggal Rajawarddhana (1453), Kerajaan Majapahit selama tiga tahun (1453–1456) tidak mempunyai seorang raja. Pada tahun 1456 Majapahit diperintah oleh Bhre Wengker dengan gelar Girindrawardhana. Bhre Wengker adalah anak Bhre Tumapel Kertawijaya. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun (1456–1466).

Berkembangnya agama Islam di pesisir utara Jawa yang kemudian diikuti berdirinya Kerajaan Demak mempercepat kemunduran Kerajaan Majapahit. Raja dan pejabat penting Demak adalah keturunan Raja Majapahit yang sudah masuk Islam. Mereka masih menyimpan dendam nenek moyangnya sehingga Majapahit berusaha dihancurkan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1518–1521. Penyerangan Demak terhadap Majapahit itu dipimpin oleh Adipati Unus (cucu Bhre Kertabhumi).

BAB IV

Islam, Nasionalisme, dan Komunisme dalam Pusaran Kekuasaan

A. KEKUASAAN ERA ISLAM DI INDONESIA (NUSANTARA)

Pemikiran dan institusi pilitik Islam di Indonesia, khususnya periode pra kolonial, merupakan wujud penerjemah dari tradisi politik Islam yang telah berkembang di dunia muslim ke dalam sistem sosial-politik dan budaya Indonesia. Bagian ini merupakan bagian inheren dari mode penerimaan unsur-unsur politik Islam secara umum, pemikiran dan institusi politik Islam. Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah kerajaan atau biasa disebut kesultanan yang dimaknai Milner sebagai kondisi memiliki raja yang menjadi landasan penting dari pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia. Bermula sebagai fenomena keraton.

Dalam budaya politik kerajaan, raja menempati posisi sentral tidak hanya secara politik tetapi juga budaya dan agama, dari raja kekuasaan

terpusat, oleh raja keberadaan rakyat sepenuhnya ditentukan, dan akhirnya kehadiran raja di istana adalah eksistensi sebuah kerajaan. Dalam konteks itulah pemikiran dan institusi politik Islam Indonesia berkembang.

Sumber-sumber sejarah yang berkenaan dengan masa awal perkembangan Islam di Nusantara-Melayu telah mengantar para peniliti pada satu kesimpulan bahwa Samudera Pasai berdiri menjadi kerajaan Islam pada abad XIII. Kesimpulan ini memiliki dasar yaitu, terdapat batu nisan Malikush Shaleh raja muslim pertama, yang berangka tahun 1297. Dan juga terdapat di dalam hikayat Raja-raja Pasai yang menyatakan bahwa Malikush Shaleh adalah raja pertama dengan gelar "Sultan".

Walau demikian, bukti-bukti sejarah ini belum mampu memberi penjelasan yang memadai tentang proses Islamisasi yang berlangsung di Samudera Pasai. Sementara menetapkan tahun 1297 sebagai waktu peralihan Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam sama sekali tidak memberikan penjelasan sejarah yang bisa diterima. Mengingat, pertimbangan yang dimiliki melalui sumber-sumber cina, bahwa tanggal itu mungkin saja menyesatkan. kendati dengan semua itu pun, dalam suatu hikayat menjelaskan menjelaskan dimana Malikush Shaleh membangun istana di satu wilayah di bagian Sumatera Utara, Samudera sebagai pusat kekuasaan negara yang baru dipimpinnya.

Hal yang sama pun terjadi pada pembentukan Kesultanan Malaka pada abad ke XVI. Prameswara adalah pendiri sekaligus pembangun Malaka. Ia adalah sultan pertama yang menganut Mazhab Syafi'I berkat perkawinannya dengan putri Raja Samudera Pasai. Sistem pemerintahan Malaka dengan struktur dan hierarki kekuasan erat kaitannya dengan kedudukannya sebagai negara maritim yang mengutamakan perdagangan. Pada periode ini upaya konsolidasi Politik memang merupakan perhatian utama raja-raja Malaka. Dalam hal ini mereka berusaha memberikan jaminan keamanan bagi perdaganagan maritim di wilayah kerajaannya, sebagai sumber ekonomi utama bagi perkembangan kerajaan.

1. Kerajaan Samudera Pasai

Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 M sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir Timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pase dan Perlak. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi.

Ada sejumlah sumber tertulis yang menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, di antaranya yaitu dua berasal dari Nusantara, beberapa dari Cina, satu dari Arab, satu dari Italia, dan satu dari Portugis. Sumber Nusantara antara lain Hikayat Raja Pasai (HRP) dan Sejarah Melayu (SM). Sumber Cina antara lain Ying-yai Sheng-lan dari Ma Huan, berita Arab dari Ibn Battutah, kisah pelayaran Marco Polo dari Italia.

Antara tahun 1290 dan 1520 kesultanan Pasai tidak hanya menjadi kota dagang terpenting di selat Malaka, tetapi juga pusat perkembangan Islam dan bahasa sastra Melayu. Selain berdagang, para pedagang Gujarat, Persia, dan Arab menyebarkan agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam tradisi lisan dan Hikayat Raja-raja Pasai, raja pertama kerajaan Samudra Pasai sekaligus raja pertama yang memeluk Islam adalah Malik Al-Saleh yang sekaligus juga merupakan pendiri kerajaan tersebut. Hal itu dapat diketahui melalui tradisi Hikayat Raja-raja Pasai, Hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sumber yang dilakukan para sarjana Barat terutama Belanda seperti Snouck Hurgronye, J.P. Molquette, J.L. Moens, J. Hushoff Poll, G.P. Rouffaer, H.K.J. Cowan, dan lain-lain.

Dalam Hikayat Raja-raja Pasai disebutkan gelar Malik Al-Saleh sebelum menjadi raja adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syaikh Ismail, seorang utusan syarif Makkah

yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Nisan itu didapatkan di Gampong Samudra bekas kerajaan Samudra Pasai tersebut. Raja-raja yang pernah memerintah:

1. Sultan Malik Al-Saleh.
2. Muhammad Malik Al-Zahir.
3. Mahmud Malik Al-Zahir.
4. Manshur Malik Al-Zahir.
5. Ahmad Malik Al-Zahir.
6. Zain Al-Abidin Malik AL-Zahir.
7. Nahrasiyah.
8. Abu Zaid Malik Al-Zahir.
9. Mahmud Malik Al-Zahir.
10. Zain Al-Abidin.
11. Abdullah Malik Al-Zahir.
12. Zain Al-Abidin.

Dalam kehidupan perekonomiannya, kerajaan maritim ini tidak mempunyai basis agraris. Basis perekonomiannya adalah perdagangan dan pelayaran. Pengawasan terhadap perdagangan serta pelayaran itu merupakan sendi-sendi kekuasaan yang memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dan pajak yang besar. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional pertama untuk mengekspor sutera dan lada. Hubungan dagang antara Pasai dan Jawa berkembang pesat. Para pedagang Jawa membawa beras ke Pasai, dan sebaliknya dari kota pelabuhan ini mereka mengangkut lada ke Jawa. Di Samudra Pasai, para pedagang Jawa mendapat hak istimewa, dibebaskan dari bea dan cukai.

Dalam catatan Tome Pirse di Pasai ada mata uang dirham. Diceritakan juga bahwa setiap kapal yang membawa barang-barang dari Barat dikenakan pajak 6%. Dalam catatannya juga disebutkan bahwa Pasai mengekspor lebih kurang 8.000-10.000 bahan lada per tahun, atau 15.000 bahar bila panen besar. Selain lada, Pasai juga mengekspor sutera, Cara pembuatan sutera diajarkan orang Cina kepada penduduk Pasai. Pada saat itu, jika ditinjau dari segi geografis dan sosial

ekonominya Samudra Pasai memang merupakan suatu daerah yang penting sebagai penghubung antara pusat-pusat perdagangan yang ada di kepulauan Indonesia, India, Cina, dan Arab. Hal itu menyebabkan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. Adanya mata uang pada saat itu membuktikan bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan yang makmur.

Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju, mengeluarkan mata uang dirham berupa uang logam emas. Saat hubungan dagang antara Pasai dan Malaka berkembang setelah tahun 1400, pedagang Pasai menggunakan kesempatan mengenalkan dirham.

2. Kerajaan Demak

Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Demak, dan berdiri pada tahun 1478 M. Hal ini didasarkan atas jatuhnya kerajaan Majapahit yang diberi tanda Candra Sengkala: Sirna hilang Kertaning Bumi, yang berarti tahun saka 1400 atau 1478 M. Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Fatah. Beliau selalu memajukan agama Islam dibantu oleh para wali dan saudagar Islam. Raden Fatah nama kecilnya adalah Pangeran Jimbun. Menurut sejarah, dia adalah putera raja Majapahit yang terakhir dari garwa Ampean, dan Raden Fatah dilahirkan di Palembang. Karena Arya Damar sudah masuk Islam maka Raden Fatah dididik secara Islam, sehingga jadi pemuda yang taat beragama Islam.

Secara geografis Kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah, tetapi pada awal kemunculannya kerajaan Demak mendapat bantuan dari para Bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah menganut agama Islam. Pada sebelumnya, daerah Demak bernama Bintoro yang merupakan daerah vasal atau bawahan Kerajaan Majapahit. Kekuasaan pemerintahannya diberikan kepada Raden Fatah (dari kerajaan Majapahit) yang ibunya menganut agama Islam dan berasal dari Jeumpa (Daerah Pasai). Letak Demak sangat menguntungkan, baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada zaman dahulu wilayah Demak terletak di tepi selat di antara Pegunungan Muria dan Jawa. Sebelumnya selat itu rupanya agak lebar dan dapat dilayari dengan baik sehingga kapal dagang dari Semarang

dapat mengambil jalan pintas untuk berlayar ke Rembang. Tetapi sudah sejak abad XVII jalan pintas itu tidak dapat dilayari setiap saat.

Setelah Raden Fatah wafat, tahta kerajaan Demak dipegang oleh Adipati Unus. Ia memerintah Demak dari tahun 1518-1521 M. Masa pemerintahan Adipati Unus tidak begitu lama, karena ia meninggal dalam usia yang masih muda dan tidak meninggalkan seorang putera mahkota.

Dalam usaha memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur, Sultan Trenggana memimpin sendiri pasukannya. Satu persatu daerah Jawa Timur berhasil di kuasai, seperti Maduin, Gresik, Tuban dan Malang. Akan tetapi ketika menyerang Pasuruan 953 H/1546 M Sultan Trenggana gugur. Usahanya untuk memasukan kota pelabuhan yang kafir itu ke wilayahnya dengan kekerasan ternyata gagal. Dengan demikian, maka Sultan Trenggana berkuasa selama 42 tahun. Di masa jayanya, Sultan Trenggana berkunjung kepada Sunan Gunung Jati. Dari Sunan gunung jati, Trenggana memperoleh gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Gelar Islam seperti itu sebelumnya telah diberikan kepada raden patah, yaitu setelah ia berhasil mengalahkan Majapahit.

3. Mataram Islam

Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat Kerajaan ini terletak di sebelah tenggara Kota Yogyakarta, yakni di Kotagede. Para raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram yaitu: Penembahan Senopati (1584-1601), Panembahan Seda Krapyak (1601-1677). Dalam sejarah Islam Kesultanan mataram memiliki peran yang cukup penting dalam perjalanan secara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara (Indonesia). Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengIslamkan para penduduk daerah kekuasaannya, keterlibatan para pemuka agama, hingga pengembangan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa.

Pada awalnya, Mataram adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya (Sultan pajang) kepada Ki Gede Pamanahan. Sultan Adiwijaya menghadiahkannya, karena Ki Gede Pamanahan telah berhasil membantu Sultan Adiwijaya dalam membunuh Aryo

Penangsang, ketika merebutkan tahta kesultanan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggana.

Pada tahun 1575, Pemahanan meninggal dunia. Ia digantikan oleh putranya, Danang Sutawijaya atau Pangeran Ngabehi Loring Pasar. Di samping bertekad melanjutkan mimpi ayahandanya, ia pun bercita-cita membebaskan diri dari kekuasaan pajang. Sehingga, hubungan antara mataram dengan pajang pun memburuk. Hubungan yang tegang antara sutawijaya dan kesultanan Pajang akhirnya menimbulkan peperangan. Dalam peperangan ini, kesultanan pajang mengalami kekalahan. Setelah penguasa pajak yakni hadiwijaya meninggal dunia (1587), Sutawijaya mengangkat dirinya menjadi raja Mataram dengan gelar penembahan Senopati Ing Alaga. Ia mulai membangun kerajaannya dan memindahkan senopati pusat pemerintahan ke Kotagede. Untuk memperluas daerah kekuasaanya, penembahan senopati melancarkan serangan-serangan ke daerah sekitar. Misalnya dengan menaklukkan Ki Ageng Mangir dan Ki Ageng Giring.

4. Kerajaan Cirebon

Letak Kerajaan Cirebon semula termasuk kedalam daerah Sunda Pajajaran, bahkan menjadi salah satu kota pelabuhan. Pelabuhan ini sudah ramai dari perahu pedagang-pedagang luar negri. Pedahang itu dari Arab, Cina, Pesia. Letak kerajaan Cirebon secara geografis di pesisir pantai pulau Jawa, merupakan mata rantai dalam jalan perdagangan internasional pada wwaktu itu yang antara lain membentang dari kepukauan Maluku hingga teluk Persi. Awal mula berdirinya Kerajaan Cirebon pada tahun 1302 cirebon mempunyai 3 daerah otonom di bawah kekuasaan keraajaan pajajaran yang masing-masing dikuasai oleh seorang Mangkubumi. Kerajaan Islam yang terletak di pantai sebelah utara pulau Jawa ini merupakan Kesultanan Islam pertama yang berdiri di tatar Pasundan. Sumber-sumber setempat menganggap pendiri Cirebon itu adalah Pangeran Walasungsang, putera mahkota Kerajaan Pajajaran. Namun, orang yang berhasil meningkatakan statusnya menjadi Kesultanan, adalah Syarif Hidayatullah.

Adapun sumber-sumber naskah tentang Cirebon yang disusun oleh para keturunan kesultanan dan para pujangga kraton umumnya

berasal adari abad ke-17. Diantara itu yang dianggap tertua adalah naskah babad yang ditulis oleh Pangeran Wangsakerta yang disebut Nagara Karthabumi. Namun selain itu juga sumber yang disebut Suma Oriental yang berasal dari seorang pengelana bangsa Portugis yang bernama Tome Pires, yang pernah berkunjung ke Cirebon pada tahun 1513 M. Sumber lokal tersebut menyebutkan pula bahwa Syarif Hidayatullah adalah keponakan sekaligus pula sebagai pengganti Pangeran Cakrabuana.

Sumber-sumber lokal terutama naskah Babad Cirebon dan Purwaka Caruban Nagari, menyatakan bahwa pendiri kerajaan Islam Cirebon adalah Sunan Gunung Jati. Cirebon pada mulanya adalah sebuah desa nelayan yang tidak berarti, yang bernama Dukuh Pasambangan yang dimana dulunya dibuat pemukiman oleh KiGedeng Alang-Alang. Tokoh ini merupakan penguasa Pajajaran dan berganti nama menjadi Walangsungsang, ia berhasil menaklukan Singapura.

Islam berkembang di Cirebon dalam dua aliran, Sunni dan Syi'ah. Penyebar-penyebar Islam generasi pertama adalah para da'i, pedagang, musafir, para ahli kyai dan seniman di berbagai bidang. Cirebon menjadi salah satu bandar perdagangan yang pesat pada masanya, sekaligus menjadi pusat peradaban Islam yang memiliki beberapa karakter antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kehidupan kota bernafaskan Islam dengan pola-pola penyusutan masyarakat serta hirarki sosial yang kompleks.
2. Berkembangnya arsitektur baik sakra maupun profan, misalnya Mesjid Agung Cirebon, keraton-keraton Kasaepuhan, Kanoman, Kacerbonan, dan Kaprabonan.
3. Pertumbuhan seni lukis kaca dan seni pahat yang menghasilkan karya-karya kaligrafi Islam yang sangat khas Cirebon.
4. Perkembangan bidang kesenian lainnya seperti tari, membatik, musik, dan berbagai seni di pertunjukan tradisioal bernafaskan Islam, ragam hias awan yang khas Cirebon.

5. Pertumbuhan penulisan naskah-naskah keagamaan dan pemikiran keagamaan yang sisa-sisanya masih tersimpan di keraton-keraton Cirebon.
6. Tumbuhnya aliran tarekat Syatariah yang kemudian melahirkan karya-karya sastra dalam bentuk serat suluk yang mengadung ajaran wujudiniyah atau martabat yang tujuh.

Keberadaan ulama di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari proses sejarah Islam, ulama bisa disebut paling berjasa dalam memperkenalkan Islam di masyrakat Nusanatara-Melayu. Islam di Nusantara-Melayu digambarkan tengah mengalami satu "revolusi Keagamaan", ketika Islam masuk ke dalam sttruktur sosial-politik dan budaya setempat. Berbicara keberadaan Ulama, hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa sampai pada perkembangannnya di abad XVIII, kehadiran ulama Nusantara-Melayu lebih memperhatikan gejala kota, para ulama menjadi bagian elite dikalangan kerajaan. Melihat akan hal ini, dapat dipahami bahwa Islam di Nusanatara menempat menempati posisi yang sentral dalam sistem sosial-politik dan budaya yang berlaku: Islam sejak saat itu menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kerajaan. Para ulama senantiasa berada di sisi raja, sebagai penasehat spiritual sekaligus memeberi legitimasi politik penguasa ditengah rakyatnya yang beralih menjadi Muslim. Disinilah para ulama menmpati Jabatan kadi (qadi), penghulu, bahkan Syekh, khususnya di kesultanan Aceh. Mereka semua termasuk dalam golongan elite kota.

Jabatan kadi (qadi) lebih seperti "Ketua Mahkamah Agung" yang memberi Landasan hukum bagi proses pengambilan keputusan oleh para hakim berdasarkan ajaran Islam. De Houtman menunjukkan adanya suatu lembaga pengadilan hukum (law count) di lingkungan istana kesultanan yang dipimpin para ulama.

Kesultanan Aceh pada masa kepemimpin Sultan Iskandar Muda memiliki dua tingkat lembaga pengadilan:

1. Tingkat pusat, yang langsung berada di bawah otoritas raja yang pelaksanaannya diwakili kadi Malik al-adil dan orang kaya-elite sosial politik dan ekonomi kesultanan.
2. Tingkat Daerah, yang berbasis di wilayah-wilayah tertentu yang berada di bawah otoritas penguasa daerah, umumnya orang kaya, yang bertindak mewakili saja. Sistem peradilan kesultanan Aceh dibagi kembali menjadi 4 jenis peradilan, yang masing-masing memiliki wilayah yurisdiksi yangberbeda satu sama lain. Keempat jenis peradilan tersebut adalah; (a) peradilan sipil/perdata yang bertugas memberi putusan hukum dalam bidang perdata, (b) peradilan kriminal yang bertugas memberi hukuman bagi para penjahat di lingkungan kesultanan, (c) peradilan agama yang bertanggung Jawab menjamin pelaksanaan hukum Islam; dan (d) jenis peradilan yang khusus menangani masalah-masalah yang muncul di dunia perdagangan.

B. DAULAT: KONSEP KEKUASAAN RAJA

Islam adalah salah satu unsur penting dalam pembentukan maupun perkembangan kerajaan. Dalam kondisi ini pun, institusi Islam menjadi bagian dari struktur politik kerajaan dan ulama melalui jabatan mereka di jabatan berperan dalam persoalan politik. Dengan demikian, kerajaan menjadi pusat dan sekaligus paradigma penerjemahan Islam, yang selanjutnya melahirkan satu perumusan "Dimensi Islam Indonesia yang Orisinal".

Hal ini pun didukung budaya politik Melayu, dimana memandang raja sebagai poros seluruh aspek kehidupan. Kehadiran Islam di dunia Melayu melahirkan proses re-orientasi budaya politik pra-Islam. Dalam

re-orientasi inilah peran ulama menjadi aktor intelektual dalam penerjemahan Islam dalam kerangka budaya politik Melayu yang ber orientasi saja.

Dalam politik Melayu, istilah daulat yang mengacu pada kekuasaan kerajaan-kerajaan terdapat muatan lokal yang mewarnai makna istilah tersebut. Daulat pada dasarnya berarti elemen keagamaan dalam sistem kerajaan. Jadi, istilah tersebut merujuk pada unsur politik yang bersifat supranatural dan sebagai konsekuensinya berhubungan erat dengan kekuasaan sakral raja. Istilah daulat umumnya diungkapkan dalam bentuk doa untuk meberkati raja yang baru naik takhta. Daulat dalam hal ini dibacakan dalam suatu upacara ritual politik yang mengaharapkan bahwa raja yang baru berkuasa mampu memimpin kerajaan dan masyarakat dalam bimbingan Tuhan.

Dari perspektif lain, istilah Daulat tidak bisa diartikan semata sebagai "kedaulatan" (sovereignty) atau" kekuasaan" (power) dalam pengertian sekarang ini, Istilah tersebut lebih merupakan kualitas Ketuhanan yang inheren melekat dalam diri raja-raja Melayu. Dalam konsep daulat, raja memiliki semacam "kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan" atau Pulung dalam tradisi Jawa, yang menjadikan mereka mampu menjalankan kekuasaan di kerajaan.

Selaras dengan konsep politik suni, raja muslim di Asia Tenggara mempunyai otoritas politik mutlak yang tidak tergoyahkan. Seperti dikemukakan terlebih dahulu, otoritas mutlak ini dirumuskan dalam konsep daulat (daulah) yang berkaitan dengan kualitas sakral keprbadian sang raja dan kekuatan ghaib yang menjaganya serta memelihara keabadian kekuasaannya.

Bertanggung Jawab sepenuhnya hanya kepada Allah SWT, tidak kepada rakyatnya ini merupakan konsekuensi atau implikasi logis dari raja sebagai wakil Tuhan dimuka bumi. Karena itu, betapa pun kejamnya dan tidak takwanya seorang raja, semua rakyat tidak boleh berlaku durhaka kepadanya. Sebaliknya, rakyat hendaklah taat dan patuh kepadanya karena hanya Tuhan lah yang berhak memberi perhitungan kepada raja seperti itu.

Abad XVII merupakan periode penting dalam perkembangan Islam Indonesia. Dalam tradisi politik, periode ini menandai tidak saja lahirnya institusi politik Islam yang demikian, yakni Kadi dan Syaikhul Islam (Syeikh) di kesultanan Aceh, tetapi juga pemikiran politik yang terintegrasi dalam tradisi Islam.

Pada abad XVII kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjalin hubungan diplomatik dan kultural kegamaan dengan dunia Timur Tengah. Telepas dari berbagai kepentingan politik di balik terjadinya hubungan dengan dunia Islam di Timur Tengah, hal penting untuk ditekankan di sini adalah bahwa hubungan tersebut memberi kontribusi sangat berarti bagi perkembangan Islam di Nusantara-Melayu. Pemikiran Islam neo-sufisme di Nusantara-Melayu abad XVII di ketengahkan para ulama yang belajar di Timur Tengah tepatnya Mekah dan Madinah.

Wali Songo dalam posisinya dalam kerajaan dapat dikatakan juga sebagai ulama kerajaan, namun juga adalah sebagai juga penentu atau penasihat agama Islam. Selain itu juga ketika penyebaran Islam dengan merebut kekuasaan, para wali juga ikut berperan dalam bidang politik kenegaraan.

De Graaf dan Pigeaud (1986:77) menjelaskan bahwa Sebagai ahli dan penegak hukum fiqh (= fakih) di Demak yang beragama Islam itu, sudah tentu bertindak seorang kiai dari kalangan alim ulama. Jabatan pemangku hukum syariat dan fungsi pemimpin masjid (imam), sudah sejak permulaan zaman Islam di Jawa berhubungan erat. Gelar "panghulu" (kepala), yang sudah dipakai oleh imam-imam di Demak, mungkin suatu bukti betapa besarnya kekuasaan yang mereka peroleh juga di bidang hukum.

Tentang Sunan Gunung Jati yang merupakan seorang Panglima Tentara Demak. Prof. Dr. Slamet Muljana (2009: 228) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan panglima Demak itu adalah orang yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati, menjadi jelas karena adanya berita dari kronik Tionghoa dari klenteng Talang yang bertarikh tahun 1552. Prof. Dr. Slamet Muljana (2009: 228) menjelaskan bahwa Faletehan atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1526, ketika dikirim oleh Sultan

Trenggono ke Cirebon dan Sunda Kelapa adalah panglima perang. Sama sekali ia bukan seorang ulama.

Tentang agama Islam di Demak, menurut Prof. Dr. Slamet Muljana (2009: 228) menjelaskan bahwa Sultan Demak beserta pengikutnya memeluk agama Islam madzhab Hanafi, seperti yang diajarkan oleh Sunan Ngampel alias Bong Swi Hoo.

Prof. Dr. Slamet Muljana (2009: 258) menjelaskan tentang Sunan Giri, diceritakan dalam Babad Tanah Jawi bahwa ia dalam menghadapi bala tentara Majapahit hanya melemparkan kalamnya. Dalam Serat Kanda, diceritakan bahwa Sunan Cirebon memberikan badong kepada panglima tentara Demak yang melawan tentara Majapahit. Tentang Sunan Bonang, diceritakan bahwa ia berupa empat memenuhi kiblat, ketika ia menghadapi Raden Said yang membegalnya di tengah jalan.

C. KEKUASAAN ERA ISLAM DI SUMATERA UTARA

1. Peran Barus dalam Masuk dan Berkembangnya Islam

Kota Barus adalah kota di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan dijuluki dengan kota Emporium yaitu pusat perdagangan pada abad 1-17 M, dan disebut juga dengan Fansur. Barus terkenal dengan dengan perdagangan kemenyan dan kapur barus sehingga hal tersebut merupakan salah satu terkenalnya Kota Barus, mulai dari proses masuknya Islam di Barus yang dilakukan secara berdagang kemenyan dan kapur sehingga Barus dapat berkembang.

Gambar 4.1 Lokasi Barus

Barus yang memiliki letak geografis yang strategis, membuat Kota Barus menjadi pelabuhan yang ramai, menjadi tempat persinggahan saudagar-saudagar muslim Arab dan menjadi salah satu pusat perniagaan pada masa dahulu, sebelum masuk agama Islam ke Barus, masyarakat setempat telah menganut agama Hindu. Hal ini dibuktikan dengan orang Arab telah diangkat mengepalai orang-orang Muslim di Ta Shih. Pada abad ke-7 dan 8 M sudah ramai didatangi para saudagar dari negeri Arab, Persia dan India.

Sama halnya dengan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan juga memiliki letak geografis yang strategis, sehingga pelabuhan di Sumatera Utara yang salah satunya adalah barus dimana merupakan pelabuhan yang ramai dan menjadi salah satu pusat perniagaan pada masa dahulu, oleh karena itu, banyak saudagar-saudagar muslim yang singgah ke pelabuhan ini. Letak yang strategis menyebabkan interaksi dengan budaya asing yang harus dihadapi, secara tidak langsung banyak budaya asing yang masuk ke Barus dan mempengaruhi kehidupan penduduknya dan sistem pemerintahannya, termasuk masuknya Islam. Kota Barus sekarang adalah sebuah kecamatan di kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia.

Agama Islam mulai berkembang di jazirah Arab pada abad ke-7 M, kemudian berkembang dan tersebar, ke Afrika, Eropa, India, dan Cina. Tepatnya pada awal abad ke-VIII. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Gujarat dan orang-orang Persia, kemudian orang-orang Arab (Sagimun, 1998:57). Kedatangan agama Islam pertama kali di Indonesia melalui Barus sebuah daerah yang terletak di pantai barat Sumatera dan selanjutnya dikembangkan ke wilayah Aceh dan akhirnya menyebar ke seluruh wilayah nusantara.

Islam masuk ke Indonesia khususnya Barus dengan melalui berbagai macam cara, yaitu perdagangan, pernikahan dan tasawuf kemudian berhubungan dengan para pelaut Arab yang melintasi lautan sejak masa itu sudah terdiri dari orang-orang muslim, bahwa pelaut atau pedagang Arab yang menuju Tiongkok tentu melintasi selat Malaka dan oleh karena itu tidak mustahil bahwa para penyebar agama Islam tersebut menghampiri salah satu pulau Sumatera Utara baik untuk menuggu musim maupun untuk menambah perbekalan, bahkan melakukan perdagangan imbal beli sehingga pada masa dinasti Tang sejarawan Tiongkok sudah lebih berminat membuat data-data tentang kedatangan orang-orang Arab dan Persia ke negerinya ataupun kegiatan dagang yang bertalian dengan negerinya (Said, 1961:58).

Pada abad ke-7, Barus kian tersohor hingga ke Eropa dan Timur Tengah karena menghasilkan kapur barus dan rempah-rempah. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini sebagian besar melalui perdagangan di wilayah pantai barat Sumatera atau juga wilayah Barus. Claude Guillot memaparkan bukti-bukti bahwa sejak abad ke-6 Masehi Barus sudah menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Pada akhir abad ke-7 yang juga merupakan abad pertama Hijriah, pedagang Arab mulai menjejakkan kakinya di pelabuhan Barus untuk melakukan perdagangan dan menyebarkan agama Islam.

Setelah masuknya agama Islam di Sumatera Utara, orang Sumatera lebih terbuka untuk berinteraksi kepada para pedagang dari berbagai negara terutama pedagang Arab. Para pedagang Arab itu banyak yang menikah dengan wanita lokal Sumatera Utara dan memiliki keturunan Muslim, ikatan perkawinan tersebut sebagai contoh sehingga terbentuklah keluarga Muslim. Islam di terima baik di Sumatera Utara

karena tidak memandang kasta layaknya agama Hindu-budha dan karena baiknya hubungan baik anatara masyarakat lokal dengan para da'i yang datang dari negara Arab. Dengan itu artinya proses Islamisasi tidak terjadi dengan kekerasan akan tetapi dengan secara damai dan perlahan sesuai dengan watak para pedagang Islam yang damai, ramah dan toleran namun setelah masuknya Islam perkembangan selanjutnya beberapa diantaranya menggunakan kekerasan seperti dominasi yang dilakukan oleh kerajaan Aceh terhadap beberapa kerajaan di Sumatera Utara.

Upaya peng-Islamisasian wilayah nusantara terkhusus sumatera utara dilakukan dengan beberapa cara:

a. Perdagangan adalah merupakan saluran pertama proses Islamisasi di Indonesia. Pada Abad ke-7 M, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang dari Arab, Persia dan India. Mereka telah mengambil bagian dari kegiatan perdagangan di Indonesia. Kenyataan itu, mengakibatkan adanya jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang Islam. Para pedagang Islam tersebut adalah mereka yang datang dari Arab, Persia dan India. Kegiatan berdagang yang dilaksanakan oleh umat Islam terjadi bukan hanya dengan masyarakat kelas bawah, melainkan juga dengan para bangsawan dan raja. Selama melakukan kegiatan dagang, para pedagang Muslim juga melakukan kegiatan dakwah.
b. Perkawinan dilakukan pedagang pada saat itu merupakan orang yang dihormati dan memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan penduduk pribumi menginginkan untuk menikahkan putri-putrinya dengan para pedagang tersebut, dengan terlebih dahulu mereka diIslamkan. Cara ini merupakan langkah efektif, karena dengan pernikahan ini akan terlahir seorang anak yang muslim juga. Harapan lainnya, dengan

pernikahan akan terbentuk masyarakat sehingga suatu saat dapat terbentuk kerajaan dan pemerintahan Islam

c. Islamisasi melalui jalur Politik dilakukan secara berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau raja masuk Islam, hampir dapat dipastikan bahwa rakyatnya juga masuk Islam.
d. Jalur Pendidikan merupakan media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Islamisasi bentuk ini dilakukan melalui pendidikan pesantren oleh para guru agama, kiyai dan ulama. Setelah santri selesai belajar, mereka kembali ke masyarakat untuk ikut membantu menyebarkan Islam, bahkan banyak diantara para santri itu kemudian mendirikan dan memiliki pondok pesantren sendiri. Tujuan pendidikan di pondok pesantren adalah untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam.
e. Para sufi mengajarkan Tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan gaya hidup yang penuh kesederhanaan. Seorang sufi biasa menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Para sufi terbiasa membantu masyarakat, diantara mereka ada yang ahli dalam menyembuhkan penyakit. Selain itu juga aktif menyiarkan dan mengajarkan ajaran Islam.
f. Kegiatan Islamisasi lewat jalur kesenian yang paling terkenal adalah dengan cara mengadakan Kesenian/pertunjukan seni gamelan dan wayang. Cara ini banyak ditemukan di kawasan Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lainnya. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa. Hal itu tentu mengundang masyarakat untuk berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam.

Dengan cara di atas, ada beberapa faktor yang menjadi sebab kenapa Islam mudah berkembang di tanah air, yaitu: Agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam; Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai; Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat; Perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana; Dalam Islam dikenal adanya kewajiban bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Zakat ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kepedulian hidup di masyarakat sehingga masyarakat terkhusus masyarakat Sumatera Utara menerima masuknya Islam.

2. Wilayah Pertama dan Dominasi Pengaruh Islam

Sebelum masuknya agama Islam ke Sumatera Utara, penduduk Sumatera Utara sudah terlebih dahulu memeluk agama Hindu dan sebagian lagi menganut agama parmalim. Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu disebutkan bahwa Nakhoda Ismail dan Fakir Muhammad datang dari Mekkah pertama mengIslamkan Barus, kemudian perkembangan selanjutnya ke Lamuri (Banda Aceh), Aru dan baru ke Pasai. Sumber sejarah ini tidak menjelaskan kapan proses Islamisasi itu berlangsung. Untuk itu, perlu dianalisis bukti arkeologi berupa batu nisan yang ada di Kota Rentang, Barus, dan beberapa sumber sejarah. Dari periodisasi temuan itu, dipastikan jenis batu nisan di Kota Rentang sudah digunakan sejak abad ke-13 M. Maka daerah Kota Rentang, Hamparan Perak sudah menjadi kawasan penting sejak abad itu. Karena itu, bisa disimpulkan kawasan Hamparan Perak-Kota Cina pada masa dahulu pernah menjadi bandar perdagangan penting yang mengilhami masuknya Islam di Sumatera Utara di tepi Selat Melaka/Pantai Timur Sumatera dan itu adalah bandar Kerajaan Aru.

Selanjutnya Kerajaan Aru/Haru sudah dipastikan sebagai Kerajaan Islam sejak pertengahan abad ke-13 M. Kesimpulan ini didasarkan kepada pada jenis batu nisan di Kota Rantang, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Kunjungan Marcopolo 1292 M, 165 batu nisan Sultan Malik Al Saleh, 1297 M. Nama penguasa Aru, Sultan Husin menjadi bukti yang kuat bahwa Kerajaan Aru telah beragama Islam. Yang populer disebut dalam sejarah Kaisar Cina mengirim Laksamana

Cheng Ho yang beragama Islam ke Aru tahun 1412 dan 1431. Mahuan kemudian menegaskan bahwa pada tahun 1451 raja Haru beserta rakyatnya telah memeluk agama Islam. Dan bisa dipastikan agama Islam sudah berkembang di Sumatera Utara.

Para ahli sejarah sepakat, bahwa agama Islam masuk ke Nusantara melalui jaringan perdagangan. Diketahui bahwa sejak awal Masehi (abad II dan III M) kawasan Asia Tenggara sudah ramai dikunjungi para saudagar dari Negeri seberang. Kapal-kapal perniagaan dari berbagai bangsa itu tiba di gugusan pulau Melayu (Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi) karena daerah ini kaya dengan hasil bumi yaitu rempah-rempah. Maka Sumatera Utara menjadi tempat yang strategis secara ekonomi dan geografi. Karena itu tidak mengherankan apabila di sepanjang pesisir Timur Sumatera bermunculan bandar-bandar perdagangan.

Namun bagaimana perkembangan Islam di Sumatera Utara hingga penguasa Haru memeluk agama Islam pada pertengahan abad ke-13 M akibat dominasi dari Aceh. Sebuah sumber tradisi, Hikayat Hamparan Perak merupakan satu-satunya sumber yang menjelaskan bagaimana proses Islamisasi di Sumatera Utara. Tetapi sumber yang berkisah tentang genealogi Guru Patimpus ini berkisah tentang bagaimana proses Islamisasi terhadap orang-orang Batak di pedalaman oleh orang yang dipanggil dengan nama Datuk Kota Bangun, pada abad ke-17 M proses Islamisasi versi Hikayat Hamparan Perak terjadi karena adanya kekhawatiran Orang-Orang Batak/Karo di pegunungan atas semakin berkembangnya Islam di daerah pesisir pantai, yakni banyaknya orang-orang Karo yang telah menjadi Islam.

Imam Sadiq ibn Abdullah seorang ulama yang mengembangkan agama Islam di Sumatera Utara pada abad ke -16 M. Diperkirakan ia adalah ulama yang datang dari Aceh bersamaan dengan usaha Kerajaan Aceh Darussalam untuk mengIslamkan daerah pedalaman Batak dan penaklukkan Kerajaan Haru oleh Sultan Aceh. Kedudukan makam yang berada di Klumpang, berdekatan dengan tebing Sungai Lalang merupakan bukti bahwa Imam Sadiq banyak melakukan dakwah Islam kepada orang-orang Karo yang datang dari Gunung melalui Sungai Lalang untuk berniaga atau menemui kerabat-

kerabatnya yang sudah lebih dulu bermukim di daerah Sunggal atau ke pesisir pantai (Hamparan Perak, Buluh Cina dan Labuhan).

Menurut beberapa literatur Perlak menjadi kerajaan pertama yang beragama Islam dengan rajanya bergelar Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Shah (840-864 M). Kerajaan ini kemudian menjadi pusat dakwah Islam di Asia Tenggara yang mengIslamkan beberapa bandar-bandar penting di Utara Sumatera termasuk Pasai dan Aru. Temuan sekitar 50 batu nisan di Kota Rentang menjadi bukti penyebaran agama Islam di daerah ini. Kompleks pemakaman keluarga istana biasanya tidak jauh dari tempat bersemayam raja (istana). Konsep Kota Kerajaan Tradisional selalu menempatkan Istana Raja, Masjid, Pasar, Alun-alun serta kompleks pemakaman keluarga raja/bangsawan yang saling berdekatan. Dari sini dapat disimpulkan Kota Rentang merupakan tempat pemakaman keluarga Kerajaan Haru yang berpusat di Kota Cina (Labuhan Deli).

Barus merupakan bandar penting yang mengilhami masuknya Islam ke daerah sumatera utara dan kawasana yang terletak di pantai Barat Sumatera Utara, merupakan kawasan penting sejak awal-awal abad Masehi.Penggalian di situs Lobu Tua, menunjukkan Barus masuk dalam jaringan perdagangan dengan Timur Tengah mulai abad ke-9 M. Temuan kaca berupa pecahan mangkok, piring, gelas, tabung kimia, cerek dan botol dan pecahan keramik dalam berbagai bentuk menunjukkan Barus sudah menjalin hubungan dengan bandar-bandar perdagangan di wilayah Timur Tengah, seperti Siraf, Mesopotamia, Naisabur atau Gurgan (Utara Iran) dan Pantai Makram yang mengindikasikan penyebaran agama Islam. Islam pada masa ini sudah berkembang pesat dan Barus sendiri sudah diperintah oleh raja-raja Islam yang bergelar sultan dan Barus yang merupakan bagian dari Kerajaan Aceh yang bermaksud untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah lainnya terkhusus wilayah sumatera utara.

3. Perkembangan Agama Islam di Sumatera Utara

Jika menilik tentang wilayah dengan pengaruh Islam yang kuat maka daerah yang pernah diduduki oleh kesultanan-lah Jawabannya lalu mengapa disebut dengan kesultanan dan bukan kerajaan? Islam

merupakan suatu agama dengan dominasi budaya arab didalamnya kesultanan sendiri diambil dari struktur suatu kekuasaan di wilayah Arab. Wilayah dengan kepemimpinan yang kuat pasti mampu mengkonfersikan suatu budaya atau agama dengan cepat, tak terlepas dengan beberapa kesultanan yang ada di sumatera utara yang memegang peranan yang penting dalam penyebarluasan agama Islam di Sumatera utara.

Berikut nama kesultanan yang menjadi wakil dari daerah di sumatera utara dengan pengaruh Islam yang kuat:

Kesultanan Deli

Kesultanan Deli adalah sebuah kesultanan yang didirikan pada tahun 1669 oleh Tuanku Panglima Perunggit di wilayah bernama Tanah Deli (kini Medan, Indonesia). Menurut Hikayat Deli, seorang pemuka Aceh bernama Muhammad Dalik berhasil menjadi laksamana dalam Kesultanan Aceh. Muhammad Dalik, yang kemudian juga dikenal sebagai Gocah Pahlawan dan bergelar Laksamana Khuja Bintan (ada pula sumber yang mengeja Laksamana Kuda Bintan), adalah keturunan dari Amir Muhammad Badar ud-din Khan, seorang bangsawan dari Delhi, India yang menikahi Putri Chandra Dewi, putri Sultan Samudra Pasai. Dia dipercaya Sultan Aceh untuk menjadi wakil bekas wilayah Kerajaan Haru yang berpusat di daerah sungai Lalang-Percut. Dalik mendirikan Kesultanan Deli yang masih di bawah Kesultanan Aceh pada tahun 1630.Setelah Dalik meninggal pada tahun 1653, putranya Tuanku Panglima Perunggit mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 1669 mengumumkan memisahkan kerajaannya dari Aceh. Ibu kotanya berada di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan.

Sebuah pertentangan dalam pergantian kekuasaan pada tahun 1720 menyebabkan pecahnya Deli dan dibentuknya Kesultanan Serdang. Setelah itu, Kesultanan Deli sempat direbut Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Aceh. Pada tahun 1858, Tanah Deli menjadi milik Belanda setelah Sultan Siak, Sharif Ismail, menyerahkan tanah kekuasaannya tersebut kepada mereka. Pada tahun 1861, Kesultanan Deli secara resmi diakui merdeka dari Siak maupun Aceh. Hal ini menyebabkan Sultan Deli bebas untuk memberikan hak-hak lahan

kepada Belanda maupun perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya. Pada masa ini Kesultanan Deli berkembang pesat. Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan terutamanya tembakau dan lain-lain. Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Deli juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu, misalnya Istana Maimun. Kesultanan Deli masih tetap eksis hingga kini meski tidak lagi mempunyai kekuatan politik setelah berakhirnya Perang Dunia II dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia.

Sultan Deli adalah penguasa Kesultanan Deli di Sumatera Utara, Indonesia. Sultan Deli dipanggil dengan gelar Sri Paduka Tuanku Sultan. Jika mangkat, sang Sultan akan digantikan oleh putranya.

Berikut daftar Sultan Deli:

NAMA SULTAN	MASA JABATAN
Tuanku Panglima Gocah Pahlawan	1632-1669
Tuanku Panglima Parunggit	1669-1698
Tuanku Panglima Padrap	1698-1728
Tuanku Panglima Pasutan	1728-1761
Tuanku Panglima Gandar Wahid	1761-1805
Sultan Amaluddin Mangendar	1805-1850
Sultan Osman Perkasa Alam Shah	1850-1858
Sultan Mahmud Al Rasyid	1858-1873
Sultan Ma'moen Al Rasyid	1873-1924

Sultan Amaluddin Al Sani Perkasa Alamsyah	1924-1945
Sultan Osman Al Sani Perkasa Alamsyah	1945-1967
Sultan Azmy Perkasa Alam Alhaj	1967-1998
Sultan Otteman Mahmud Perkasa Alam	1998–21 Juli 2005
Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam	22 Juli 2005–saat ini

Kesultanan Asahan

Sampai tahun 1946, Asahan merupakan salah satu Kesultanan Melayu yang struktur kerajaannya tidak jauh berbeda dari struktur negeri-negeri Melayu di Semenanjung Malaka pada masa itu. Namun pada tahun 1946, sistem kerajaan di Asahan telah digulingkan oleh sebuah pergerakan anti kaum bangsawan dalam sebuah revolusi berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Sosial.

Kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur seperti Deli, Langkat, Serdang, Kualuh, Bilah, Panai dan Kota Pinang juga mengalami nasib serupa. Mengikut tradisi setempat, Kesultanan Asahan bermula kira-kira pada abad XVI, yaitu ada saat Sultan Abdul Jalil ditabalkan sebagai Sultan Asahan yang pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Sultan-sultan Asahan berikutnya adalah Sultan Saidisyah, Sultan Muhammad Rumsyah, Sultan Abdul Jalil Syah II (mangkat 1765), Sultan Dewa Syah (1756 – 1805) dan Sultan Musa Syah (1805 – 1808). Setelah kemangkatan Sultan Asahan VII, Raja Muhammad Ishak diangkat.

Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Hussein Syah (1813 – 1854) dan anaknya, Sultan Ahmad Syah, Asahan merupakan kerajaan yang disegani di daerah antara Serdang dan Siak dan mempunyai pengaruh besar di Batu Bara, Bilah dan Panai. Di masa inilah terjadi pertembungan antara Belanda, Inggris dan Aceh di Asahan karena Belanda dan Inggris masing-masing bersaing untuk meluaskan

kekuasaan penjajahan dan perdagangan mereka di pesisir timur Sumtera sementara Aceh pun berkeras mempertahankan kedaulatannya di Asahan. Tuntutan Belanda terhadap negeri-negeri di Pesisir Timur termasuk Asahan adalah berdasarkan Perjanjian Siak yang ditandatangani oleh Belanda dengan Kesultanan Siak pada 1 Februari 1858. Berdasarkan perjanjian itu, Siak diserahkan kepada Belanda termasuk daerah taklukannya seperti Asahan, Batu Bara, Serdang, Deli, Langkat dan Tamiang.

Berdasar sejarah, hak Siak atas kerajaan-kerajaan ini adalah berdasarkan penyerangannya pada tahun 1791. Tetapi kenyataannya adalah kekuasaan Siak hanya sebatas nama saja dan tidak diakui oleh banyak pihak. Selanjutnya Kesultanan Asahan adalah kerajaan kecil yang menjadi bawahan Kesultanan Aceh. Karena itu secara otomatis struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh. Terlepas dari posisinya yang berada di bawah naungan Kesultanan Aceh, kekuasaan tertinggi Asahan berada di tangan Sultan, yang bergelar Yang Dipertuan Besar/Sri Paduka Raja. Jabatan yang lebih rendah adalah Yang Dipertuan Muda. Untuk daerah Kawasan Batubara dan kawasan yang lebih kecil, pemerintahan dijalankan oleh para datuk.

Kesultanan Langkat

Kesultanan Langkat merupakan kerajaan Melayu yang dulu memerintah di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatra Utara sekarang ini. Sampai dengan awal abad ke 19, kesultanan ini masih berada di bawah kuasa kesultanan Aceh (Sultan Iskandar Muda). Menurunnya kekuatan kesultanan Aceh yang berperang dengan Belanda yang mempunyai senjata lebih modern dipergunakan oleh Raja Langkat untuk menjadikan Langkat sebagai daerah yang merdeka. Pada tahun 1869 Langkat menandatangani perjanjian dengan Belanda dan Raja Langkat diakui sebagai Sultan pada tahun 1877. Sewaktu masa kolonial dulu, ada beberapa komoditi yang menghasilkan banyak pemasukan bagi Sultan Langkat yaitu antara lain: Karet, Kelapa sawit, Kopi dan Minyak.

Usaha Perkebunan orang Eropa tidak hanya banyak di daerah Deli, mereka juga merambah ke daerah Sumatra timur lainnya termasuk

daerah Langkat. Pada periode tahun 1920-1930-an permintaan untuk komoditi industri karet dan minyak meningkat, hal ini mengakibatkan naiknya harga karet dan minyak saat itu. Dengan otomatis maka Sultan Langkat yang memegang konsesi tanah menjadi sangat kaya dari usaha kerjasama (kontrak) dengan perkebunan milik orang Eropa. Kilang minyak di Pangkalan Brandan menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk pemasukan bagi Sultan Langkat.

Kesultanan Serdang

Kesultanan Serdang termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam di Indonesia, yang berpusat di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berdirinya kesultanan Serdang tidak terlepas dari peranan kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Serdang adalah pecahan dari kesultanan Deli, yang berdiri pada 1632. Bermula dari konflik internal untuk memperebutkan kekuasaan di kesultanan Deli, akhirnya kesultanan Serdang terbentuk.

Kesultanan Serdang didirikan oleh keturunan dari pendiri kesultanan Deli, yakni Tuanku Umar Johan Alam Shah. Ia mendirikan kesultanan Sedang setelah diusir dari kesultanan Deli bersama dengan ibunya, Tuanku Puan Sampali. Tuanku Umar Johan Alam Shah, dan ibunya tiba di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Kampung Besar atau Serdang. Di tempat itulah ia mendirikan kesultanan Serdang, dan menjabat sebagai raja pertama pada 1723.

Tuanku Umar Johan Alam Shah memiliki tiga orang putra, yaitu, Tuanku Malim; Tuanku Ainan Johan Alam Shah; dan Tuanku Sabjana, dikenal juga dengan nama Pangeran Kampung Kelambir. Setelah Tuanku Umar Johan Alam Shah wafat, putra pertamanya, Tuanku Malim, menolak untuk menggantikan ayahnya menjadi raja Serdang, sehingga yang didaulat untuk memimpin kesultanan Serdang adalah Tuanku Ainan Johan Alam Shah (1767-1817). Tuanku Ainan Johan Alam Shah memiliki istri bernama Tuanku Puan Sri Alam, putri dari kerajaan Perbaungan, yang kemudian bergabung dengan kesultanan Serdang. Wilayah lainnya yang memilih untuk bergabung dengan kesultanan Serdang adalah sebuah negeri di Denai dan Serbajadi, yang

dibangun oleh Tuanku Tawar Gelar Kejuruan Santun, salah seorang keturunan raja Deli.

Kesultanan Serdang mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Thaf Sinar Basyar Shah, atau Sultan Besar Serdang tahun 1822-1851. Pada 1862, kesultanan Serdang mendapatkan serangan dari pemerintah Belanda. Ketika itu, kesultanan Serdang mengalami kekalahan dan takluk kepada pemerintah Belanda. Sejak saat itu, sesuai dengan Acte van Erkenning, tertanggal 16 Agustus 1862, kesultanan Serdang berada di bawah kekuasaan Belanda. Di sisi lain, kesultanan Serdang masih berkonflik dengan saudaranya, kesultanan Deli. Puncak perselisihan terjadi pada saat kesultanan Serdang berada di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Syariful Alam Shah (1879-1946). Konflik baru mereda setelah Indonesia merdeka tahun 1945.

D. NASIONALISME DI INDONESIA

Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu nation. Kata nation jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Menurut KBB (Kamus Bahasa Besar Indonesia), nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri.

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “Nasional” dan “isme”, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air.

Rasa nasionalisme juga identik dengan memiliki rasa solidaritas. Nasionalisme juga mengandung makna persatuan dan kesatuan. Nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan

dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat.

Substansi nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur: *Pertama*, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, etnik dan agama. *Kedua*, kesadaran bersama bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan di Indonesia. Semangat dari dua substansi tersebutlah yang kemudian tercermin dalam proklamasi kemerdekaan dengan jelas dinyatakan "atas nama bangsa Indonesia", sedangkan dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan secara tegas, "segala bentuk penjajahan dan penindasan didunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Terdapat beberapa jenis nasionalisme:

- **Pertama adalah nasionalisme liberal**

Nasionalisme liberal berakar dari pemikiran liberal klasik Eropa yang muncul sejak revolusi Prancis. Revolusi tersebut menumbuhkan kesadaran tentang perlunya perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan nasional serta proses unifikasi yang mensyaratkan konstitusi untuk membatasi pemerintah. Ini mempengaruhi terbentuknya negara-negara baru di Eropa yang didasari oleh kesamaan etnis. Seperti Unifikasi Italia oleh Guesepp Mazzini (1805-1872) serta terbebasnya negara Amerika Latin dari Spanyol.

Nasionalisme liberal memiliki asumsi bahwa umat manusia secara alamiah terbagi dalam banyak bangsa yang memiliki identitas berbeda. Bangsa merupakan komunitas organik yang memiliki kesetaraan dengan bangsa lain. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa bangsa tertentus ebagai kelas penguasa semetara yang lain tidak. Dalam pandangan liberal setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) untuk membentuk komunitas politik (nation-state).

Prinsip penentuan nasib sendiri dan keseteraan ini diterapkan oleh Wodrow Wilson, Presiden AS, dalam perjanjian Versailles 1919. Dalam pidatonya yang dikenal dengan "14 pilar", Wilson menata ulang

wilayah politik di Eropa. Wilson berusaha memecah imperium Eropa (Austria, Jerman, dan Turki) menjadi negara-negara yang lebih kecil. Dia memandang bahwa bangsa Yugoslavia, Polandia dan Chezh merupakan bangsa tersendiri yang mempunyai hak untuk mendirikan negara.

- **Kedua adalah nasionalisme konservatif**

Nasionalisme konservatif berkembang belakangan setelah nasionalisme liberal, meskipun lebih dulu muncul dibanding liberal. Nasionalisme liberal bangsa sebagai *subversive* dan ancaman. Kecenderungan dari konservatif adalah membentuk imperium yang bersifat monarki dan militeristik. Menginginkan sebuah bangsa yang integral atau lebih dikenal denga pan-nasionalisme. Ini dicontohkan oleh Otto van Bismarck (penguasa Prusia) yang menginginkan Prusia sebagai pemimpin seluruh wilayah Jerman. Begitu juga yang dilakukan oleh Tsar Alexander III yang dikenal dengan gagasan Pan-Slavis.

Karena bangsa dianggap sebagai sebuah ancaman, kelompok konservatif lebih mendukung terbentuknya sebuah negara-bangsa terlebih dahulu dari pada pembentukan bangsa (nation-building). Hal ini bertujuan agar loyalitas bisa diberikan kepada institusi politik sehingga menghindari terbentuknya loyalitas terhadap bangsa.

- **Ketiga adalah nasionalisme ekspansionis.**

Nasionalisme ekspansionis ditandai dengan karakternya yang agresif, militeristik dan ekspansionis. Merupakan antithesis terhadap prinsip kesetaraan dan penentuan nasib sendiri dalam nasionalisme liberal. Nasionalisme ini memanfaatkan antusiasme massa sebagai bangsa unggul. Pada abad 19, pandangan ini banyak mempengaruhi negara-negara Eropa yang mengaggap mereka sebagai bangsa pilihan yang berhak untuk menguasai Asia dan Afrika.

Pandangan mengenai bangsa unggul pertama kali diperkenalkan oleh Nicolas Chauvin, prajurit Prancis pada masa Napoleon. Chauvin mengajarkan pandangan irasional mengenai superioritas atau dominasi bangsa tertentu atau yang lebih dikenal dengan chauvinism. Chauvinism ini dikembangkan oleh Adolf Hitler untuk membentuk

teori tentang keunggulan ras Arya. Sehingga Jerman kemudian muncul sebagai negara ekspansionis pada masa Perang Dunia II.

Ekspansionis memiliki pandangan yang bersifat ultranasionalis, dimana bangsa merupakan segalanya. Individu tidak memiliki arti apa-apa kecuali jika memberikan loyalitas bagi kejayaan bangsa. Sifat ultranasionalis ini muncul sebagai akibat keterasingan, isolasi dan ketidakberdayaan. Kondisi ini memaksa mereka untuk berbangga diri dalam artian sempit serta berusaha menjadi lebih unggul dibanding yang lain.

- **Keempat adalah nasionalisme anti-kolonial**

Nasionalisme anti-kolonial muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme Eropa di Asia Afrika. Benih-benihnya muncul pada awal abad 20 dan baru mendapatkan momentumnya setelah Perang Dunia II. China merdeka (1949) setelah delapan tahun berjuang melawan pendudukan Jepang. Indonesia mendapat pengakuan pada 1949 setelah tiga tahun perlawanan menolak kehadiran kembali Belanda. Prancis terpaksa hengkang dari Vietnam pada 1954 setelah timbul perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata yang muncul di Asia Tenggara menginspirasi negara-negara Afrika sehingga di sana juga muncul gerakan pembebasan. Gerakan ini dipelopori oleh Nkrumah di Ghana, Azikiwe di Nigeria, Julius Nyere di Tanzania dan Hasting Banda di Malawi. Gerakan ini semakin kuat di akhir 1950an dan mulai membuahkan hasi pada dekade 1960an.

Sebenarnya nasionalisme anti-kolonial meniru nasinalisme liberal dimana mereka mengadopsi konsep kesetaraan dan penentuan nasib sendiri. Namun kebanyakan gerakan pembebasan ini justru lebih banyak mengambil ideologi sosialis terutama Marxism-Leninisme. Karena yang menjadi konsern perjuangan mereka adalah memutus mata rantai sub-ordinatif dengan negara industri Eropa. Mereka ingin membentuk solidaritas kelas negara tertindas untuk menghadapi negara kapitalis.

Namun sejak dekade 1970an, Islam mulai mengambil alih ideologi sosialis. Revolusi Iran 1979 merupakan bukti pertama keberhasilan Islam mengambil alih politik. proses Islamisasi politik juga berlangsung

di Pakistan dan Sudan. Sementara di negara Mesir dan Algeria, kelompok Islamis lebih bergerak sebagai gerakan moral.

1. Nasionalisme Indonesia Pra-Kemerdekaan

Bangsa Barat mulai menjajah Indonesia mulai abad XVII, kemudian Indonesia seperti halnya bangsa pada umumnya yang menginginkan kebebasan dari kezaliman para penjajah tersebut membuat Indonesia bergerak maju untuk lahir sebagai bangsa baru yang dimulai dengan tumbuhnya rasa nasionalisme di seluruh penjuru Indonesia.

Kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia merupakan hasil dari para orang-orang terpelajar dan intelektual yang menjadi kunci utama dalam gerakan nasionalisme Indonesia, mereka para kaum terpelajar tersebut merupakan hasil dari sistem yang pendidikan yang diadakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan-gerakan yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan tidak lagi dilakukan dengan senjata melainkan organisasi modern.

Para bangsawan yang terdidik merupakan motor dari pada ide-ide cemerlang masa pergerakan nasionalisme, sebab kaum bangsawanlah yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yang dengannya mereka dapat berbaur dengan cara berpikir pemerintah kolonial. Mereka mengetahui bahwasanya organisasi-organisasi para kolonial memeliki susunan yang kokoh dan rapi serta tidak mungkin bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi mereka secara tradisional seperti sebelumnya.

Munculnya nasionalisme di Indonesia dalam pengertian modern merupakan bentuk reaksi atau antitesis terhadap kolonialisme, yang bermula dari cara ekploitasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang permanen antara penjajah dan yang di jajah. Nasionalisme Indonesia secara umum bertujuan ke dalam memperhebat nation building dan character building sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa, sedangkan tujuan ke luar secara antitesis dan antagonis melakukan konfrontasi atau menolak segala bentuk kolonialisme. Nasionalisme Indonesia bersikap menentang secara prinsipil. Hal itu dapat dimengerti karena nasionalisme ingin mengambalikan lagi harga diri manusia yang hilang akibat

kolonialisme. Itulah sebabnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya nasionalisme dan kolonialisme tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan memiliki hubungan timbal balik.

Semua pengalaman yang mengecewakan Indonesia akibat kolonialisme Belanda memaksa terbentuknya solidaritas sosial yang mengantar lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Pergerakan kebangsaan Indonesia yang muncul pada abad ke-20 merupakan suatu fenomena baru di dalam sejarah bangsa Indonesia. Pergerakan kebangsaan itu merupakan lanjutan perjuangan yang masih bersifat pra-nasional dalam menentang praktek-praktek kolonialisme dan imperialisme Belanda pada masa-masa sebelumnya. Pergerakan kebangsaan modern ini lebih terorganisasi, mempunyai asas dan tujuan yang jelas, berjangkauan panjang, serta mempunyai ideologi baru yaitu menciptakan masyarakat maju, suatu ideologi yang kemudian mengalami pendewasaan dengan hasrat mendirikan sebuah negara nasional.

Ada beberapa organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. **Pertama adalah Boedi Utomo (1908).** Dengan diterapkannya politik balas budi, secara tidak langsung telah mendorong munculnya elit baru berpendidikan barat yang sadar akan nasib bangsanya akibat kolonialisme. Dalam hal ini para pelajar Indonesia sebagai kelompok cendekiawan (kelompok elite modern) menyadari sepenuhnya bahwa seperangkat alat yang dibutuhkan itu tidak lain adalah sebuah organisasi modern. Kesadaran ini telah memberikan motivasi pada sekelompok pelajar di Stovia yang dipimpin oleh Soetomo untuk mendirikan perkumpulan Boedi Utomo (1908) sebagai organisasi pergerakan pertama yang menjadi perintis bagi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia lain.

Nasionalisme di Indonesia mengalami pertumbuhan seirama dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Sifat dan corak nasionalisme pada saat lahirnya Boedi Utomo (1908) telah dilandasi oleh nasionalisme dalam bentuknya yang masih samar-samar. Perkumpulan ini membatasi gerakannya terbatas pada Jawa dan Madura. Sasaran perjuangannya juga tampak belum tegas

antara perjuangan politik atau terbatas pada sosiokultural menyebabkan aktivitasnya cenderung hanya dibidang kebudayaan.

Kedua Sarekat Islam (1912). Lahirnya Sarekat Islam (1912) memberikan titik terang bagi perkembangan nasionalisme Indonesia. Sarekat Islam tidak semata-mata mengadakan perlawanan terhadap pedagang Cina, tetapi membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumi putera. Perjuangannya yang langsung membela rakyat, yaitu memperjuangkan ekonomi rakyat telah menjadikan perkumpulan ini berkembang sangat pesat. Dengan keadaan tersebut perkembangan nasionalisme Indonesia mengarah pada konsep nasionalisme yang bercorak ekonomi, religius, dan demokratis.

Ketiga adalah Indische Partij (1912). Konsep nasionalisme lebih luas lagi diperkenalkan oleh Indische Partij. Organisasi ini dengan tegas mencanangkan kemerdekaan tanah air dan bangsa Hindia lepas dari Nederland sebagai akhir dari perjungannya. Nasionalisme yang dikembangkan bercorak tegas bahkan radikal. Menjadi organisasi politik pertama di Indonesia.

Keempat adalah Perhimpunan Indonesia (PI) (1925). Perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda bernama Perhimpunan Indonesia (PI) awalnya bernama "Indische Vereneging" (1908) mulanya hanyalah perkumpulan organisasi sosiokultural. Tetapi sejak 1925 mereka telah mengembangkan organisasi tersebut sebagai organisasi yang mengutamakan masalah-masalah politik. Lewat PI konsep nasionalisme bercorak lebih tegas dan revolusioner. PI telah memberikan sumbangan yang sangat penting yaitu nama "Indonesia" sebagai identitas nasional.

Kelima adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) (1927). Kelahiran Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 melanjutkan ide-ide yang dikembangkan oleh PI juga dilandasi oleh nasionalisme dan revolusioner. Selanjutnya dicetuskan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi bukti bahwa nasionalisme Indonesia telah melandasi dan dijunjung tinggi dalam aktivitas bangsa Indonesia, untuk bersatu adalah kemauan bersama yang akan mengatasi alasan-alasan dengan tetap menghormati perbedaan-perbedaan yang ada.

Dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia, tampaklah bahwa proses pendewasaan dari pematangan konsep nasionalisme kultural, berkembang ke sosio-ekonomis, dan memuncak menjadi nasionalisme politik revolusioner yang mempunyai aspek multidimensional. Nasionalisme Indonesia tumbuh dan berkembang dari dan dalam kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri. Itu artinya bangsa Indonesia menyadari keberadaannya dalam tata pergaulan hidup dengan bangsa-bangsa lain.

2. Nasionalisme Pasca Kemerdekaan

Nasionalisme diketahui sebagai paham yang berpandangan bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam atas suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi baru pada abad ke-18 M nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui umum. Konsep nasionalisme bermuara pada satu tujuan, yaitu nasionalisme untuk mendapatkan kemerdekaan. Nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa, menjadi sebuah legitimasi dalam perjuangan kemerdekaan. Perjuangan bangsa melawan penjajah, baik Belanda atau Jepang memang didasarkan pada semangat kebangsaan.

Nasionalisme yang mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan tidaklah sama dengan nasionalisme yang muncul di Eropa. Nasionalisme Indonesia merupakan kristalisasi keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, dibungkus perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa tertindas. Bung Karno menyebut nasionalisme Indonesia sebagai nasionalisme Timur yang berbeda dengan nasionalisme Barat.

Nasionalisme Barat merupakan produk masyarakat peralihan, dari agraris ke industri. Sebagai negara industri baru, mereka membutuhkan eksistensi dan logistik untuk mendukung kepentingan nasional. Oleh sebab itu, penjajahan menjadi metode yang dipilih. Ratusan tahun

Indonesia dibelenggu penjajahan, menjadi sisi gelap nasionalisme dengan pemahaman yang berbeda.

Nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas, perkembangannya berada di tititk persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Tetapi nasionalisme tidak sekedar dilihat sebuah proses dari atas ke bawah dimana kelas dominan memiliki peran lebih penting dalam pembentukan nasionalisme daripada kelas yang terdominasi. Ini berarti bahwa pemahaman komfrehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan tentunya juga dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat. Pada tingkat iniah elemen-elemen sosial seperti Bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme.

Keberadaan Nasionalisme hingga sekarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh seluruh warga negara Indonesia dianggap sebagai hari kebebasan dari belenggu penjajahan atau koionial. Bahkan dianggap sebagai fase dari segala puncak pergerakan nasional. Apakah setelah fase ini rasa nasionalisme mulai pupus dan kendor? Jika kita mengikuti apa yang dikemukakan oleh Anderson, tidak berarti bahwa rasa nasionalisme dan komitmen kebangsaan mulai hilang. Akan tetapi nasionalisme pada tatanan global telah berakhir dan beralih ke dalam nasionalisme dalam tatanan lokal. Maksudnya, rasa nasionalisme yang dipupuk dan dikembangkan bukan lagi sebagai wujud respon dari kolonlalisme, akan tetapi kebersamaan yang lahir dan tumbuh dari rasa senasib dan sepenanggungan, dan komitmen bersama untuk mempertahankan keutuhan wilayah republik Indonesia dan menyusun langkah-langkah selanjutnya menuju proses pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.

Karena republik ini lahir dari perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, maka rasa memiiiki secara bersama begitu kuat. Akan tetapi selama masa kemerdekaan, proses pembangunan politik, birokrasi

pemerintahan dan pembangunan secara sosial-budaya dan ekonomi mengalami berbagai ketimpangan dan ketidakpuasan dari berbagai pihakatau kelompok. Akibat, munculnya berbagai akibat langsung yang tidak disadari, yaitu lahirnya berbagai bentrokan kepentingan politik, ketidak puasan dan peta-peta politik baru yang justru dapat menghambat proses pembangunan bangsa yang telah menjadi komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya muncul dari kalangan pemerintah dan pejabat atau organisasi di sekitar pemerintah pusat, akan tetapi justru banyak yang muncul di luar daerah.

Implikasinya lebih lanjut jika reaksi ini tidak terakomodir adalah, akan semakin menguatkan rasa sentimen kelompok politik tertentu atau sentimen kedaerahan. Jika demikian, maka lahirlah rasa nasionalisme baru yang lebih bersifat "lokal" atau apa yang disebut sebagai "etnonasionalisme" (Kartodlrdjo, 1998:53). Sebagai contoh, sekitar tahun 1950 hingga 1960-an muncul gerakan-gerakan politik dalam negeri yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), misalnya Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan (RMS), dan beberapa lagi kasus lain yang serupa.

Jika kita membandingkan nasionalisme yang lahirpada zaman pergerakan nasional dengan nasionalisme yang muncul tahun-tahun belakangan ini, nampak perbedaan yang cukup mendasar, meskipun terdapat persamaan. Persamaannya yang dapat kita lihat adalah nasionalisme pada zaman pergerakan nasional yang lebih bersifat global dan nasionalisme sekarang yang lebih bersifat lokal, lahir dan muncul sebagai suatu bentuk respon akan kesadaran ketidakadilan, merasa terjajah, tertinggal dan cinta tanah air. Sedangkan perbedaannya adalah, munculnya kesadaran dan sentimen nasionalisme pada zaman pergerakan nasional lebih disebabkan oleh perasaan ketertinggalan, kebodohan, tertindas, dan kemiskinan sebagal akibat dari ideologi kolonialisme Belanda, sedangkan nasionalisme sekarang lebih disebabkan oleh munculnya perasaan ketimpangan pembangunan daerah dan pusat, alokasi dana yang tak seimbang, dan merasa adanya perasaan dieksploitasi oleh pemerintah pusat di Jakarta. Bahkan ada pula yang mendikotomikan antara pembangunan yang lebih berorientasi Jawa dibandingkan luar Jawa, ketidakadilan dan

ketidakseimbangan birokrasi pemerintahan antara Jawa dan luar Jawa. Bahkan perbedaan yang paling mendasar adalah, nasionalisme yang lahir pada zaman pergerakan nasional lebih bersifat sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa (bersifat integratif), sedangkan nasionalisme sekarang ini lebih bersifat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa (lebih bersifat disintegrasi).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa nasionalisme telah mengalami proses transformasi dari global ke lokal, dan dari integrasi ke disintegrasi nasional.

Penting bagi bangsa Indonesia saat ini untuk duduk sejenak merenung, mengapa mantra nasionalisme pada awal kemerdekaan begitu ampuh mengantarkan Indonesia kepada tujuannya. Bahkan setelah kemerdekaan, nasionalisme kembali menjadi mantra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan. Seperti kunci bertemu dengan gemboknya, nasionalisme Indonesia pada masa kemerdekaan berada pada posisi tepat, bahkan menjadi antitesis Nasionalisme Barat yang keliru. *Pertama*, nasionalisme Indonesia dibungkus perasaan tertindas sebagai bangsa terjajah. Suka tidak suka, perasaan tersebut mampu mengeliminasi segenap perbedaan menjadi kekuatan dahsyat untuk mengusir penjajah.

Kedua, keinginan hidup bersama dalam tatanan yang lebih teratur secara sosial dan politik merupakan modal dasar diperjuangkannya bentuk negara merdeka dan berdaulat. Ketiga, nasionalisme Indonesia bergelora begitu dahsyat karena memiliki musuh bersama, yakni kaum penjajah. Menjelang usianya yang ke-71 tahun, konteks nasionalisme Indonesia mengalami pergeseran makna. Pergeseran ini mensyaratkan bahwa metode yang dipilih tidak sama dengan sebelumnya.

Dari sisi politik, sistem pemerintahan belum mampu mewujudkan cita-cita masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Parpol sebagai mesin demokrasi masih terbelenggu oleh kepentingan oligarki. Tak mengherankan jika produknya ialah pemimpin yang belum bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Korupsi menjadi agama baru yang semakin masif pemeluknya, dari birokrat hingga parlemen, kelas teri hingga kelas kakap.

Dari sisi sosial budaya, generasi muda lebih piawai menyanyikan musik ngak-ngik-ngok (mengutip istilah Bung Karno) ketimbang lagu nasional. Ruang publik juga bergeser dari taman kota ke mal yang begitu menggoda syahwat konsumerisme. Nasionalisme Indonesia semakin sulit menemukan bentuk idealnya jika dikaitkan dengan tata politik internasional saat ini. Pascaruntuhnya Uni Soviet pada dekade 1990-an, dunia bergerak dari sistem bipolar menjadi multipolar. Negara-negara menjadi interdependen satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Perubahan besar kembali terjadi ketika fenomena globalisasi yang dicirikan dengan kemudahan di bidang komunikasi dan informasi semakin menihilkan batas-batas negara.

Merujuk pada kondisi tersebut, nasionalisme Indonesia dituntut tidak hanya berorientasi ke dalam, yakni penguatan identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia saja seperti halnya pada awal kemerdekaan, tapi juga berani melihat ke luar sebagai bagian dari dunia internasional. Di sinilah titik rentan nasionalisme Indonesia. Peran serta Indonesia dalam berbagai badan atau organisasi supranasional menuntut Indonesia untuk tetap mampu mempertahankan kedaulatan dan identitas nasionalnya. Kencangnya arus globalisasi juga berpotensi menghadirkan ancaman terhadap nasionalisme Indonesia. Nilai-nilai budaya asing dengan mudah diadopsi tanpa disaring generasi muda melalui televisi, radio, dan beraneka ragam gawai yang semakin canggih. Akibatnya, perilaku mereka semakin jauh dari nilai-nilai budaya ketimuran.

Mendudukkan nasionalisme Indonesia kini seyogianya berkiblat pada empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, begitu pendapat beberapa kalangan. Sayangnya, bangsa ini kerap mengalami amnesia sejarah. Nasionalisme yang dibutuhkan Indonesia ialah nasionalisme yang mampu menJawab permasalahan saat ini yang semakin kompleks.

Pertanyaan paling mendasar untuk merumuskan nasionalisme Indonesia hari ini ialah, apakah kita masih merasa sebagai satu bangsa? Penindasan terhadap golongan minoritas (Syiah, Ahmadiyah), upaya memisahkan diri dari beberapa wilayah di Indonesia (OPM, Gafatar), banyaknya aksi terorisme dan radikalisme, merupakan autokritik

terhadap semangat kebangsaan Indonesia kini. Apakah sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini tidak mampu membuat rakyat merasa bangga sebagai bangsa dan negara Indonesia? Rasanya kurang relevan memperkukuh nasionalisme hanya melalui wacana *imagined community* jika sebagian masyarakat masih hidup dalam kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Nasionalisme merupakan konsep yang merujuk kepada bangsa, sebagai entitas sosial dan budaya. Berbicara mengenai bangsa berarti berbicara mengenai segenap elemen, tanpa kecuali. Nasionalisme Indonesia begitu kuat pada masa lalu karena konsepsi bangsa lebih banyak merujuk pada beragam suku di tanah air yang menyatukan tekad dan semangat melawan penjajahan. Konsepsi bangsa hari ini bersifat lebih luas dan terfragmentasi. Ada dikotomi masyarakat timur dan non-timur merujuk pada ketimpangan pembangunan ekonomi.

Ada terminologi kaum kaya dan kaum miskin merujuk pada stratifikasi sosial dan ekonomi di masyarakat. Ada istilah masyarakat urban, rural, perbatasan, terluar, terpencil merujuk pada posisi geografis dan aksesibilitas terhadap sumber daya. Muncul istilah gerakan parlementer dan nonparlementer, penguasa dan masyarakat madani merujuk pada perbedaan pihak yang menjalankan tata politik dan pemerintahan di Tanah Air. Kompleksitas kepentingan dan fragmentasi inilah yang menjadi tantangan saat ini. Penempatan korupsi, terorisme, dan narkoba sebagai musuh bersama dapat menjadi engine of unity segenap elemen bangsa yang berbeda. Nasionalisme Indonesia hari ini juga selyaknya bersifat holistis, *inward looking* dan *outward looking*. Menyitir perkataan Soekarno, nasionalisme dan internasionalisme adalah dua sisi berbeda dari keping yang sama.

Nasionalisme Indonesia harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan. Kontribusi ini memiliki peran ganda bagi penguatan nasionalisme Indonesia. Pertama, kita terhindar dari *Chauvinisme* yang menganggap bangsa sendiri lebih tinggi daripada bangsa lain. Kedua, peran serta di panggung internasional menjadi sarana untuk menyosialisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam empat konsensus bangsa Indonesia.

E. KOMUNISME DI INDONESIA

Lembaran pertama sejarah gerakan komunisme di Indonesia dimulai dengan kedatangan Sneevliet (1883-1942), seorang belanda di nusantara pada tahun 1913. Sneevliet bekerja di salah satu harian di Surabaya yang bernama Soerabajasche Handelsbad sebagai staff redaksi di harian tersebut. Namun tidak lama berada di Surabaya, Sneevliet memutuskan untuk pindah ke Semarang dan bekerja sebagai sekertaris di salah satu maskapai dagang di kota tersebut. Pada saat itu Kota Semarang merupakan pusat organisasi buruh kereta api Vereenigde van Spoor en Tramweg Personnel (VSTP). Pada awalnya Sneevliet di sewa oleh VSTP sebagai propaganda bayaran untuk menyebarkan ajaran yang dianut oleh buruh tersebut. Melalui kesempatan inilah Sneevliet berkenalan dengan massa buruh sekaligus menyebar luaskan doktrin pertentangan kelas yang dianut oleh ideologi komunisme.

Sneevliet sadar betul bahwa keterkaitannya dengan VSTP merupakan sebuah peluang besar untuk menumbuh kembangkan ideologi komunisme di Indonesia. Pada bulan Juli 1914 bersama personil-personil yang tergabung dalam VSTP seperti P. Bersgma, J.A. Brandstedder, W.H. Dekker (pada saat itu menjabat sebagai sekertaris VSTP) mempelopori berdirinya organisasi politik yang bersifat radikal, Indische Sosial Democratische Vereeniging (ISDV) atau Serikat Sosial Demokrat India. ISDV kemudian menerbitkan surat kabar Het Vrije Woord (suara kebebasan) sebagai media propaganda untuk menyebarkan ajaran ajaran komunisme yang menjadi ideologi dari organisasi tersebut. Oleh karena anggota ISDV terbatas dikalangan orang orang Belanda, maka organisasi ini belum dapat menjamah dan mempengaruhi organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam (SI). Usaha ISDV untuk mendatkan simpati rakyat tidak berhasil, karena rakyat ISDV masih menjadi sebuah kesatuan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Sneevliet dan kawan-kawan sadar betul bahwa untuk mendapatkan simpati rakyat, ISDV harus mampu berbaur bersama orang-orang pribumi dan mendekatkan diri dengan kekuatan/pergerakan nasional yang sudah ada sebelumnya. Melalui organisasi buruh yang ada di

Semarang, ISDV melakukan pendekatan dengan Sarekat Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Oemar Said Tjokroaminoto. Sneevliet kemudian memanfaatkan watak anti kolonialisme dan kapitalisme yang dianut dalam SI untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda.

Setelah revolusi Rusia meletus pada tahun 1917 dan dimenangkan oleh kekuatan komunis, watak gerakan ISDV pun semakin radikal dan tak henti-hentinya untuk menyeberluaskan ajaran komunismenya. Para pemimpin ISDV semakin gencar untuk terus melakukan pendekatan diri terhadap para pemimpin SI di Semarang. Di samping itu, Sneevliet dan kawan-kawan juga melakukan propaganda sampai ke lingkungan angkatan perang. Sneevliet terus melakukan ceramah-ceramah politk yang tujuannya adalah menanamkan benih-benih komunisme di lingkungan tersebut. Kegiatan Sneevliet ini sepenuhnya dibantu oleh Branstedder dan van Burink. Atas kerjasama bersama rekan rekannya Sneevliet akhirnya berhasil menggagasi terbentuknya Raad van Matrozen en Mariniers (Dewan Kelasi dan Marinir), suatu organisasi dilingkungan militer yang bersifat radikal revolusioner. Gebrakan yang dilakukan Sneevliet pun diperkuat dengan di terbitkannya koran Soldaten en Mattrozekrant (koran serdadu dan kelasi) dalam lingkungan militer. Isi koran ini selalu diwarnai dengan ide-ide komunisme yang mengedepankan ide-ide perjuangan kelas.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sneevliet ternyata tercium oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada bulan Desember 1918 Pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan untuk mengusir Sneevliet dari Hindia Belanda karena kegiatan yang dilakukannya dianggap mulai mengancam. Pada bulan Desember 1919 rekan Sneevliet Brandstedder juga mengalami hal yang sama diusir oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekalipun Sneevliet dan Brandstedder telah meninggalkan Hindia Belanda (Indonesia) namun usaha yang mereka lakukan selama ini telah menemukan hasillnya. ISDV akhirnya berhasil menyebarkan ajaran-ajaran komunisme di Semarang dan mempengaruhi pimpinan SI Semarang yang pada saat itu dipimpin oleh Semaun dan Darsono.

Setelah mendapatkan dukungan penuh dari SI Semarang, ISDV menjadi semakin kuat dan ajaran komunisme semakin dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 23 Mei 1920, tepatnya di gedung SI Semarang, ISDV sepakat mengganti namanya menjadi Perserikatan Komunis di Indie (PKI). Perubahan nama ini diperuntukan supaya organisasi ini lebih tegas dalam mengedepankan nama komunisme sebagai ideologi dari organisasi mereka selama ini. Semaun dipilih sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Beberapa tokoh ISDV yang orang belanda diangkat sebagai pendamping antara lain Bergsma sebagai sekertaris, Dekker sebagai bendahara dan A. Barrs sebagai salah satu anggotanya. Sekalipun Semaun dan Darsono telah menjadi pimpinan PKI, namun mereka tetap menjadi pimpinan SI Semarang. Hal ini disebabkan karena pada saat itu CSI (Central Sarekat Islam) masih memperbolehkan anggotanya untuk menjadi anggota dari organisasi lain.

1. PKI Sebagai Intrumen Komunis Internasional

Komintern merupakan sebuah wadah bagi perhimpunan partai-partai komunis di dunia. Komitern merupakan organisasi tertinggi bagi partai tertinggi bagi beberapa negara di dunia. Kongres Pertama Komintern dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1919. Dalam kongres pertama ini menghasilkan menghasilkan sebuah bentuk perjuangan yang berskala internasional. Dalam kongres ini juga ditetapkan apa yang menjadi statuta (aturan dasar) dari organisasi tersebut. Badan tertinggi dari Komintern adalah kongres tahunan yang wajib diikuti oleh seluruh anggotanya. Kemudian di bawah kongres ada Komite Eksekutif yang disebut sebagai EKKI (Eksekutif Komite Komunis Internasional). EKKI bertugas untuk memberikan petunjuk dan mengontrol aktivitas dari setiap anggota komintern.

Kongres Komintern yang kedua berlangsung pada tanggal 17 Juli – 7 Agustus 1920 di Moskow. Pada kongres ini lebih menekankan kepada makna propaganda. Setiap anggotanya diwajibkan untuk mendukung gerakan revolusioner di negara jajahan tidak hanya dengan kata-kata semata tetapi harus juga dengan tindakan. Pada kongres ini juga dibentuk sebuah komisi yang mengatasi masalah-masalah Nasional dan Kolonial. Komisi ini dipimpin oleh Lenin dan Sneevliet sebagai

sekertarisnya. Pada kesempatan ini, Sneevliet juga menceritakan tentang pengalamannya di Hindia-Belanda dalam menaburkan benih komunisme di daerah tersebut.

Komintern melakukan kongres ketiganya pada tanggal 22 Juni – 12 Juli 1921 yang dihadiri oleh 98 utusan partai komunis dari beberapa negara di dunia. Pada saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengutus Darsono sebagai wakilnya. Pada kongres kali ini dibahas mengenai struktur, metode dan aksi-aksi dari setiap partai komunis. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 5 Nopember – 5 Desember 1922 Komintern melaksanakan kongresnya yang keempat. Pada saat itu PKI mengirimkan Tan Malaka sebagai wakilnya. Pada kesempatan ini Tan Malaka menyampaikan mengenai keberadaan Pan Islamisme di Hindia-Belanda. Tan Malaka menjelaskan bahwa gerakan Pan Islamisme bukanlah musuh komunis, tetapi harus di dukung keberadaannya karena menganut paham anti-imperialisme dan kapitalisme. Pada kesempatan ini Tan Malaka mengambil contoh pergerakan Sarekat Islam di Jawa yang secara terang-terangan menentang pemerintahan imperialis Hindia Belanda.

Pada Agustus 1924 dilakukan kongres kelima Komintern yang membahas mengenai tugas-tugas dari kongres. Kemudian dirumuskan bahwa kongres bertugas untuk merumuskan secara konkrit yang menjadi kebijakan nasional Komintern dibeberapa negara, terutama di negara-negara jajahan. Dalam kongres juga dibahas mengenai keharusan bagi setiap partai komunis anggota Komintern untuk membentuk organisasi buruh yang secara langsung berada di bawah partai dan mendapat kontrol langsung dari partai tersebut. Salah satu agenda yang dibahas pada saat itu adalah mengenai keberadaan Sarekat Rakyat (SR) dan PKI.

Pelaksanaan-pelaksanaan kongres Komintern yang terjadi dari tahun ke tahun tidak pernah terlewatkan oleh PKI. Hal ini tidak saja dibuktikan dengan hadirnya perwakilan PKI pada kongres tersebut, melainkan juga adanya pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi pada tubuh PKI di dalam kongres Komintern tersebut. Hal ini menunjukan bahwa PKI merupakan bagian dari Komintern dan turut berperan aktif dalam setiap agenda-agenda yang dilakukan oleh

Komintern. Atas dasar penjelasan di ataslah tidak ada lagi keraguan bahwa PKI merupakan salah satu instrumen dari persatuan organisasi komunis terbesar di dunia yang bernama Komintern.

2. Pergolakan Komunis Pra-Kemerdekaan

Pergolakan yang dilakukan PKI pada tahun 1926 merupakan sebuah bukti bahwa apa yang terjadi pada kongres tahun 1924 di Kota Gede, Yogyakarta tidak mendapatkan kesepakatan bersama dari pimpinan-pimpinan PKI pada saat itu. Setelah dilangsungkannya kongres di Yogyakarta tersebut, PKI memerintahkan untuk mengadakan mogok besar-besaran di kalangan para buruh. Hal ini sontak saja membuat pemerintah Hindia Belanda berang melihat ulah PKI tersebut. Pemerintah Hindia kemudian mengambil tindakan tegas terhadap tokoh-tokoh PKI dan semakin memperketat aktivitas mereka. Pada tahun 1925 Darsono diusir keluar Indonesia, Aliarcham dibuang ke Digul, sedangkan Alimin, Musso dan Tan Malaka terpaksa menyingkir ke luar negeri. Sementara tokoh tokoh PKI yang masih bebas seperti Budisutjitro, Sugono, Suprodjo, dan lainnya mengadakan rapat di Prambanan untuk membicarakan keberadaan PKI yang semakin mengancam keberadaannya karena aktivitasnya telah dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada bulan Januari 1926 ternyata beberapa tokoh PKI seperti Alimin, Sanusi, Subakat, Winanta, Musso, Sugono dan Budisutjitro telah berkumpul di Singapura untuk membicarakan keputusan Prambanan. Kemudian mereka memutuskan Alimin untuk menemui Tan Malaka dan membicarakan mengenai keputusan Prambanan tersebut. Pada bulan Maret 1926, keputusan itu diterima oleh Tan Malaka dari Alimin di Manila. Tan Malaka kemudian menilai bahwa keputusan tersebut terlalu tergesa-gesa untuk dilakukan. Ia menilai bahwa pada saat itu PKI belum tepat untuk melakukan pemberontakan, dengan alasan PKI belum solid dan basis massa yang belum sepenuhnya sadar dan revolusioner. Kemudian Tan Malaka menjelaskan bahwa keputusan itu tidak legitimate karena belum dibicarakan dalam Komintern. Tan Malaka menjelaskan bahwa PKI merupakan salah satu anggota Komintern, jadi setiap pergerakan yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dibahas dalam Komintern.

Tan Malaka mengungkapkan ada empat alasan mengapa dia menolak keputusan prambanan tersebut. *Pertama*, Tan Malaka melihat bahwa sebelumnya melakukan sebuah pergolakan hendaknya sebelumnya partai harus dipastikan dalam keadan yang baik. *Kedua*, kekuatan buruh dan tani belum terorganisir dengan baik. *Ketiga*, masih banyak rakyat dan kekuatan lain yang belum terikat dengan PKI. Dan *keempat*, kekuatan imperialis di sekitar Indonesia (Inggris, AS, Prancis) masih terlalu kuat dan bersatu. Dengan kata lain Tan Malaka menolak pemberontakan ini dilakukan. Namun Tan Malaka melihat bahwa Komintern merupakan pihak yang paling mempunyai otoritas dalam hal ini karena PKI merupakan salah satu instrumen Komintern.

Mendengar penolakan yang dilontarkan oleh Tan Malaka tersebut, maka Alimin kembali lagi ke Singapura untuk membahs kembali Keputusan Prambanan tersebut. Sesampainya di Singapura Alimin menceritakan penolakan beserta alasan yang diberikan Tan Malaka kepada tokoh-tokoh PKI di Singapura. Alimin tidak menghiraukan saran dari Tan Malaka dan memutuskan untuk pergi ke Moskow bersama Musso untuk meminta pendapat dari Komintern. Salah satu tokoh PKI Sardjono yang masih tinggal di Singapura mengirim surat kepada Tan Malaka dengan pernyataan menolak saran dari Tan Malaka tersebut dan tetap akan melakukan pemberontakan (Revolusi). Hal ini menjadi tanda bahwa PKI tidak lagi sejalan dengan Tan Malaka. Dan ini menjadi awal lepasnya Tan Malaka dari sebuah partai yang dulu diharapkan dapat menjadi pelopor bagi pembebasan bangsanya dari penjajahan.

Setelah Alimin dan Musso sampai di Moskow mereka langsung mendiskusikan keputusan Prambanan tersebut kepada Stalin dan Trostky. Secara terang-terangan Stalin menolak rencana tersebut karena memang ia menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang tergesa-gesa dan tanpa perhitungan yang matang. Stalin pun memerintahkan mereka kembali ke Indonesia. Musso menolak keputusan Stalin tersebut dan berinisiatif untuk tetap melakukan pemberontakan tersebut. Namun sebelum Musso dan Alimin sampai ke Indonesia pergolakan sudah meletus.

Pada saat subuh dan fajar menyingsing tepatnya tanggal 12 Nopember 1926 PKI melancarkan perampasan gedung telepon dan telegraf di Batavia (Jakarta). Namun pada pagi harinya tentara Belanda berhasil merebut kembali bangunan strategis tersebut, dan dalam waktu sepekan saja pemberontakan 1926 tersebut dapat diakhiri. Jelas saja pemberontakan ini dapat dipatahkan dengan mudah, karena kurang perencanaan yang matang dan musuh masih terlalu kuat. Atas pemberontakan ini, pemerintah Hindia Belanda semakin mengawasi gerak-gerik para tokoh-tokoh komunis dan bahkan Belanda menangkap sebanyak 13.000 aktivis kiri pada saat itu dan menahan sebagian dari mereka sesuai dengan undang-undang yang melarang adanya pemberontakan. Sedangkan tokoh-tokoh PKI menjadi buronan bagi pemerintah Hindia Belanda sehingga banyak dari mereka harus melarikan diri ke luar negeri.

Setelah pemberontakan yang dilakukan PKI pada tahun 1926/1927 gagal, para tokoh tokoh komunis pun semakin rawan keberadaannya di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memerintahkan secara khusus Polisi Pengawasan Politik untuk menangkap para kader PKI. Hal tersebut jelas membuat PKI menjadi tercerai-berai karena mereka selalu mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Para pimpinan PKI pun hanya dapat melakukan pertemuan di luar negeri saja, sehingga kekuatan yang mereka susun tidak terbangun secara optimal.

Kebangkitan PKI mulai terlihat setelah di laksanakannya kongres keenam Komintern pada bulan Agustus 1928 di Moskow. Agenda yang dibahas paada saat itu masih seputar mengenai kegagalan kudeta yang dilakukan di Indonesia. Tokoh tokoh PKI yang hadir pada saaat itu seperti Musso, Tan Malaka dan Semaun mengalami perselisihan sepanjang jalannya kongres. Hal ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai tindakan dari keputusan Prambanan tersebut. Perselisihan ini membuat kepemimpinan di dalam tubuh PKI menjadi terpecah.

Karena telah mencoba untuk melakukan pemberontakan, pemerintah Hindia-Belanda menjadi sangat anti dengan nama komunisme. Gerakan yang dilakukan PKI baru mulai nampak ketika terbentuknya Sarekat Kaum Buruh Indonesia (SKBI). Namun aktivitas mereka

dicurigai, dan beberapa tokoh SKBI ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1932 mereka bangkit kembali dengan membentuk komite persatuan yang di sistemnya lebih dikenal dengan nama Organisasi Sel. Komite ini terus menerus melakukan tuntutan revolusionernya antara lain menuntut pembebasan bagi tahanan-tahanan politik yang selama ini ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 30-an muncul kekuatan baru di dunia yang dipelopori oleh Musolini di Italia dan Hitler di Jerman. Kedua kekutan ini bergerak di bawah bendera yang sama yaitu fasisme. Kekutan fasisme pada saat itu begitu kuat, sehingga Stalin menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki oleh fasisme jauh lebih berbahaya daripada kapitalisme. Untuk itu komunisme mengambil langkah untuk menghentikan sementara perlawaannya terhadap kapitalisme dan sebaliknya justru menggalang kekuatan bersama kaum kapitalis yang anti fasis untuk kemudian melawan kekuatam fasis tersebut. Perubahan sikap ini tidak terlepas dari terpilihnya pimpinan baru komintern yaitu Dimitrov pada tahun 1935.

Komunisme telah mempunyai garis perjuangan yang berbeda, sehingga tokoh komunis yang pada saat itu masih berada di Moskow dikirim pulang ke negaranya masing masing. Musso diperintahkan oleh Komintern untuk pulang ke Indonesia dan menjelaskan perubahan garis perjuangan komunisme tersebut. Pada tahun yang sama, Musso sudah sampai di Surabaya, dan menggalang kekuatan bersama tokoh tokoh PKI yang masih melakukan pergerakan di bawah tanah seperti Sudjono, Pemudji, Sukindar dan lain lain. Musso kemudian membentuk Central Comite (CC) PKI baru pada tahun 1935. Kelompok ini bertugas untuk membina tokoh-tokoh muda menjadi orang yang mempunyai pemikiran revolusioner. Tokoh yang kemudian dapat dijaring oleh kelompok ini adalah Tan Liang Djie dan Mr. Amir Sjarifuddin.

Pergerakan PKI mengalami perubahan sejak kembalinya Musso dari Moskow. Kader kader PKI justru disarankan untuk masuk ke dalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebuah gerakan yang terbentuk pada tahun 1937 dan memiliki azas kooperasi dengan pemerintah

Belanda. Hal ini dikarenakan sikap Gerindo yang dengan tegas anti-fasis sehingga menarik perhatian dari kader-kader PKI. Di dalam Gerindo inilah kemudian kader-kader PKI (terutama kader muda) diberikan pemahaman mendalam mengenai doktrin komunisme. Pemuda pemuda yang terkader pada saat itu antara lain adalah Wikana, D.N. Aidit, Sudisman, Anwar Kadir, Tjugito dan Mr. Joseph.

PKI melihat bahwa kekuatan fasisime telah sampai ke Asia yang di bawah oleh jepang. Jepang mulai menaruh perhatiannya ke Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah pimpinan pemerintah Hindia Belanda. Para tokoh PKI telah melihat situasi tersebut dan memutuskan untuk membentuk gerakan anti fasis (Geraf). Geraf dipimpin langsung oleh Amir Sjarifuddin, Pamudji dan Sukayat dan menempatkan dr. Tjipto Mangunkusumo sebagai dewan penasehatnya. Apa yang telah menjadi kekhawatiran PKI selama ini ternyata menjadi kenyataan. Kekuatan fasis Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menjadi penguasa baru di Indonesia.

Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, Amir Sjarifuddin mulai melakukan perlawanan bersama kelompoknya. Namun gerakan yang dilakukan lebih sering bersifat organisasi bawah tanah. Namun pada Februari 1943 ia bersama 300 anggota kelompoknya berhasil ditangkap oleh Jepang. Amir Sjarifuddin dan pimpinan Geraf lainnya seperti Sukayat, Pamudji, Abdulrachim, dan Abdul Azis dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Jepang. Atas permintahan Soekarno-Hatta hukuman Amir Sjarifuddin diubah menjadi hukuman seumur hidup. Sementara pimpinan Geraf lainnya tetap menjalani hukuman mati.

Memasuki era pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang, gerakan komunisme di Indonesia jelas terang-terangan telah berubah haluan. Komunis yang sebelumnya selalu melakukan perlawanan terhadap kapitalis pemerintah Hindia Belanda kini justru menempatkan Jepang sebagai musuh baru dalam perjuangan politiknya. Hal ini tidak terlepas dari apa yang terjadi di eropa saat itu, dimana Moskow sebagai pusat kekuatan komunis di dunia mulai merasa terancam dengan keberadaan Italia dan Jerman yang bersatu dalam kekuatan fasis. Hal ini membuat Komintern mengambil kebijakan untuk memerintahkan seluruh anggotanya (termasuk PKI) untuk melakukan perlawanan terhadap

fasisme. Bahkan Komunisme menjalin kerjasama dengan kapitalisme yang anti-fasis untuk melawan kekuatan fasisme itu sendiri. Hal ini disebabkan, karena tokoh Komitern di Moskow menganggap bahwa kekuatan fasisme jauh lebih berbahaya dari kekuatan kapitalisme itu sendiri, sehingga perlawanan terhadap fasisime tersebut harus diperoritaskan terlebih dahuluh.

3. Pergolakan Komunis Pasca-Kemerdekaan

Kekalahan Jepang dari tentara sekutu yang diboncengi Belanda telah membawa angin segar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Indonesia secara cermat melihat perang pasifik sebagai sebuah peluang untuk memerdekakan diri. Penarikan pasukan besar besaran yang dilakukan oleh Jepang dari Indonesia sebagai sebuah perlawanan atas serangan Amerika di Jepang telah mengakibatkan melemahnya kekuatan Jepang di Indonesia. Soekrano dan Hatta bersama tokoh-tokoh kebangsaan lainnya serta dukungan dari kalangan pemuda menggagas diproklamsikannya Indonesia menjadi sebuah negara merdeka. Sekalipun awalnya terdapat perbedaan-pendapat di antara pihak pemuda dan Soekarno-Hatta, namun tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi negara Indonesia resmi dikumandangkan. Soekarno dan Hatta pun kemudian ditunjuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pengalihan kekuasaan dari tangan penjajah ke tangan bangsa sendiri membawa keuntungan tersendiri bagi keberadaan komunis di Indonesia. Hal ini dikarenakan semua tahanan politik PKI yang ditahan pada masa penjajahan Jepang secara sendirinya dibebaskan. Pembebasan tahanan tahan politik PKI ini jelas akan membuat kekuatan komunis semakin kuat. Komunis akan kembalai melakukan penggalangan kekuatan melalui eks tahanan PKI di masa penjajahan Jepang tersebut. Salah satu tahanan PKI yang dibebaskan pada saat itu adalah Amir Sjarifuddin. Amir Sjarifuddin dibebaskan dari penjara Malang pada bulan September 1945. Bahkan nama Amir Sjarifuddin masuk kedalam kabinet pemerintahan Indonesia yang pertama sebagai Menteri Penerangan.

Setelah bergulirnya masa kemerdekaan organisasi-organisasi masyarakat mulai tumbuh dimana-mana, namun organisasi pemudahlah yang paling banyak kebeadaannya. Amir Sjarifuddin melakukan konsolidasi terhadap kelompoknya di Surabaya untuk membentuk Angkatan Muda Indonesia (AMI). Organisasi ini terbentuk pada tanggal 20 September 1945 yang dipimpin oleh Roeslan Abdulgani. Pada awalnya organisasi ini sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan komunis. Namun seiring dengan waktu kaderkader komunis mulai menguasai organisasi ini. Amir Sjarifuddin juga mempelopori berdirinya Pemuda Republik Indonesia (PRI). Pada awalnya organisasi ini juga tidak berhaluan komunis, namun kepengurusannya dikuasai oleh Soemarsono, Krissubanu, dan Ruslan Widjasastra yang notabene adalah kelompok dari Amir Sjarifuddin itu sendiri. Dengan adanya PRI ini, kelompok Amir Sjarifuddin secara tidak langsung telah menancapkan kekuatannya di Surabaya.

Dengan begitu banyaknya organisasi pemuda yang tumbuh di awal kemerdekaan, maka muncul sebuah ide untuk menyatukan organisasi kepemudaan kedalam satu wadah organisasi baru yang sifatnya menyeluruh. Pada tanggal 6 Nopember 1945 organisasi-organisasi kepemudaan mengadakan pertemuan di Yogyakarta. Pertemuan ini kemudian menyepakati untuk mengadakan kongres pada tanggal 10-11 Nopember di Yogyakarta. Pada saat itu kongres dihadiri oleh 332 peserta yang menjadi utusan dari 30 organisasi kepemudaan. Chaerul saleh menjadi pimpinan dalam kongres tersebut.

Di dalam arena kongres terdapat tida kekuatan yang mencoba untuk menguasai jalannya kongres. Ketiga kekuatan tersebut adalah kekuatan sosialis yang di komandoi oleh Sutan Sjahrir, kelompok komunis yang dikomandoi oleh Amir Sjarifuddin dan satu lagi adalah kelompok Tan Malaka. Yang perlu disadari adalah bahwa ketiga kelompok ini pada awalnya berasal dari satu kekuatan komunis yang akhirnya terberai karena ketidaksamaan paham diantara sesamanya. Sejalan dengan berlangsungnya kongres, Amir Sjarifuddin menyusun rencana untuk menguasai arena kongres. Kelompok Amir Sjarifuddin akhirnya meleburkan diri dengan kelompok sosialis dan memusikan diri kedalam organisasi baru yaitu Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Dan seperti biasanya, kelompok Amir Sjarifuddin sangat mendominasi

dalam kepengurusan di Pesindo tersebut. Karena kondisi tersebut kelompok Sjahrir berusaha untuk menarik diri dari aliansi Pesindo tersebut. Namun hanya sedikit yang mau meninggalkan Pesindo sedangkan yang lainnya lebih memilih untuk bertahan.

Komunisme tidak hanya menggunakan pemuda sebagai upaya terhdap penggalangan kekuatan mereka. Mereka juga menaruh perhatiannya terhadap kelompok buruh. Dalam ajaran komunisme, buruh merupakan kekuatan pokok dalam melakukan sebuah revolusi. Setiap partai komunis diwajibkan untuk mengagasi dan membina terbentuknay organisasi buruh. Seteleh Indonesia merdeka, muncul organisasi buruh yang bernama Barisan Buruh Indonesia (BBI). Organisasi BBI tersebut dibentuk di Jakarta dipimpin oleh Koesnaini. Pada tanggal 6 September 1945 terjadi pergantian pimpinan di dalam tubuh BBI, yaitu dari Koesnaini kepada Nyono.

Nyono kemudian menemui menteri sosial saat itu Koesoemasoemantri untuk meminta supaya KNI mengakui BBI sebagai satu satunya organisasi buruh. Koesoemasoemantri kemudian menyarankan agar dilakukan sebuah pertemuan akbar untuk menyatukan pendapat danatara semua anggota BBI dan menetapkan Surabaya sebagai temapat berlangsungnya pertemuan tersebut. Namun hal ini ditolak oleh BBI Jakarta karena menganggap bahwa Jakarta adalah pusat dari sebuah organisasi sehingga pertemuan tersebut harus dilaksanakan di kota mereka. BBI Surabaya yang diwakili oleh Trspirin mengangap bahwa Surabya lebih layak untuk menggelar pertemuan tersebut. Untuk mengindari perselisihan yang sudah timbul diawal ini maka diambil jalan tengah dengan mengadakan pertemuan tersebut di Surakarta yang direncanakan berlangsung pada tanggal 7-9 Nopember 1945. Karena pertemuan tersebut bersifat nasional, maka nama pertemuan tersebut diubah menjadi kongres yang dihadiri oleh kurang lebih 3.000 peserta dari 817 utusan seluruh Jawa. Sementara dari organisasi buruh Sumatera diwakili oleh 5 orang utusan.

Agenda utama yang dibahas dalam kongres tersebut adalah mengenai arah perjuangan buruh setelah Indonesia merdeka. Pada saat itu ada dua kelompok yang berusaha untuk mempertahankan argumennya di arena kongres. Kelompok pertama adalah perwakilan dari Jawa Timur

yang mengutus Sjamsoe Harja-Oedaja (Ketua BBI Surabya) sebagai juru bicara mereka. Ia mengatakan bahwa tujuan utama dari perjuangan buruh yang sebenarnya adalah untuk mengisolisir seluruh perusahan yang dianggap vital menjadi kepemilikan rakyat seluruhnya. Oleh sebab itu garis perjuangan organisasi buruh harus diperjelas. Ia juga mengusulkan untuk membentuk suatu partai politik yang bernama Partai Boeroeh Indonesia (PBI) dan membubarkan BBI.

Sementara kelompok yang satu lagi yaitu kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nyono. Nyono menjelaskan bahwa tujuan perjuangan buruh haruslah sejalan dengan afiliasi diantara kekuatan komunis dan sosialis. Ia juga menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar perjuangan buruh adalah front persatuan dengan menentang penjajahan dan memberikan bantuan ekonomi kepada buruh. Dan dia juga tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sjamsoe Harja-Oedaja yaitu untuk membubarkan BBI. Namun kongres ternyata lebih menerima saran yang dianjurkan oleh Sjamsoe Harja-Oedaja yang berarti membentuk PBI dan membubarkab BBI. Sampai pada akhirnya kongres, masalah setuju tidaknya BBI dibubarkan masih menjadi agenda panas pembahasan. Apa yang terjadi pada kongres buruh tersebut tidaklah jauh berbeda dari apa yang terjadi pada kongres organisasi pemuda yang telah dijelaskan sebelumnya. Arena kongres selalu diwarnai dengan pertarungan dari dua kekuatan, yaitu kekuatan dari kelompok sosialis/ komunis (Nyono) dan kekuatan kelompok Tan Malaka (Sjamsoe Harja Oedaja).

Kongres pertama PBI dilangsungkan pada 15 Desember 1945 di Yogyakarta yang dihadiri oleh 28 utusan dari 19 cabang. Pembahsan yang paling menonjol berkisar pada kedudukan buruh dan tani. Sjamsoe Harja Oedaja mengangap bahwa kekuatan tani harus dileburkan kedalam PBI, sementara Wijono Soerjoekoesumo (peninjau kongres) menolak pendapat dari Sjamsoe Harja Oedaja tersebut. Wijono melihat bahwa kelomok tani bukanlah organisasi politik, dan lagi pula tani telah mempunyai organisasinya sendiri yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI). Kongres BTI telah menyatakan bahwa buruh dan tani merupakan dua kelompok sosial yang berbeda oleh sebab itu BTI mengecam jika kaum tani berusaha dileburkan kedalam PBI.

Setelah kongres selesai dilaksanakan, maka timbul sebuah pergolakan didalam tubuh PBI, mereka adalah kelompok yang menolak dibubarkannya BBI yang di komandoi oleh Nyono. Karena desakan yang diterima begitu kuat, maka pada awal tahun 1946 BBI di hidupkan kembali keberadaannya namun statusnya sebagai asosiasi sarekat buruh. Sejalan dengan perkembangannya, BBI berganti nama menjadi Gabungan Sarekat Buruh Indonesia (GASBI). Untuk menyusun kepengurusan dari Gasbi tersebut, maka diadakanlah sebuah konfrensi oleh PBI pada tanggal 21 Mei 1946 di Madiun. Konfrensi itu akhirnya memutuskan Sjamsoe Harja Oedaja (ketua PBI) sebagai ketua Gasbi. Namun Gasbi tidak hanya terdiri atas organisasi organisasi buruh saja, melainkan juga terbuka bagi organisasi Polisi, tentara dan pegawai negeri.

Pergerakan komunisme diawal kemerdekaan berkisar mengenai usaha ideologi ini untuk menggalang kekuatan kembali pasca zaman penjajahan. Penggalangan kekuatan di konsolidasikan pada golongan golongan pemuda, buruh, tani dan pekerja pekerja lainnya. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali kekutan komunis setelah sebelumnya di bantai oleh pemerintahan penjajahan Belanda dan Jepang. Di awal masa kemerdekaan, ideologi ini dapat disebarkan dengan begitu bebas karena tidak mendapat pengawasan seperti yang telah dialami pada masa penjajahan sebelumnya.

Kejatuhan kabinet Amir Sjarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948 menandai bahwa kekuatan komunis mulai mendapat ancaman serius dari musuh musuh politiknya. Kelompok sayap kiri tidak mendapat tempat dalam komposisi pemerintahan yang formatur kabinetnya dipegang langsung oleh Hatta. Dengan situasi ini, Amir Sjarifuddin dan kelompoknya menyatakan sikap oposisi terhadap pemerintah. Pada tanggal 26 Februari 1948, Amir Sjarifuddin membentuk sebuah organisasi yang bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Solo.

Pada tanggal 10 Agustus 1948 Musso datang ke Indonesia setelah sebelumnya telah lama bermukim di Moskow. Musso menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk mengkoreksi pergerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Kehadiran Musso merupakan sebuah perintah yang dilakukan oleh komintern. Musso

melihat bahwa PKI harus mengganti sifat revolusinya yang selama ini defensif menjadi lebih ofensif. Tidak lama kemudian Musso langsung mengambil alih kepemimpinan PKI yang sebelumnya dipegang oleh Sardjono.

Polit Biro CC PKI pada tanggal 24 Agustus 1948 mengumumkan untuk membentuk satu partai kelas buruh. CC PKI kemudian mengusulkan untuk memfusikan komponen komponen yang selama ini tergabung dalam FDR yaitu PKI, Partai Sosialis dan PBI kedalam satu partai buruh yang memakai nama PKI. Dalalam perkembangan selanjutnya, Partai Buruh juga meleburkan diri kedalam PKI tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1948. FDR kemudian menyusun kepengurusannya yang sepenuhnya diambil alih PKI. Dengan begitu gerakan yang dilakukan oleh FDR murni menjadi gerakan yang dikendalikan oleh PKI. Kehadiran Musso jelas membawa angin segar bagi aktivitas PKI di Indonesia.

Pada tanggal 10 September 2008 diadakan rapat besar di Madiun yang dihadiri oleh Musso dan Amir Sjarifuddin. Setelah rapat besar ini selesai di gelar, kota Madiun lama kelamaan makin ramai oleh orang orang yang tidak dikenal. Terjadi penculikan dimana mana sehingga kondisi ini membuat warga semakin ketakutan karena situasi yang sangat mengancam. Tempat tempat sentral seperti pasar, sekolah sekolah, stasiun kereta api lambat laun berhasil dikuasi oleh kekuatan PKI. Bahkan kepala kepolisian kerseidenan Madiun Komisatis besar Sunaryo tidak luput dari aksi penculkan tersebut. Dengan lain kekuatan PKI telah begitu dominan menguasai Madiun.

Pada tanggal 18 september 1948 dini hari terdengar letusan letusan senjata di Madiun yang menandai bahwa gerakan telah dimulai. Sasaran utama yang menjadi serangan kelompok PKI adalah rumah residen Madiun, Samadikun. Karesidenan pun di kepung oleh pasukan PKI dan menangkap semua orang yang ada didalmnya. Namun kebetulan pada saat itu residen Samadikun sedang tidak ada di kediamannya. Setelah semua orang dalam karasidenan dapat dikuasai maka bersamaan dengan itu Soemarsono dan Supardi memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan membentuk Pemerintahan Front Nasional. Dengan begitu

Pemerintahan Front Nasional akan menjadi tandingan bagi Pemerintahan Republik Indonesia.

Aksi PKI di Madiun tersebut tidak sepenuhnya mendapat sambutan hangat dari warga Madiun. Kelompok pelajar di Madiun bahkan secara terang terangan mengambil sikap yang bersebrangan dengan apa yang telah dilakukan PKI tersebut. Namun PKI mengambil tindakan tegas atas setiap tindakan yang menentang Pemerintahan Front Persatuan yang telah mereka bentuk. Karena bagi mereka Pemerintahan Front Persatuan adalah satu satunya pemerintahan yang harus diakui keberadaannya. Kondisi jelas semakin membuat PKI yakin bahwa mereka telah benar-benar menguasai Madiun.

Pada desember 1948 pasukan pemerintahan Indonesia merencanakan serangan ke keresidenan Madiun tempat para pimpinan PKI. Penyerangan ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto yang notabene adalah Pati Solo-Madiun. Pada tanggal 4 Desember 1948 Musso dan Sjarifuddin tewas tertembak, pasukan rakyat dan TNI pun berhasil kembali menduduki kota Madiun. Tokoh tokoh PKI lainnya seperti Alimin, D.N. Aidit, Nyoto, Soemarsono, Tan Ling Djie dan lain lain memilih untuk melarikan diri. Karena aksi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun ini bersamaan dengan adanya aksi militer Belanda kedua, maka pengejaran terhadap tokoh tokoh Komunis yang masih tersisa menjadi terbengkalai.

BAB V

Kekuasaan Kapital Tingkat Lokal (Sumatera Timur)

A. PASAR MODAL

Jauh sebelum Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Sumatera Timur terlebih dahulu hadir sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Hindia-Belanda pada masa kolonial. Kehadiran perkebunan tembakau mewarnai situasi ekonomi kolonial yang menjadi tumpuan terbesar di luar Pulau Jawa. Sumatera Timur lebih dikenal sebagai Dollar Land atau tanah dolar karena perkembangan perkebunan yang signifikan mengubah berbagai tatanan di Sumatera Timur, baik itu alamnya, budaya, juga struktur masyarakat. Semua ini disebabkan tumbuhnya pasar modal yang membangun perekonomian Sumatera Timur menjadi kuat dan besar di luar Pulau Jawa.

Sebelum masuknya perkebunan di wilayah ini, Sumatera Timur merupakan sebuah wilayah dataran rendah yang ditumbuhi hutan belantara. Cakupan wilayah yang dikenal sebagai Sumatera Timur menjulur dari daratan pantai di wilayah timur pulau Sumatera hingga ke daratan berbukit-bukit mulai dari Kabupaten Aceh Timur, Langkat, Deli Serdang, Asahan, sampai dengan daerah Labuhan Batu, sepanjang 280 km dari barat laut ke tenggara. Lebar daratan di sebelah utara rata-

rata adalah 30 km, dan lebar daratan di sebelah selatan kira-kira 100 km (Husny, 1978: 25).

Saat itu Deli memiliki banyak tanah kosong, luas, dan tidak diolah. Penduduk Deli tinggal di kampung-kampung sederhana. Rumah-rumah mereka terbuat dari gubuk kayu, beratap rumbia dan nipah. Pakaian penduduknya kotor dan lusuh. Walaupun demikian Deli memiliki tanah yang subur, untuk itu hampir sebagian besar penduduknya mengandalkan bidang pertanian sebagai mata pencaharian pokok.

Penduduk di Sumatera Timur sampai pertengahan abad ke-18 terdiri atas berbagai kelompok etnis dengan pola budaya yang berbeda. Penduduk yang menempati wilayah Sumatera Timur di antaranya adalah suku Melayu, Batak, Jawa, Aceh, Minangkabau, Orang-orang Cina, Eropa, dan lain sebagainya. Di antara suku-suku tersebut orang-orang Melayu dan Batak dapat dikatakan merupakan penduduk asli Sumatera Timur, sedangkan suku-suku lainnya merupakan kelompok-kelompok pendatang. Orang Melayu menurut Lah Husny adalah penduduk suku bangsa Melayu yang berdiam di dataran rendah atau pantai Sumatera Timur dan daerah pantai lainnya yang dinamakan juga Melayu Pesisir. Mereka yang disebut orang Melayu Pesisir Sumatera Timur di Tanah Deli ini adalah turunan campuran antara orang

Melayu yang ada di daerah tersebut dengan suku bangsa Melayu yang datang dari Johor, Melaka, Riau dan suku bangsa Aceh. Etnis yang mendiami Sumatera Timur berasal dari beberapa daerah, di antaranya adalah Melayu Langkat, Deli, Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu. Mereka banyak mendiami daerah di sepanjang pantai timur Sumatera. Sementara etnis Batak yang berada di daerah tersebut berasal dari wilayah pedalaman seperti Batak Karo dan Simalungun pada umumnya mendiami daerah di perbukitan di sebelah barat Sumatera Timur. Masyarakat tradisional Batak Simalungun secara politik dapat dibagi menjadi tujuh kerajaan kecil yaitu Siantar, Tanah Jawa, Panei, Dolok, Raja Panai, dan Silimaluta. Sistem kekerabatan orang-orang Batak Simalungun sama dengan kelompok-kelompok Batak lainnya dengan penekanan pada marga.

Dalam segi administrasi kolonial, Sumatera Timur merupakan sebuah keresidenan yang terdiri dari empat afdeeling, yakni Langkat, Deli dan Serdang, Asahan, Simalungun dan Karo yang masing-masing dipimpin oleh Asisten Residen. Keempat Asisten residen tersebut tunduk pada kekuasaan Residen. Sebelumnya, Keresidenan Sumatera Timur beribukota di Bengkalis, namun pada 1887 ibukota Keresidenan dipindahkan ke Medan terkait dengan perkembangan perkebunan yang berada di Sumatera Timur.

Selanjutnya, wilayah *afdeeling* terbagi ke dalam *onder-afdeeling* yang masing-masing dikepalai oleh seorang kontrolir. Wilayah *onder-afdeeling* dibagi lagi atas distrik-distrik di bawah kuasa ajudan distrik atau demang. Wilayah pemerintahan terendah disebut dengan onder-distrik atau negeri yang diperintah oleh kepala negeri. Mulai dari daerah distrik hingga jaluran yang berada di bawahnya, pemerintah Belanda menempatkan tenaga-tenaga pribumi sebagai kepala pemerintahan atau dikenal sebagai *Inlandse Bestuur Ambtenaren* (pegawai pemerintah pribumi). Sementara untuk jabatan kontrolir ke atas dipegang oleh orang-orang Belanda atau *Europese Bestuur Ambtenaren* (pegawai pemerintah Eropa).

Sebelum pengusaha-pengusaha Barat datang untuk membuka lahan perkebunan, tanah vulkanik di sekitar Sumatera Timur yang subur telah dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah sekitarnya, yaitu Batak Karo dan Melayu untuk menanam padi, cabai, dan tembakau secara berselang-seling. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang dilakukan secara berhuma, yaitu bercocok tanam dengan cara berladang di hutan-hutan. Petani-petani ladang telah melakukan pembukaan dan pembakaran hutan pada musim kering yang akan digunakan menanam umbi-umbian, sayur-mayur, tebu, dan pisang. Pada musim hujan berikutnya, lahan tersebut akan digunakan untuk menanam padi. Setelah penduduk mengenal tanaman lada, mereka memadukannya dengan sistem pertanian tradisional yaitu menanam lada secara berselang-seling di antara tanaman ubi-ubian dan padi.

Kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Timur sebelum kedatangan bangsa asing yaitu mereka telah melakukan

usaha eksporimpor secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lah Husny dalam tulisannya mengatakan bahwa perdagangan di Sumatera Timur khususnya wilayah Deli bersifat terbuka; penduduk menanam selain untuk keperluan sendiri, juga untuk perdagangan, bukan saja untuk dalam negeri, juga untuk luar negeri. Penduduk Sumatera Timur pada 1862 saat itu telah mengekspor bahan-bahan seperti: lada, beras, emas dari Bahorok, ikan kering, kacu (gambir), berbagai jenis minyak, keris lurus bermata dua belah, gading, sumbu badak, tembakau, kapur barus, hasil hutan, dan biji timah. Sedangkan barang-barang yang diimpor adalah tekstil kasar dan halus, candu, mesiu senapan, barang pecah belah dan barang-barang kelontong. Candu, mesiu dan senapan disalurkan ke pedalaman di tanah Karo.

Inggris merupakan bangsa Eropa pertama yang memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kawasan pantai Timur Sumatera sebelum Belanda. Produksi lada dari kawasan Sumatera Timur menjadi sumber barang impor yang sangat penting. Begitu juga dengan barang-barang ekspor Penang yang menjadikan kawasan pantai Timur Sumatera sebagai pasar yang strategis. Keseriusan Inggris dalam menjajaki kawasan Pantai Timur Sumatera tersebut terlihat dengan mengirimkan John Anderson pada bulan Desember 1822 hingga April 1823 untuk menyelidiki dan menghimpun berbagai informasi tentang kawasan Pantai Timur Sumatera. Hasil perjalanannya tersebut ia tuliskan menjadi sebuah buku yang sangat terkenal yakni "Mission To The East Coast of Sumatra" (Misi Perjalanan ke Pantai Timur Sumatra).

Mengenai budidaya tembakau oleh masyarakat Sumatera Timur, dalam laporan perjalanannya itu, John Anderson melihat bahwa penanaman tembakau telah dilakukan oleh penduduk Sumatera Timur, namun hanya dalam skala kecil. Menurutnya, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk Sumatera Timur, bukan lah merupakan perdagangan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi hanya bersifat subsisten untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penanaman tembakau secara kecil-kecilan ini dilakukan oleh orang-orang Melayu dan Batak dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan cara menyebarkan bibit di dalam kebun yang kecil. Dan setelah

20 hari baru dipindahkan ke kebun yang lebih luas, lalu kemudian baru ditanam dengan jarak kira-kira dua meter setiap baris. Setelah berumur dua bulan daunnya dikurangi agar pertumbuhannya menjadi lebih baik. Lalu setelah batangnya besar, penduduk mengambil 1-2 helai daun setiap saat yang menurut mereka daunnya hampir masak. Daun-daun ini kemudian dijemur selama empat hari, setelah itu baru dimasukkan ke dalam keranjang-keranjang kecil dan dijual.

1. Perkebunan Tembakau Sebagai Pusat Ekonomi Sumatera Timur

Wilayah Sumatera Timur sebelumnya didominasi oleh hutan belantara, namun dalam beberapa dekade, terbukti wilayah Sumatera Timur berubah menjadi salah satu daerah penghasil komoditi ekspor tembakau terpenting di Hindia Belanda. Hal tersebut juga didukung oleh adanya Selat Malaka sebagai jalur ekonomi yang strategis menghubungkan Asia-Eropa. Daerah-daerah yang berada di sepanjang Pesisir Pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya menjadi incaran para pengusaha Eropa untuk mengembangkan tanaman komoditas yang tengah laku di pasaran dunia.

Selain itu mutu tanah yang berada di Sumatera Timur memiliki prospek untuk penanaman tembakau yang bernilai tinggi. Daerah Sumatera Timur, terutama Deli, baik di dataran rendah maupun di bukit-bukit, memiliki kondisi tanah yang sangat subur. Kesuburan ini dipengaruhi oleh endapan lumpur yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi dari Bukit Barisan. Daerah Deli tidak pernah mengalami musim kering yang terlalu panjang dan juga tidak pernah mengenal musim hujan yang terlalu panjang. Musim hujan di Deli dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari. Sementara itu di musim kemarau masih ada juga curah hujan yang turun. Kondisi ini yang menyebabkan tanah di Deli menjadi subur dan sangat cocok untuk usaha perkebunan. Para pengusaha perkebunan sangat menaruh perhatian kepada mutu tanah dalam mempertimbangkan lahan untuk dikembangkan. Selama bertahun-tahun pengusaha-pengusaha perkebunan membedakan mutu tanah di Sumatera Timur, untuk menentukan lahan mana yang

cocok ditanami tembakau sehingga dapat menghasilkan tembakau yang bermutu tinggi.

Budidaya tembakau dalam skala besar untuk pertama kalinya dilakukan pada 1863 oleh seorang saudagar Arab bernama Syaid Abdullah Ibn Umar Bilsagih. Namun karena kekurangan modal, ia mengajak saudagar-saudagar Belanda untuk membeli tanah kemudian menanami dengan tembakau di daerah Deli. Ia yakin apabila terdapat saudagar yang menanamkan modalnya di Deli, maka saudagar itu akan mengapatkan keuntungan yang besar dan usahanya akan maju. Untuk itu ia datang ke Jawa dengan tujuan menemui beberapa pedagang tembakau Belanda. Di hadapan pedagang-pedagang tembakau ini Sayid mempromosikan hasil bumi dari Deli yang di antaranya adalah lada dan tembakau dengan kualitas terbaik. Ia berkata bahwa Deli menghasilkan ekspor lada dan tembakau sebanyak 30.000 pikul pertahun dan tanah untuk bertanam disediakan oleh Sultan Deli.

Berita tersebut terdengar ke seorang Belanda bernama Jacobus Nienhuys datang ke wilayah Deli atas usulan Sayid Abdullah ketika ia berkunjung ke Jawa pada 1863. Kemudian diutuslah Nienhuys oleh Firma van Leeuwen en Maintz & Co selaku agen dari pembeli tembakau van den Arend untuk berangkat ke Deli. Dengan menggunakan sebuah kapal carteran, ia tiba di Kuala Deli pada Juli 1863. Di Deli, Nienhuys datang menemui Sultan Deli untuk mengutarakan keinginannya membuka perkebunan tembakau di tanah Deli.

Saat itu Sultan langsung menyetujui usulan tersebut dan memberikan sejumlah tanah kepada Nienhuys. Pada 1864 Sultan Deli memberikan Nienhuys tanah sebanyak yang dia inginkan tanpa meminta uang sewa untuk ditanami tembakau. Nienhuys memperoleh tanah seluas 4000 bau. Nienhuys yang telah berpengalaman banyak dalam urusan menanam tembakau mulai melakukan percobaan penanaman tembakau di Kampung Martubung. Kondisi tanah dan iklim di Deli menurutnya sangat cocok untuk penanaman tembakau. Nienhuys kemudian memutuskan untuk menanam tembakau secara mandiri setelah mendapatkan konsesi dari Sultan Deli. Dalam konsesi itu Sultan juga menghendaki agar penduduk dari tiap-tiap wilayah yang

tanahnya ditanami tembakau masih diizinkan untuk menanam padi setelah panen tembakau.

Pemberian konsesi tanah merupakan sumber pemasukan yang penting bagi elite pribumi yang kadang-kadang para pejabat rendahan pun meminta imbalan atas kerja sama itu. Mula-mula pengusaha perkebunan mendatangi orang yang paling berpengaruh di wilayah itu seperti pejabat-pejabat kesultanan untuk meminta bantuan menjadi perantara dalam berhubungan dengan Sultan. Dalam hal ini para pengusaha perkebunan memberi uang pelicin dengan janji uang akan ditambah apabila kontrak tanah telah diperoleh. Setelah ada kesepakatan antara pengusaha perkebunan dan para pejabat kesultanan barulah pengusaha perkebunan membuat janji bertemi dengan Sultan.

Pembukaan perkebunan dimungkinkan apabila Sultan memberikan hak konsesi pengusahaan tanah atas kesepakatan. Akan tetapi pada kenyataannya, pembukaan perkebunan itu hanya melibatkan pengusaha perkebunan dan pihak Sultan, tanpa musyawarah dengan para pemuka masyarakat terutama kepala kampung di wilayah yang akan dijadikan perkebunan. Konsesi ini mengabaikan kedudukan dan hak-hak anggota masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat, khususnya tanah-tanah yang bukan milik Sultan. Hal ini dilakukan karena menurut pendapat Sultan, bahwa seluruh tanah-tanah tersebut adalah milik Sultan, dan Sultan berhak memberikan tanah-tanah itu kepada siapa saja yang dianggapnya mampu memberikan sebagian hasilnya kepada Sultan.

Berkat kualitas tembakau terbaik yang dimiliki keresidenan ini, dalam jangka waktu sepuluh tahun, Keresidenan Sumatera Timur menjadi terkenal di dunia sebagai penghasil ekspor 1/3 dari total ekspor yang dilakukan di seluruh Hindia Belanda. Menurut Pelzer pada periode menjelang 1920-an, perkebunan di Sumatera Timur telah mencapai luas yang mencengangkan. Mulai dari pusatnya di dekat Medan, perkebunan itu terhampar dalam rangkaian yang tak terputus-putus sepanjang 100 kilometer jaraknya ke arah timur-laut berbatasan dengan Aceh; kemudian 100 kilometer lagi jauhnya ke arah selatan ke bukit-

bukit di balik kota Pematang Siantar; serta lebih dari 200 kolimeter ke arah tenggara ke dataran tinggi di sekitar Prapat, di daerah Asahan.

Konsekuensi dari perkembangan perkebunan yang masif adalah kebutuhan yang besar tenaga kerja untuk mengolah perkebunan tersebut. Tenaga yang dipekerjakan untuk mengolah perkebunan adalah para buruh. Para buruh ini merupakan faktor penting yang turut berperan dalam ekspansi ekonomi di sektor perkebunan di Sumatera Timur. Berhasil atau tidaknya suatu perkebunan, amat dipengaruhi oleh faktor buruh dalam pengelolaannya.

Untuk itu, para pengusaha perkebunan berusaha untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah Deli, antara lain tenaga kerja dari Cina dan Jawa. Tatkala Nienhuys mendirikan Deli Maatschappij dan mulai mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil berjualan tembakau, maka kebutuhan akan tenaga kerja menjadi semakin besar, terutama sekali ditujukan untuk ekspansi areal perkebunan tersebut. Atas usul T.J. Cremer, kebutuhan awal akan tenaga kerja kuli ini diatasi dengan mendatangkan tenaga kerja Cina yang bermukim di Penang. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa pekerja kuli Cina lebih giat dan tekun.

Pengadaan tenaga kerja yang berasal dari luar Sumatera Timur dilakukan karena masyarakat lokal tidak bersedia untuk bekerja di perkebunan. Mereka tidak tertarik untuk menjadi buruh karena mereka telah mempunyai sumber kehidupan dari tanah-tanah yang mereka miliki. Selain itu juga, para pengusaha perkebunan lebih senang untuk mendatangkan buruh asal Cina –yang didatangkan via Penang dan Singapura – serta buruh dari Jawa ketimbang tenaga kerja yang berasal dari penduduk sekitar. Mereka menggambarkan bahwa penduduk lokal – Batak dan Melayu – memiliki sifat pemalas. Oleh karena sifat pemalas ini yang membuat buruh Cina dan Jawa lebih digemari untuk dipekerjakan daripada penduduk sekitar.

Buruh yang didatangkan ke perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur ini diikat dengan sistem kontrak kerja selama tiga tahun. Biaya transportasi dan tempat tinggal ditanggung oleh penguasaha perkebunan. Setelah masa kontrak selesai, sang buruh boleh kembali ke daerah asalnya atas biaya sang majikan. Buruh-buruh tersebut diperoleh melalui agen-agen perusaha perkebunan di daerah asal

mereka. Pada awalnya, buruh Cina diperoleh melalui agen-agen yang terikat dalam sistem kongsi di Semenanjung Malaya dan Singapura. Lalu pada perkembangannya, buruh-buruh Cina diperoleh melalui agen-agen *Deli Planters Vereeniging* (Perkumpulan Pengusaha Perkebunan Deli) di Jawa dengan sebutan werek. Dalam mencari calon buruh yang mau dilakukan dengan berbagai cara, tidak jarang para agen ini melakukan perekrutan dengan cara membujuk dan menipu calon buruh yang diincarnya.

Buruh-buruh yang telah berhasil didatangkan itu harus membuat ikatan kerja dengan perkebunan, atau yang biasa disebut kontrak. Sistem kontrak inilah yang menjamin buruh-buruh itu tidak melarikan diri sebelum kontrak kerja mereka berakhir. Apabila mereka melarikan diri sebelum kontraknya habis, tentu saja pihak pengusaha akan mengalami kerugian besar. Pada 1880, suatu peraturan dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia belanda untuk memberikan jaminan kepada penguasa bahwa buruh-buruh mereka tidak akan kabur.

Peraturan ini dikenal dengan nama *Koeli Ordonantie*. Di dalam ketentuan itu di antaranya disebutkan bahwa siapa pun yang berusaha melarikan diri akan ditangkap polisi dan akan dibawa kembali ke perkebunan. Apabila melawan, mereka akan diangkut secara paksa dan akan mendapat berbagai hukuman, dalam contoh kerja paksa atau perpanjangan masa kontrak sepihak.

Sejak 1889, perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau di Deli memasukkan sekitar 7.000 orang pekerja pertahun, dan berdasarkan kontrak kerja yang dibuat, sampai tahun 1930 jumlah kuli-kuli Cina telah berjumlah sekira setengah juta jiwa. Jumlah yang banyak ini dimungkinkan karena menurut para pengusaha perkebunan, buruh Cina merupakan tenaga kerja terbaik untuk menghasilkan tembakau kualitas tinggi, sehingga akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi para pengusaha.

Kedatangan buruh Cina di Sumatera Timur seperti membawa berkah terselubung bagi para pengusaha kebun. Bukan saja karena mereka pekerja yang cekatan, namun juga hemat. Ketika mereka berhenti sebagai seorang “kuli kebon”, mereka menyewa sebagian tanah kosong di perkebunan untuk menanam sayuran dan memelihara babi yang

diperlukan oleh orang-orang Eropa. Sementara sebagian lagi dari mereka membuka toko-toko kelontong untuk keperluan sehari-hari buruh-buruh yang lain. Dari usahanya itu, perlahan-lahan ekonomi mereka mulai meningkat. Bagi mereka yang ekonominya telah meningkat, mereka lalu meminjam kredit dari perhimpunan mereka yang disebut "Gihin". Dari kredit tersebut mereka lalu membuka toko besar di kota dan menjadi agen impor barang-barang asing untuk masuk ke Sumatera Timur.

Selain buruh asal Cina, para pengusaha perkebunan juga mendatangkan buruh asal Jawa. Pengadaan buruh asal Jawa ini dengan alasan pekerja-pekerja dari Jawa dianggap rajin dan tahan bekerja. Para pengusaha perkebunan tembakau Sumatera Timur sudah mengetahui bahwa para pekerja Jawa adalah pekerja-pekerja yang memiliki keterampilan dalam bidang pertanian yang cukup tinggi sehingga mereka mudah menyesuaikan diri dengan kerja di perkebunan.

Pada mulanya buruh Cina dianggap kuli yang ulet bekerja dan mudah didapat di Semenanjung Malaka, serta ongkos mendatangkannya murah. Namun dengan banyaknya buruh Jawa yang ada di perkebunan tembakau dapat dilihat bahwa buruh Jawa juga merupakan tenaga kerja yang dapat diandalkan sama seperti buruh Cina. Hal ini dapat dilihat bahwa pada 1883 jumlah buruh Cina sebesar 21.136 orang sedangkan buruh Jawa hanya sebanyak 1.711. Begitu juga sepuluh tahun kemudian, yakni pada 1893, buruh Cina bertambah hampir dua kali lipat, tetapi buruh Jawa berjumlah 18.000. Walaupun hanya berjumlah 18.000 orang, tetapi kenaikannya secara presentase jauh melebihi kenaikan buruh Cina yang mencapai 97,3%, sedangkan kenaikan jumlah buruh Jawa mencapai angka yang fantastis, yaitu hingga sepuluh kali lipat.

2. Kapitalisasi Ekonomi Sumatera Timur

Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan kebijakan politik pintu terbuka dengan memperbolehkan pengusaha dan modal dari berbagai bangsa masuk ke Hindia Belanda.23 Pemberlakukan kebijakan ini menandai dimulainya era liberal dan ekonomi kapitalistik di Hindia Belanda. Di

mana perusahaan yang ada ditandai dengan sifatnya yang padat modal, penggunaan areal pertanahan yang luas, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur dan organisasi kerja yang rapi dan lain sebagainya.

Sebelum tahun 1800, bentuk kerja di perkebunan dilakukan untuk konsumsi sendiri (tidak untuk mendapatkan upah) atau sebab-sebab lain. Dalam bentuk kerja tidak berupah ini, jenis kerja berkebun waktu itu muncul di dalam masyarakat dalam bentuk kerja wajib untuk kalangan elite setempat, kerja karena terlibat utang yang harus dilunasi dengan bekerja mengabdi pada si pemberi utang, dan dalam bentuk perbudakan. Setelah dibukanya praktik ekonomi liberal di Hindia Belanda, terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola perkebunan, terutama sekali sejak berlakunya Undang-Undang Agraria 1870, maka perusahaan swasta telah diberikan wewenang penuh untuk mengontrol dan memonopoli sistem ekonominya sendiri dengan sedikit sekali kontrol dari pemerintah.

Kapitalisasi dan penggunaan uang masuk ke Indonesia ketika pada abad ke-19 Raffles mulai memasyarakatkan penggunaan uang sebagai imbalan pekerjaan di kalangan masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan pada masa sebelumnya peredaran uang sangat terbatas, yakni pada kalangan penguasa dan pedagang saja.

Kapitalisme juga mengubah wajah pola penguasaan ekonomi oleh bangsa Barat atas wilayah Nusantara yang amat kaya. Mereka tidak lagi membeli barang-barang mentah untuk ekspor dari pedagang-pedagang Nusantara untuk dijual di pasaran Eropa. Namun mereka lah yang langsung mengadakan penanaman bahan-bahan ekspor itu dengan cara menguasai tanah yang sebelumnya dikuasai penduduk pribumi untuk dijual tanpa harus melalui perantara pedagang lokal.

Hal demikian juga terjadi di Sumatera Timur, para pengusaha asing berlomba-lomba untuk membuka lahan perkebunan tembakau langsung ketimbang membeli dari pedagang lokal. Hal ini tentu saja terkait dengan keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Upaya Nienhuys tersebut lah yang menjadi pembuka jalan para pengusaha Barat untuk datang dan menanamkan modalnya di Sumatera Timur.

Pada masa-masa awal, yakni pada Maret 1864 perkebunan Nienhuys menghasilkan tembakau sebanyak 50 pak. Hasil panen tersebut kemudian dikirim ke Rotterdam di Belanda, untuk dijual dan diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu. Di sana harga tembakau Nienhuys terjual seharga 48 sen gulden per ½ kilogram. Setahun kemudian, pada tahun 1865 produksi tembakau yang dihasilkan oleh perkebunan milik Nienhuys meningkat menjadi 149 pak. Produksi ini juga dikirim ke Rotterdam. Untuk pengiriman kedua kali ini harga tembakau tersebut meningkat menjadi 149 sen gulden per ½ kilogram.

Peluang dari penanaman tembakau yang menguntungkan kini telah terbukti. Tembakau-tembakau berkualitas dari Deli mulai menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satunya adalah NHM (Nederlandsche Handelmaatschappij), sebuah perusahaan perdagangan milik Belanda, yang tertarik untuk menanamkan modalnya di usaha perkebunan milik Nienhuys. NHM bersedia memberikan sejumlah uang sebagai investasi kepada Nienhuys dengan imbalan 50% sahamnya kan dimiliki oleh NHM. Dari modal yang diberikan itu Nienhuys bersama-sama dengan G.C. Clemen dan P.W. Janssen mendirikan sebuah perusahaan dengan nama Deli Maatschappij.

Deli Maatschappij mulai mengembangkan usahanya dengan modal awal sebesar f 300.000. Dengan tanah seluas 7000 ha pada awal pendiriannya, dapat dihasilkan 2868 bal tembakau, sedangkan setahun setelahnya hanya menghasilkan 1381 bal tembakau. Kemudian dari hasil panen tahun 1870, Deli Maatschappij telah dapat membayar bunga saham dari keuntungannya, dan empat tahun kemudian, pada 1874 bunganya telah meningkat menjadi 80%.

Tahun ke tahun usaha Deli Maatschappij terus maju, sehingga pada 1873 modalnya sudah berkembang menjadi f 500.000 dan tahun 1876 modalnya sudah mencapai f 800.000. Usaha ini terus berkembang, sehingga pada 1907 modal usaha mereka sudah mencapai f 9.000.000 dengan luas konsesi tanah perkebunan sekitar 120.000 hektar yang terdiri dari 21 perkebunan dengan masing-masing memiliki

administrator dan dibantu oleh 4 sampai 6 orang asisten setiap perkebunan.

Perkembangan Deli Maatschappij berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang dibuat Nienhuys. Perusahaan ini selain memusatkan kegiatannya pada produksi tembakau, namun juga meneruskan perhatiannya pada pala dan kelapa. Tembakau yang dihasilkan oleh Deli Maatschappij sangat masyhur di pasaran Eropa. Tembakau dengan kualitas yang sangat baik itu digunakan sebagai pembungkus cerutu. Rasa yang dihasilkan sangat digemari para penikmat cerutu di Eropa dan wilayah lainnya. Deli Maatschappij merupakan perusahaan perkebunan tembakau pertama di Sumatera Timur, dan dengan cepat menjadi perusahaan terbesar dan paling penting di wilayah ini. Mereka juga memiliki pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan ekonomi di Sumatera Timur.

Melihat keuntungan dari hasil usaha yang diperoleh Nienhuys cukup menggiurkan, banyak pengusaha-pengusaha perkebunan lainnya tertarik untuk mengadu peruntungan di Sumatera Timur. Keberhasilannya dalam menghasilkan tembakau Deli dengan kualitas terbaik yang sangat laku dengan harga tinggi di pasar Eropa dan Amerika kala itu dengan cepat menarik perhatian pengusaha-pengusaha besar di negeri Belanda untuk menanam modal mereka pada perkebunan-perkebunan tembakau di Deli. Dalam waktu singkat, para pengusaha-pengusaha Belanda berlomba-lomba untuk mendirikan perkebunan-perkebunan tembakau yang besar di Deli.

Mereka meniru apa yang dilakukan oleh Nienhuys untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam budidaya tembakau. Tidak lama berselang, datang investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Sumatera Timur untuk menanam investasi dan mendirikan perusahaan perkebunan tembakau seperti yang dilakukan pengusaha-pengusaha asal Inggris, Belgia, Prancis, dan Jerman.

Keberhasilan dalam menarik modal asing untuk menanamkan modal untuk pengembangan perkebunan tembakau di Sumatera Timur sejak mulai dasawarsa keenam abad ke-19 tersebut, tidak hanya dilatarbelakangi oleh jaminan keuntungan yang besar dari harga jual

tembakau Deli di pasar dunia, namun juga akibat kemudahan yang diberikan oleh para sultan kepada para pemodal asing untuk memperoleh hak konsesi tanah di Sumatera Timur. Untuk mendapatkan kepemilikan tanah mereka kemudian meminta izin konsesi dari Sultan Deli, Sultan Serdang dan Sultan Langkat. Pengusaha-pengusaha asing diberikan konsesi tanah yang mudah dan murah oleh Sultan, bahkan Sultan tanpa kemauan rakyat telah mengkonsesikan tanah rakyat.

Masuknya investor-investor asing dalam menanamkan modalnya di daerah ini menjadikan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian Sumatera Timur. Banyaknya investor yang menanamkan modalnya membuat terjadinya ekspansi wilayah perkebunan di Sumatera Timur. Dua tahun setelah panen tembakau pertama, dua orang Swiss dan satu Jerman datang ke Deli untuk menanamkan modal dalam industri tembakau. Lalu pada 1872 tiba 75 orang, kemudian pada 1884 melonjak menjadi 688 orang pengusaha.

Ekspansi wilayah perkebunan juga mengakibatkan adanya penambahan jumlah perusahaan-perusahaan perkebunan milik asing selain Belanda. Tidak hanya di Labuhan, ekspansi perkebunan baru juga dibuka di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga pada tahun 1873 jumlah perusahaan perkebunan di Sumatera Timur mencapai 13 perkebunan. Setahun berikutnya menjadi 22 perusahaan. Hingga pada 1876 jumlahnya membengkak menjadi 40.

Selain Deli Maatschappij, terdapat pula perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau lain yang dimiliki oleh para pengusaha yang berasal dari Eropa. Perusahaan-perusahaan ini juga memainkan peranan yang besar dalam mempopulerkan tembakau Deli ke pasaran Eropa. Mereka di antaranya adalah Senembah Maatschappij, de Deli-Batavia Maatschappij, de Amsterdam-Deli Maatschappij, de Tabak Maatschappij Arendsburg, dan the United Langkat Plantations Company. Perusahaan-perusahaan perkebunan ini selain dimiliki oleh pengusaha Belanda, juga terdapat pengusaha Eropa lainnya termasuk juga yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun-tahun berikutnya,

perusahaan-perusahaan perkebunan asing bertambah secara signifikan.

Pada periode awal abad ke-20 kondisi perekonomian di Sumatera Timur berkembang pesat akibat dari keuntungan yang amat besar dari sektor perkebunan. Dari data tabel di atas, pada periode ini, perusahaan-perusahaan asing meningkat, terutama sekali pada akhir dekade 1920 yang berjumlah 642 perusahaan. Perusahaan perkebunan ini didominasi oleh tiga negara utama penanam modal di Deli, yakni Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara dari negara lain, dimasukkan ke dalam kolom lain-lain karena jumlahnya yang tidak besar. Perusahaan-perusahaan perkebunan itu paling banyak berasal dari Belanda, yaitu sebesar 713 perusahaan selama periode 1913-1929. Untuk perusahaan dari Inggris total terdapat 262 perusahaan, dan Amerika Serikat sebanyak 201 perusahaan.

Perkebunan kemudian dijadikan sebagai Cultuursgebied ter Oostkust van Sumatra yang akhirnya memunculkan animo yang besar dalam pengembangan perkebunan tembakau. Dari Deli, Langkat, dan Serdang yang menjadi kawasan inti, perkebunan juga diperluas ke kawasan Simalungun dan Asahan. Sumatera Timur mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat dan memiliki keistimewaan dalam sejarah kolonial mana pun juga saat itu. Lebih kurang 25 tahun, setelah Nienhuys untuk pertama kali membuka perkebunan tembakau di Deli, topografi Sumatera Timur berubah sama sekali dari hutan belantara akhirnya menjelma menjadi dipenuhi oleh hamparan perkebunan tembakau besar yang menyusuri seluruh kawasan pantai Sumatera Timur sepanjang 200 km.

3. Dampak Pembukaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur

Pembukaan perkebunan di Sumatera Timur membawa perubahan drastis terhadap masyarakat Sumatera Timur, khususnya kaum aristokrat Melayu. Ekonomi kolonial Belanda dengan sistem ekonomi perkebunannya telah mendatangkan kesejahteraan hampir semua raja-raja di kawasan ini. Sultan Deli, Sultan Langkat, Sultan Serdang, dan Sultan Asahan adalah raja-raja yang paling banyak mendapat

keuntungan dari pembukaan perkebunan di wilayah tersebut. Keuntungan tersebut semakin besar terutama karena adanya kebijakan Pemerintah kolonial yang masih memperbolehkan raja-raja tersebut menjalankan kekuasaan hukum adat mereka, antara lain yang terpenting adalah tanah. Imbalan honorarium dari perusahaan perkebunan terus-menerus mengalir ke kantong pribadi para sultan dan datuk yang berkuasa di Sumatera Timur.

Pada tahun 1915, 39,2 persen penghasilan pajak di Deli, dari 37,9 % di Langkat, dan 51,9 % di Serdang masuk ke kantong pribadi sultan dan datuk-datuknya. Keuntungan dari pajak itu masih ditambah lagi dengan gaji resmi dari pemerintah kolonial dan honorarium dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Sementara itu di Simalungun dan Tanah Karo, raja-rajanya yang diikat dengan *Korte Verklaring*, masing-masing memperoleh 16,1% dan 10,9%.

Sultan Machmoed dari Kerajaan Langkat adalah yang paling kaya di antara mereka. Dengan hasil honorarium dari perusahaan minyak di Pangkalan Brandan, pendapatannya pada tahun 1931 mencapai f 184.568. Sultan Amaloedin dari Deli mendapat f 472.094 dan Sultan Soelaiman dari Serdang memeroleh f 103.346. Raja-raja Simalungun, meskipun tidak sehebat Sultan-sultan Melayu juga menerima keuntungan yang besar dari perkebunan itu. Di samping gaji mereka sebanyak f 6.720 setahun, dua rajanya yang terkaya menerima uang jalan sebesar f 1800 setahun dan menerima upeti dari rakyatnya. Para Sibayak di Tanah Karo mendapat gaji rata-rata f 2.400 setahun, jauh lebih sedikit dan gaji Sultan-sultan Melayu. Perinciannya adalah sebesar f 3.960 setahun untuk Sibayak Lingga dan f 1.200 setahun untuk Sibayak Kutabuluh.

Peningkatan kesejahteraan yang luar biasa ini berdampak pada perubahan gaya hidup sebagian sultan dan bangsawan Sumatera Timur, khususnya Melayu. Sebelum kedatangan Belanda dan dibukanya perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur, kaum bangsawan Melayu termasuk sultan-sultannya berada dalam keadaan yang melarat. Pasca kemunculan sistem ekonomi perkebunan, mereka mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan. Para sultan tersebut mampu membangun istana yang megah, membeli mobil mewah,

bahkan pesiar ke Eropa. Gaya hidup mewah ini sudah mewarnai kehidupan mereka sehari-hari. Sultan-sultan Melayu kerap kali mengadakan pesta-pesta untuk menyambut tamu-tamu penting, terutama dari kalangan orang-orang Eropa dan bangsawan. Untuk menunjukkan kebesaran dinastinya, mereka membentuk pasukan yang terdiri dari para keluarga bangsawan.

Peningkatan ekonomi di Sumatera Timur tidak selalu berdampak positif. Terdapat pula efek negatif dari hal tersebut, yakni terjadinya jurang pemisah yang lebar antara kaum elite Eropa beserta bangsawan kerajaan dengan orang-orang Cina, Jawa, India, Banjar, Sunda, Mandailing, Bawean, Batak, Gayo, Alas, dan sebagainya yang sebagian besar menjadi buruh di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur. Susunan golongan di Sumatera Timur pada zaman kolonial Belanda benar-benar kompleks dan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Di balik gemerlap dan kemewahan para elite di Sumatera Timur, kepentingan dan kesejahteraan hidup penduduk yang ada di daerah tersebut terabaikan. Sehingga, semakin lama usaha perkebunan itu dipandang oleh penduduk tidak lebih dari lambang penindasan dan kesewenang-wenangan, karena hak-hak istimewa golongan elite sangat diutamakan di satu sisi, sementara di sisi lain hak dan nasib golongan kecil sangat diabaikan.

Sementara itu, Perkembangan perusahaan perkebunan telah menciptakan perubahan besar dalam aspek kependudukan dan perkotaan di Sumatera Timur. Salah satunya adalah perubahan komposisi demografi. Pada pertengahan abad ke-19, jumlah penduduk Sumatera Timur diperkirakan berjumlah 150.000 jiwa. Dalam tempo 80 tahun terjadi peningkatan beberapa kali lipat yakni menjadi 1.693.200 jiwa. Penyebab hal tersebut adalah kedatangan kuli-kuli dari Jawa dan Cina dalam jumlah besar ke perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur dan adanya migrasi orang-orang dari Tapanuli, Aceh, dan Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan komposisi demografi di Sumatera Timur tidak lagi didominasi oleh orang-orang Melayu Sumatera Timur, melainkan didominasi oleh para pendatang. Dalam tahun 1929 diperkirakan terdapat 301.936 orang kuli yang bekerja di

perkebunan. Jumlah ini terdiri dari 275.233 kuli dari Jawa dan 26.703 kuli asal Cina. Penduduk dari keseluruhan penduduk Sumatera Timur. Dengan demikian, jumlah penduduk Sumatera Timur lebih dari separuhnya adalah para penduduk pendatang yang bukan berasal dari Sumatera.

Komposisi demografi di Sumatera Timur dalam tabel tersebut memperlihatkan adanya peningkatan signifikan dari penduduk pribumi. Penduduk pribumi ini diisi sebagian besar oleh para buruh perkebunan dan para pendatang yang secara sengaja datang ke Sumatera Timur untuk mengadu nasib mereka demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Secara teori, para pengusaha perkebunan atas permintaan yang bersangkutan, wajib memulangkan para buruh ke tempattempat asal mereka masing-masing pada akhir kontrak. Namun, ternyata setelah puluhan tahun bermukim di wilayah perkebunan, banyak dari para buruh tersebut –Cina dan Jawa – yang lebih memilih untuk menetap setelah kontrak mereka habis. Mereka bermukim baik di kampung-kampung maupun di kota-kota yang sedang berkembang. Hanya bekas butuh yang bermukim di tengah-tengah penduduk asli berada di bawah yurisdiksi penguasa-penguasa Sumatera Timur. Membanjirnya para bekas buruh memasuki kampung-kampung menciptakan kepadatan yang luar biasa di wilayah-wilayah sekitar perkebunan. Dalam waktu singkat, secara jumlah penduduk asli dilampaui oleh buruh Cina dan Jawa.

Selain demografi, dampak lain dari perkembangan ekonomi akibat usaha perkebunan di Sumatera Timur adalah muncul dan berkembangnya kota-kota baru di wilayah sekitar perkebunan. Salah satunya Pematang Siantar, yang menjadi sebuah pusat administrasi dan ekonomi yang penting dan sekaligus menjadi jalur silang yang menghubungkan wilayah Tapanuli, Karo, Simalungun, dan dataran rendah Sumatera Timur.

Kota lain yang muncul akibat pembukaan perkebunan adalah kota Medan Putri, yang kemudian sekarang dikenal dengan Medan. Medan sebagai pusat administrasi pemerintahan dan ekonomi perkebunan telah berkembang dengan cepat. Perkembangan Medan menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Geliat

ekonomi perkebunan juga memengaruhi para pejabat Belanda di Sumatera Timur untuk mengubah lokasi pusat pemerintahan di Sumatera Timur. Bermula ketika tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan. Lalu pada perkembangannya, pada 1 Maret 1887, Medan juga menjadi pusat administrasi Keresidenan Sumatera Timur yang sebelumnya berada di Bengkalis. Tidak ketinggalan pula para elite pribumi yang turut memindahkan pusat kekuasaannya ke Medan. Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimun pada tanggal 18 Mei 1891, dan dengan demikian Ibukota Kesultanan Deli telah resmi pindah ke Medan.

Oleh sebab kemakmuran dan banyaknya investasi modal asing itu tertanam dalam bidang perkebunan, maka pada 1915, status Keresidenan Sumatera Timur sudah ditingkatkan menjadi Gouvernement yang dipimpin seorang Gubernur di Medan. Hingga kemudian pada 1918, Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mac Kay. Berdasarkan "Acte van Schenking" (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior. Pada tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga Medan secara resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda, tidak lagi di bawah Kesultanan Deli. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir.

Perkembangan ekonomi dan kemunculan kota-kota baru telah melahirkan suatu budaya baru yang terlepas dari lingkungan budaya asalnya dan wewenang Kerajaan Melayu. Mereka adalah rakyat gubernemen, bukan rakyat kerajaan. Di Medan muncul suatu kesadaran baru, yakni kesadaran akan identitas ke-Indonesiaan lewat perkembangan pesat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipakai media penerbitan seperti Pewarta Deli, Sinar Deli, Pelita Andalas, dan media lainnya yang digagas oleh golongan Bumiputera. Identitas ini semakin menguat ketika Sumpah Pemuda tahun 1928 mengukuhkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan. Pengakuan

ini penting artinya dalam menumbuhkan budaya baru yang bersifat nasional di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Medan.

B. POLITIK UANG DALAM KEKUASAAN

1. Uang Lokal Sumatera Timur

Uang, merupakan sebuah artefak budaya yang berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki standar nilai yang berlaku pada waktu serta lokasi tertentu. Hal ini tentu sangat memudahkan apabila dibandingkan dengan sistem barter yang tidak memiliki standar nilai terukur (baku). Walaupun demikian, pada praktiknya uang tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya. Faktor kesepakatan menjadi unsur utama dalam menentukan batasan spasial-temporal penggunaan mata uang. Sebelum uang menjadi sebuah alat tukar, logam mulia berupa emas dan perak sudah terlebih dahulu dijadikan sebagai standar nilai alat tukar. Selanjutnya barulah uang yang digunakan sebagai alat tukar yang sah pada suatu wilayah.

Salah satu yang menarik untuk menjadi bahan kajian tentang kaitan antara uang, politik, dan sistem produksi adalah keberadaan uang kebon. Kemenarikan uang kebon sebagai bahan kajian antara lain terlihat pada relasi yang terjadi antara pemerintah selaku pemegang kekuasaan, instansi perkebunan, para tenaga kuli kontrak/pekerja, dan uang kebon itu sendiri. Secara sederhana relasi tersebut dapat digambarkan adalah sebagai berikut: uang kebon diproduksi oleh instansi perkebunan tertentu, digunakan sebagai alat tukar/transaksi yang sah dalam lingkungan perkebunan tertentu, dan hanya berlaku dalam sistem ekonomi perkebunan tertentu. Dalam konteks ini, sangat dimungkinkan terjadinya praktik-praktik kolonialisme yang disembunyikan di dalam sistem ekonomi tersebut. Adapun batasan perkebunan yang dimaksud dalam hal ini adalah perkebunan yang terdapat di Tanah Deli (Sumatera Timur).

Data sejarah mencatat bahwa reformasi yang dimulai pada akhir tahun

1840-an dan 1850-an yang pada awalnya bertujuan untuk menyederhanakan tanam paksa, secara perlahan menjelma menjadi sebuah perubahan mendasar dalam cara pengorganisasian produksi-konsumsi hasil pertanian untuk kepentingan tertentu.

Zenden dan Marks (2012: 147) menyebutkan bahwa hal ini ditandai setidaknya oleh dua hal penting. Pertama, adanya sebuah gerakan untuk menghapuskan semua jenis tenaga kerja paksa dan menggantinya dengan tenaga kerja bayaran secara bertahap, dan yang kedua, munculnya bentuk baru dari perkebunan yang berorientasi pada komoditas yang dikembangkan melalui modal kewirausahaan Eropa.

Senada dengan pendapat di atas, Bremen (1997, 15) menyatakan bahwa munculnya Undang-Undang Agraria, pada tahun 1870 yang dalam arti formal menandai berakhirnya sistem tanam paksa di Jawa, dan beralih menjadi sistem liberalisme yang lebih bebas, segera menunjukkan arah politik baru yaitu terbukanya akses sumber daya alam bagi kepentingan modal kewirausahaan asing.

Adapun dampak dari perubahan sistem tanam paksa ke liberalisme tersebut menyebabkan meluasnya sistem perkebunan dalam skala besar di Jawa. Sementara di luar Jawa yang penduduknya masih sangat sedikit, baru melangkah pada tahap awal pada sektor pertambangan. Walaupun demikian, kelak arti penting dari masa ini adalah terbentuknya masyarakat perkebunan di Sumatera Timur. Dan orang pertama sebagai peletak dasar munculnya perkebunan di Sumatera Timur adalah J. Nienhuys (Bremen, 1997: 16; Perret, 2010: 121).

Jacob Nienhuys merupakan wirausahawan pertama yang didaulat oleh pedagang-pedagang Belanda untuk menanamkan investasinya pada perkebunan tembakau di Jawa. Pertemuannya dengan Pangeran Said Abdullah Ibn Umar Bilsagih di Surabaya, kelak menjadi titik penting meluasnya perkebunan swasta ke wilayah Sumatera Timur. Pangeran ini menunjukkan bahwa kesuburan dan iklim di daerah Deli sangat tepat untuk perkebunan tembakau. Setelah peristiwa tersebut Nienhuys tiba di Labuhandeli pada tahun 1863, dan kecewa karena melihat kondisi perkebunan tembakau yang diproduksi penduduk setempat. Walaupun demikian, dia tetap memutuskan untuk mencoba

membuka sebuah perkebunan eksperimental di Deli seluas 75 hektar. Setelah izin diberikan, Nienhuys mendatangkan orang-orang Tionghoa dari Singapura untuk mengurus perkebunannya, hal tersebut karena tidak seorangpun orang pribumi yang mau membantunya mengurus perkebunan. Hasil panen pertamanya pada tahun 1864 ternyata memiliki kualitas istimewa ketika diekspor ke Belanda (Perret, 2010: 180). Melihat kenyataan tersebut, Nienhuys bersama dengan Janssen, Clemen kembali ke Deli pada tahun 1869 dan mendirikan Deli Maatschappij dan Nederlandsche Handel-Maatschappij. Pada saat itu, perusahaan ini sudah memiliki 7000 hektare lahan tembakau, 1.200 kuli Tionghoa, dari total 3000 kuli yang bekerja di wilayah Kesultanan Deli (Pelzer, 1985: 51-53).

Sampai tahun 1869, konsesi yang berkaitan dengan tanah perkebunan hanya diberikan pada wilayah-wilayah yang berada di bawah wewenang sultan. Akan tetapi dikarenakan tanah hutan di Pesisir Timur hanya dapat menghasilkan satu kali panen tembakau, maka para pekebun berusaha untuk memperluas lahan mereka di luar wilayah sultan. Pada tahun yang sama diresmikannya Terusan Suez juga menjadi pemicu pertumbuhan meluasnya perkebunan-perkebunan swasta di wilayah Deli pada tahun berikutnya. Akibatnya, perkebunan di Kasultanan Langkat dan Kasultanan Serdang semakin berkembang, demikian juga di Hamparan Perak (Perret, 2010:182).

Syarat-syarat kerja untuk para kuli telah tertuang sepenuhnya di dalam Koeli Oordonantie 1880. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan masa kontrak seorang kuli adalah selama tiga tahun. Setelah masa kontrak itu habis, pihak institusi perkebunan harus mengembalikan kuli. Dalam peraturan tersebut juga terdapat sanksi-sanksi atas kuli yang tertuang di dalam bab *Poenali Sanctie*. Adapun isinya secara umum adalah setiap kuli kontrak yang meninggalkan pekerjaannya, yang lari, dan yang mengabaikan kewajiban kerjanya akan dikenakan sanksi berupa denda atau penjara (Reid, 1987: 82).

Sejak semula, para tuan kebun menyadari kesulitan untuk mempekerjakan penduduk pribumi di perkebunan mereka dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Akhirnya mereka sangat tergantung pada tenaga kerja yang didatangkan secara terus menerus

dari Cina dan Jawa. Pada masa pertama pembukaan hutan pada tahun 1870-an kuli-kuli Cina telah dibeli dengan harga tinggi dari tengkulak mereka di Penang, dan

Singapura. Dalam setahun mereka telah mempekerjakan lebih dari 7000 kuli, dan pada akhir tahun 1890-an berkembang menjadi 20.000 orang (Reid, 1987: 80). Pada sisi lain para penguasa setempat, sultan dan kerabatnya, memanfaatkan kondisi ini untuk mengembangkan harta pribadinya dengan cara menyesuaikan pengelolaan perkebunan tradisional miliknya dengan pengelolaan sistem Eropa. Model pengelolaan perkebunan semacam ini sering disebut oleh Belanda sebagai dagangstelsel. Pegawai-pegawai Belanda memandang dagang *stelsel* sebagai sesuatu yang mengancam keberadaan mereka (Perret, 2010: 192).

Pada awal abad ke-20, mata uang emas Aceh masih berlaku di dua pasar besar di Pane, sebuah daerah di Simalungun, Sumatera Utara. Pada periode yang sama, di utara Danau Toba, penduduk dataran tinggi masih menjalankan adat memberikan persembahan dalam bentuk mata uang emas Aceh dalam transaksi perkawinan. Pada saat bersamaan masyarakat pedalaman yang sama sekali tidak mengenal peraturan baru yang berlaku di Pesisir Timur Laut masih biasa menggunakan dollar Spanyol. Akan tetapi, sejak tahun 1864 dan penempatan *controeler* pertama di Deli, *guilder* mulai dipakai. Ditambah lagi, sejak tahun 1890 berlaku sebuah peraturan baru yang menyebutkan bahwa mata uang standar adalah dollar Meksiko dan mengesahkan penggunaan mata uang yen, serta dollar Hongkong.

Lima tahun kemudian, dolar Inggris menggantikan dolar Meksiko sebagai mata uang standar. Tahun 1908, pemerintah kolonial mengambil kebijaksanaan untuk mengakhiri penggunaan dolar Spanyol di residentie. Mereka melancarkan tindakan menukar dolar Spanyol dengan guilder. Pemberlakuan *guilder* sebagai mata uang yang baru tidak pernah berhasil mewujudkan sebuah wilayah kesatuan moneter (Perret, 2010: 227).

Selain beberapa mata uang yang berlaku di Sumatera Timur tersebut, terdapat sebuah mata uang yang hanya berlaku dalam sistem ekonomi perkebunan. Mata uang yang dimaksud adalah uang kebon. Akibat

ketiadaan sistem moneter yang jelas menyebabkan para Tuan Kebun memiliki wewenang untuk mengeluarkan mata uang sendiri untuk perkebunannya. Mata uang kebon tidak dapat disetarakan atau ditukar dengan mata uang lain yang berlaku pada masa itu. Hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan menarik dalam kajian arkeologi kolonial. Dalam konteks ini salah satu permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan uang kebon sebagai mata uang perkebunan yaitu bagaimanakah praktik kolonialisme yang tercermin dalam uang kebon ketika ditinjau dengan menggunakan pendekatan arkeologi Marxis?

2. Deskripsi Morfologis Mata Uang Kebon

Koleksi mata uang kebon yang dijadikan sebagai data artefaktual di bawah ini berasal dari koleksi pribadi salah satu pengajar di Universitas Negeri Medan bernama Ichwan Azhari, dan juga koleksi dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Mata uang yang dijadikan sebagai bahan bahasan di bawah ini merupakan beberapa contoh uang kebon yang beredar pada perkebunan di Sumatera Timur pada abad ke-19. Deskripsi morfologi uang kebon yang tersebut di bawah ini tidak menjadi bahasan utama untuk menjawab permasalahan, melainkan hanya sebagai contoh beberapa koin yang beredar pada masa itu.

Walaupun demikian, penting kiranya deskripsi morfologis dilakukan terhadap mata uang kebon tersebut, mengingat terdapat beberapa perbedaan antar uang kebon maupun dengan uang gulden yang digunakan sebagai mata uang resmi pada masa itu di Hindia Belanda, termasuk di dalamnya Sumatera Timur.

Menurut pengamatan Nasoichah (2010: 19), terdapat beberapa perbedaan antara uang kebun dan mata uang resmi Hindia Belanda. Uang token atau sering dikenal dengan nama uang kebon merupakan alat tukar yang hanya beredar dan berlaku di wilayah perkebunan tertentu. Mata uang ini tidak memiliki nilai tukar apabila digunakan di luar wilayah perkebunan. Uang kebon memiliki berbagai jenis, bentuk dan ukuran, beberapa di antaranya:

Gambar 5.1: Contoh uang kebon 1 (Churmatin Nasoichah, 2010)

Uang ini berbentuk persegi dengan keempat sudut terpotong dengan panjang 3 cm, lebar 2,2 cm, lebar sudut 0,5 cm, dan tebal 0,1 cm dengan bagian tepiannya didekorasi dengan deretan lingkaran-lingkaran berukuran kecil. Uang ini berbahan logam perunggu dengan mayoritas campuran kuningan. Terdapat tulisan di kedua sisinya. Pada sisi depan terdapat dua jenis aksara yaitu aksara latin dan aksara cina. Sebuah angka arab 20 dengan tulisan CENTS EONG HONG berada di bagian tengah, sedangkan pada sisi kanan dan kirinya terdapat aksara Cina.

Adapun pada bagian sebaliknya terdapat aksara Cina yang berada tepat di tengah bidang mata uang.
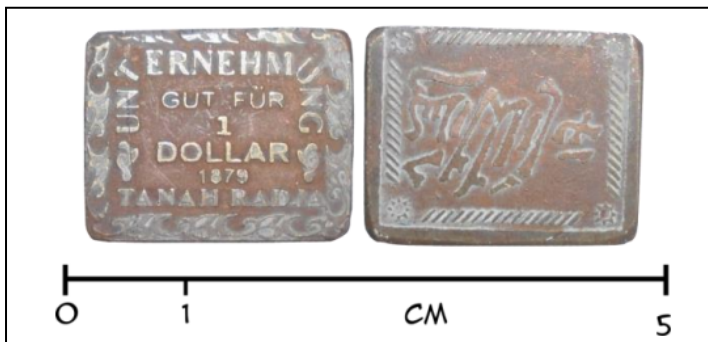
Gambar 5.2: Contoh uang kebon 2 (Churmatin Nasoichah, 2010)

Uang ini berbentuk persegi empat dengan panjang 3 cm, lebar 2,3 cm, dan tebal 0,5 cm. Uang ini berbentuk logam berbahan perunggu, dan

warnanya cokelat kemerahan. Terdapat tulisan pada kedua sisinya, dengan dua macam aksara yaitu aksara latin dan cina. Pada sisi depan bagian tengah terdapat tulisan “Unternehmung Gut Für 1 Dollar 1879 Tanah Radja”, dan terdapat motif sulur-suluran pada bagian tepianya.

Adapun pada bagian sisi yang lain terdapat tulisan dalam aksara cina dan terdapat motif garis-garis kecil di bagian tepiannya.

Gambar 5.3: Contoh uang kebon 3 (Churmatin Nasoichah, 2010)

Uang ini berbentuk oval dengan diameter panjang 4,8 cm, diameter pendek 3 cm, dan tebal 0,1 cm. Adapun pada bagian tepiannya didekorasi dengan deretan lingkaran-lingkaran berukuran kecil. Uang ini berupa uang logam dengan bahan perunggu. Pada uang ini hanya satu sisi yang terdapat tulisan, sedangkan sisi lainnya kosong. Sisi yang terdapat tulisan memiliki aksara latin yang berbunyi “UNTERNEHMUNG pada bagian atas, rata tengah, sedangkan pada bagian bawah dibatasi oleh dua buah tanda bintang, adalah tulisan Poelau Radja. Bagian oval kedua yang dibatasi oleh garis tipis menonjol bertuliskan REIS pada bagian atas, diikuti oleh GUT FÜR di bawahnya, ½ DOLLAR dan 1890.

Gambar 5.4: Contoh uang kebon 4 (Churmatin Nasoichah, 2010)

Uang ini berbentuk segitiga sama sisi dengan ujung membulat yang memiliki panjang pada masing-masing sisi 4,1 cm dan tebal 0,1 cm. Pada bagian tepi uang ini berdekorasi deretan bulatan-bulatan kecil yang berujung bintang pada masing-masing ujung segitiganya. Uang ini berbahan perunggu. Mata uang ini hanya terdapat satu sisi saja yang bertulisan, sedangkan sisi lainnya kosong. Adapun tulisan yang dimaksud adalah *Unter Nehmung Gur Für. Co Bandar Poeloe* yang berada pada tepiannya sedangkan pada bagian dalam yang dibatasi oleh garis tipis menonjol bertulisan 50 pada bagian atas, Cents, pada bagian tengah, dan 1892 pada bagian bawah.

Gambar 5.5: Contoh uang kebon 5 (Churmatin Nasoichah, 2010)

Uang ini berbentuk oval berukuran uang ini panjang 5,3 cm, diameter pendek 3,4 cm, dan tebal 0,2 cm. Uang ini merupakan koleksi Museum Negeri Prov. Sumatera Utara dengan nomor inventaris 3460. Uang ini berbahan perunggu, dan memiliki dua sisi yang bergambar. Pada satu sisi bergambar hanya satu sisi yang memiliki tulisan berupa aksara latin yang berbunyi “Unternehmung Gut Für 1 Dollar Reis 1891 Soengei Serbangan”.

Gambar 5.6: Contoh uang kebon 6 (Churmatin Nasoichah, 2010)

Uang kebon ini berbentuk lingkaran bersayap lancip yang memiliki ukuran panjang 5 cm dan lebar 3,7 cm. Uang berbahan perunggu ini merupakan koleksi Museum Negeri Sumatera Utara dengan nomor inventaris 3461. Pada salah satu sisinya memiliki lambang negara, sedangkan pada sisi lainnya bertulisan UNTERNEHMUNG pada bagian atas luar, dan TANJOENG ALAM pada bagian di bawahnya. Kedua tulisan tersebut digambarkan melingkari mata uang yang pada bagian tepinya didekorasi dengan deretan bentuk lingkaran-lingkaran kecil. Adapun pada bagian lingkaran kedua yang dibatasi dengan garis tipis menonjol bertulisan GUT FUR pada bagian atas, 1 DOLLAR, pada deret kedua, REIS pada deret ketiga, dan 1892 pada deret terakhir.

Dalam rangka membedah praktik kolonialisme pada perkebunan, hal pertama yang harus diketahui adalah sistem ekonomi perkebunan itu sendiri. Sistem ekonomi perkebunan walaupun telah jelas berbentuk kapitalis tetapi memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalis standar pada umumnya. Adapun perbedaan mendasar pada sistem

ekonomi kapitalis perkebunan adalah (i) adanya kepemilikan asing (ii) didirikan pada wilayah yang ditaklukkan (Gordon, 1986: 1420). Beberapa prinsip dasar berkaitan dengan jalannya sistem ekonomi perkebunan yang harus dimiliki oleh para tuan kebun sebagai modal produksi atau kekuatan produksi, yaitu ketersediaan lahan/ tanah dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi perkebunan kolonial, kedua hal tersebut lebih mudah untuk didapatkan. Hal tersebut karena perkebunan tidak beroperasi pada jalur kapitalis normal yang sangat tergantung dari pembayaran sewa tanah dan upah pekerja, negara kolonial menyediakan seperangkat peraturan yang turut menentukan bekerjanya sistem ini.

Lahan yang melimpah dan murah telah dijamin oleh pemerintah Hindia Belanda melalui berbagai cara, antara lain: 1) pengambilalihan langsung dari tanah koloni, 2) melalui asumsi kondisi ketidakjelasan status kepemilikan tanah tanpa perlu memerhatikan kepentingan ekonominya, 3) dukungan negara untuk mencabut status tanah adat yang dianggap ilegal sewaktu-waktu (status ilegal dalam hal ini sebagian besar dilakukan melalui penerapan hukum kontrak dan properti Eropa pada tanah adat) melalui penggunaan kekuatan fisik untuk menghancurkan perlawanan lokal ketika diperlukan, 4) kadang-kadang melalui peraturan khusus tentang penyediaan dan penyewaan lahan yang menguntungkan bagi pihak perkebunan.

Adapun hal penting selanjutnya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Tenaga kerja dalam hal ini harus didatangkan dari luar wilayah karena penduduk pribumi dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan perkebunan (Gordon, 1986: 1420). Perekrutan pekerja melalui sistem kontrak di wilayah Pantai Timur Sumatera telah dimulai sejak tahun 1880 pada perkebunan tembakau. Sejak saat itu peraturan tentang kuli telah diperluas ke ranah lain.

Kewajiban dan hak kedua belah pihak, dalam hal ini institusi perkebunan dan kulinya harus memenuhi tuntutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus dituangkan dalam kontrak yang terdaftar pada pemerintah. Majikan harus membayar upah secara teratur, menyediakan perumahan yang layak, membuat makanan yang tepat tersedia, menyediakan rumah sakit dan perawatan medis gratis,

menyediakan air minum yang baik, dan memberikan transportasi gratis setelah berakhirnya masa kontrak untuk mengembalikan ke daerah asalnya (Vandenbosch, 1931: 320). Pada sisi lain, pihak kapitalis dalam hal ini adalah para tuan kebun melakukan negosiasi yang berkaitan dengan adanya pengakuan, dukungan, dan perlindungan dari pihak pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk regulasi yang mengukuhkan kedudukan mereka dalam sistem ekonomi perkebunan. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur masalah lahan tetapi juga tentang hak dan kewajiban kuli. Keberadaan regulasi tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang lahan dan UndangUndang Pidana yang mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja.

Dalam Undang-Undang Pidana yang merupakan bagian dari Koeli Oordonantie 1880 disebutkan bahwa kedua belah pihak, baik institusi perkebunan maupun kuli dalam kasus pelanggaran kewajiban akan dikenakan sanksi, baik penjara atau denda. Dalam hal ini terdapat asumsi bahwa kuli tidak memiliki apapun untuk membayar denda, sehinggahukuman penjara dipaksakan untuk kuli (Vandenbosch, 1931: 320). Pemaksaan sanksi penjara bagi kuli berdasarkan asumsi tidak lain merupakan sebuah pelanggaran bagi hukum itu sendiri. Keputusan sepihak dari institusi perkebunan yang ternyata juga didukung oleh pemerintah tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap institusi perkebunan.

Bentuk penekanan pada kuli telah terjadi sejak awal bekerja di perkebunan. Menurut Vandenbosch (1931: 320), seorang kuli impor yang dirasa tidak menguntungkan selama beberapa bulan pertamanya, dipaksakan agar terbiasa bekerja dengan sistem perkebunan melalui berbagai cara. Adapun caranya antara lain dengan adanya kewajiban mengembalikan uang impor dan transportasinya kepada institusi perkebunan. Ancaman yang lain adalah bawa masa kerjanya akan ditambah sampai kuli tersebut dirasa dapat memberikan keuntungan pada perkebunan. Cara-cara untuk mempertahankan kuli ditempuh oleh institusi perkebunan karena tidak mudah untuk mendapatkan penggantinya dalam waktu singkat.

Secara kasat mata masyarakat pada era perkebunan terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah Hindia Belanda, kelas kapitalis, adalah para penguasa modal yaitu orang-orang Eropa, dan kelas *proletariat* yaitu para pekerjaperkebunan. Di samping itu terdapat kelas-kelas lain yaitu kelas penguasa lokal, yaitu para sultan yang sebenarnya menjadi pihak penguasa tanah, sekaligus juga menjadi pemilik modal lokal sebagai saingan dari orang-orang Eropa yang merasa terancam. Terdapatnya kelas-kelas sosial tersebut tidak lain karena beberapa pihak ingin mempertahankan status quo mempertahankan kedudukannya yang lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya.

Adapun model produksi dari sebuah sistem kapitalis adalah kompetitif. Dalam artian, seperti data yang terdapat di awal, bahwa kapitalis dalam hal ini adalah orang-orang Eropa yang memiliki perkebunan-perkebunan di Deli, sementara itu sebagai kompetitor mereka selain kelaskelas mereka sendiri, juga para sultan Deli yang ingin juga memiliki perkebunan dengan sistem kerja Eropa. Pada sisi lain, pemerintah Hindia Belanda diam-diam mendukung dan memperkuat keberadaan perkebunan swasta tersebut agar terus berproduksi dengan cara menidas kapum pekerjanya. Dukungan dari pihak pemerintah Hindia Belanda antara laintampak pada beberapa produk hukum yang semakin menindas kaum pekerja perkebunan. Selain itu terdapat sebuah fiksi legal bahwa penyerahan wewenang dari penguasa lokal kepada tuan kebun tidak hanya berlaku untuk tanah melainkan juga untuk hak menguasai tenaga kerja (Bremen, 1997: 31). Hal tersebut semakin menguatkan eksistensi para kapitalis Eropa di Deli.

Salah satu pola relasi yang menjadi bukti bahwa ekonomi menjadi sentral dalam gejala sosial adalah dengan melihat adanya ekonomi dalam kaitannya dengan uang. Dalam bukunya yang termasyhur Philosophie des Geldes (1900), Simmel mencoba memerlihatkan bagaimana ekonomi uang dan institusionalisasi hak milik pribadi telah memberi kontribusi bagi penciptaan jarak sosial dan pelonggaran sebuah kolektivitas yang tak lain berarti membesarnya ruang kebebasan individu. Uang memungkinkan distansi sekaligus individualisasi sehingga pola hubungan etnosentris dan ekslusif diubah menjadi pola-pola hubungan yang lebih longgar (Hardiman, 2010: 8).

Menurut Simmel, pertukaran ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial. Ketika transaksi moneter menggantikan barter, terjadi perubahan penting dalam bentuk interaksi antara para pelaku sosial. Simmel melihat uang sebagai suatu yang bersifat impersonal, suatu yang tidak terdapat pada ekonomi barter. Hubungan antar individu diwarnai warna dan cirikalkulatif, menggantikan kecenderungan kualitas sebelumnya. Dalam pengamatannya, manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan itu sendiri, padahal uang sebetulnya hanya merupakan sarana. Bahkan, uang adalah contoh paling murni dimana sarana diubah menjadi tujuan.

Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negatif terhadap individu, seperti sinisme dan sikap indiferen (blase attitude). Dampak ekonomi uang lain yang digarisbawahi Simmel adalah reduksi nilai-nilai manusia menjadi uang. Segalanya bernilai kalau menghasilkan banyak uang. Nilai manusia direduksi ke ekspresi moneter, kata Simmel. Sambil menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel menegaskan semuanya tergantung pada manusia itu sendiri. Tapi diingatkannya bahwa uang hanyalah sarana, bukannya tujuan pada dirinya sendiri.

Menurut Georg Lucas seorang pemikir Marxist berpandangan bahwa, kapitalisme menguasai seluruh dimensi kehidupan masyarakat sehingga interaksi dalam kehidupan masyarakat ini selalu ditandai oleh pemiskinan makna hidup yang autentik. Kebebasan untuk mengaktualkan dimensi kemanusiaan dalam masyarakat sebagai ciri autentik kehidupan masyarakat yang mampu memaknai kebebasan dirinya kemudian diganti oleh adanya aktivitas pertukaran nilai uang yang secara objektif menimbulkan keterasingan hidup. Hal tersebut disebut sebagai komodifikasi. Hal ini terkait erat dengan proses reifikasi, yaitu proses merosotnya dimensi manusia yang utuh menjadi benda belaka: manusia kehilangan jati-dirinya sebagai subjek pelaku (agent) bagi dirinya sendiri karena lenyapnya kreativitas. Proses ini berujung kepada fetisisme komoditas, yaitu pemberhalaan hidup manusia pada barang-barang industri. Dengan fenomena ini, jati diri masyarakat menjadi terfragmentasi ke dalam sistem sosial yang dibingkai oleh kepentingan ekonomis belaka, dan dalam sistem ini yang diuntungkan adalah pihak yang memiliki jaringan dengan para pemilik

modal (kapitalis) yang bekerjasama dengan kekuasaan negara (Saptawasana, 2005: 28). Bagi Lukacs, kaum proletar adalah pihak yang paling dirugikan nasibnya dalam kondisi objektif masyarakat yang demikian ini.

Adapun uang kebon itu sendiri memiliki makna yang cukup kompleks dalam sebuah perkebunan. Uang kebon menjadi sebuah simbol dari relasi antara kelas kapitalis dan proletariat. Pada kenyataannya, uang tersebut hanya berlaku pada sebuah lingkungan perkebunan tertentu saja. Hal tersebut tentunya untuk mengikat para pekerja perkebunan di lingkungan kerja mereka dengan segala konsekuensinya.

Menurut Bremen (1997: 117), salah satu bentuk penipuan yang dikerjakan oleh para tuan kebun ialah kuli tidak diberikan kebebasan untuk membelanjakan upahnya yang sudah sangat rendah. Banyak perkebunan menggaji kulinya sebagian dengan uang buatan sendiri berupa kertas bon atau keping logam yang hanya dapat dibelanjakan di toko (kedai) perkebunan. Menurut para tuan kebun, mereka telah mengeluarkan alat tukar perusahaan karena ada kekurangan mata uang pecahan di Sumatera Timur. Satu dolar terdiri atas 100 kupang atau 1000 duit dan semuanya disebutnya duit.

Menurut Broesrma yang dikutip Bremen (1997, 117) dikatakan bahwa:

> *"Pernah terjadi untuk mencegah ledakan ketidaksabaran seorang majikan menggunting kaleng biskuit menjadi keeping-keping bulat pipih, menuliskan angka-angka di atasnya, dan membayarkannya kepada pekerjanya. Ia mengatakan, para kuli bisa menukarkan keping tersebut di Malaka. Kulikuli pun menyeberang ke Malaka, tetapi beberapa hari kemudian datang kembali dengan kecewa. Tetapi muslihat majikan sudah berhasil, yakni mendapatkan dolar dan mata uang logam yang diperlukannya."*

Pada dasarnya, uang kebon yang hanya dapat dibelanjakan di toko-toko perkebunan yang para penjualnya tak lain adalah orang-orang dari tuan kebun itu sendiri, merupakan sebuah rantai kolonialisme dalam bentuk yang lain. Praktik kolonialisme tersebut sebenarnya memaksa para pekerja untuk terbelit hutang yang lebih banyak pada toko-toko perkebunan dan hutang tersebut yang nantinya akan membuat para

pekerja menjadi semakin terikat oleh sistem perkebunan itu sendiri. Ketika terjadi protes sosial berkaitan dengan ketidakadilan perlakuan tuan kebun terhadap parapekerja, hutang tersebutlah nantinya yang akan menyelamatkan para tuan kebun tersebut sebagai sebuah alibi.

Dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Georg Lucaks dengan konsep komodifikasi dan reifikasi, membuat manusia menjadi seperti benda sungguh terjadi dalam sistem perkebunan. Walaupun para pekerja tersebut merasa kecewa denga berbagai perlakuan tuantuan kebun, tetapi pada kenyataannya, mereka tetap kembali lagi ke perkebunan tersebut, walaupun terdapat kesempatan untuk melarikan diri ketika menukarkan uang-uang kaleng tersebut ke Malaka. Dalam konteks ini para pekerja dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan produksi, selain modal tentunya, yang berusaha untuk dipertahankan oleh para tuan kebun melalui praktik-praktik kolonialisme. Mereka berusaha untuk menggantungkan kehidupan dan kebebasan para pekerja pada sistem perkebunan.

Antonio Gramsci menyoroti persoalan baru yang tidak terpikirkan oleh pendukung pemikiran Marxisme sebelumnya. Dalam buku pentingnya, Prisson Notebook, Gramsci mematahkan tesis utama Marxisme bahwa dominasi kekuasaan tidak selamanya berakar pada kepentingan ekonomis belaka, melainkan juga karena akar-akar kebudayaan dan politis.

Dalam sistem kekuasaan yang fatisis, suatu rezim akan memakai dua jalan penguasaan. Pertama, penguasaan kesadaran melalui jalan pemaksaan dankekerasan, dan yang kedua, adalah penguasaan lewat jalan hegemoni, yaitu kepatuhan dan kesadaran para elemen masyarakat. Menurutnya rezim fasis menyebarkan kekuasaan pengaruh yang hegemonik ini karena didukung oleh organisasi-organisasi infrastruktur terkait (Saptawasana 2005, 30).

Dalam sistem produksi standar, uang merupakan suatu bentuk pengganti pekerjaan. Dalam konteks perkebunan, seperti juga yang diharapkan para pekerja pada umumnya, dengan bekerja maka mereka akan mendapatkan upah sebagai pengganti pekerjaan yang mereka lakukan. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah ketidaksadaran pada kaum pekerja, yang sengaja ditanamkan oleh kaum kapitalis.

Dalam bekerja mereka tetap mendapatkan upah berupa uang, tetapi dalam bentuk yang lain. Secara umum mereka tetap mendapatkan upah yang mereka harapkan, walaupun sebenarnya upah tersebut malah mengikat mereka semakin kuat ke dalam sistem kapitalisme perkebunan itu sendiri. Dalam masyarakat kapitalis, secara kasar terdapat dua kelas manusia: mereka yang memiliki sarana-sarana produksi dan mereka yang tidak. Pemilik sarana produksi disebut Marx sebagai kapitalis, tidak bekerja untuk orang lain melainkan bekerja untuk dirinya sendiri dan mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah. Mereka yang bekerja untuk kau kapitalis adalah kaum proletariat, karena yang mereka miliki adalah kapasitas untuk bekerja (Kebung, 2008: 135-136). Menurut Marx, kapitalisme adalah suatu model produksi yang menurut kodratnya menghasilkan orang-orang yang teralienasi, yaitu orang-orang yang terpisah dari kemanusiaan mereka, manusia yang tidak bisa bertindak sebagai manusia.

Selain itu, teori Gramsci tentang hegemoni juga terjadi di sini. Di dalam sistem perkebunan, setidaknya terdapat dua cara penguasaan. Pertama melalui jalan kekerasan dan pemaksaan, yang tercermin dengan perlakuan para tuan kebun terhadap para pekerja perkebunan, dan yang kedua melalui hegemoni. Hegemoni dijalankan oleh para tuan kebun untuk memengaruhi selain para pekerjanya sendiri, juga pemerintah Hindia Belanda, penguasa-penguasa lokal untuk menyewakan tanah-tanah mereka dalam jangka panjang.

Uang kebon, sejatinya merupakan sebuah simbol dari keberadaan praktik kolonialisme pada sistem produksi di perkebunan Deli. Uang kebon tidak lain menjadi sebuah sarana pengikat untuk mempertahankan *status quo* relasi antara sistem produksi perkebunan dan para pekerjanya. Sementara itu makna uang kebon bersifat mengikat, karena berlaku hanya pada perkebunan tertentu saja. Pada sisi yang lain, uang merupakan simbol dari relasi produksi antara pekerja dan majikan. Dengan kata lain hal ini menjadi sebuah kesadaran bagi kaum pekerja bahwa mereka mendapatkan upah, tetapi di luar jangkauan mereka, mereka tidak sadar bahwa uang tersebut ternyata mengikat mereka lebih kuat ke dalam sistem kolonialisme yang sengaja dibangun oleh para kapitalis.

Daftar Pustaka

Amin, Z. I. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Terbuka.

Andrew Heywood. (1999). Political Theory: An Introduction, Second Edition. New York: Palgrave.

Arbi, Sanit. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan.

Badrun Ubedilah. (2016). Sistem Politik Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Bandoro, B. (1994). Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. JAKARTA.

Darini, Ririn. (2016). Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu-Budha.Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Daliman.A, (2012). Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Djiwandono, J Soedjati dan T.A Legowo. (1996). Revitalisasi Sistem Politik Indonesia. Jakarta: CSIS.

Gadjahnata dan Edi Swasono. (1986). Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Sumatera Selatan. Jakarta: UI – Press.

Ghalia Indonesia. (1986). Ketetapan-ketetapan MPR, 1983-1988, 1978-1983. Jakarta.

Hadi, Abdul, dkk. (2011). Indonesia dalam arus sejarah: Kedatangan dan Peradaban Islam jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Hasyimy, A. (1993). Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Aceh: Kumpulan Prasaran pada Seminar.

Hasyimy, A. (1990). Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, cet.1, Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Junaid, Hamzah. (2013). Kajian Kritis Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal. Makassar: UIN Alauddin.

Karim, Suryadi. (2010). Inovasi Nilai dan Fungsi Komunikasi Partai Politik bagi Penguatan Civic Literacy. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

M. Fa' al, Fahsin,)2008), Sejarah Kekuasaan Islam, Jakarta Barat: CV, Artha Rivera.

Maful, Arsyad. (2010). Partai politik masa orde baru dan orde lama. Makassar. Universitas Negeri Makassar.

Mc Vey, Ruth. (2010). Kemuculan Komunisme di Indonesia. Depok: Komunitas Bambu.

Murodi. (1994). Sejarah Kebudayaan Islam, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Muryanto, Amin. (2015). Demokrasi Adalah Pilihan Masyatakat Modern. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Rahman Zainudin. (1992). Kekuasaan dan Negara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Riyantini, Festi. (2014). Islamisasi Di Kesultanan Barus Pada Tahun 1292 M. Jember: Universitas Negeri Jember.

Thoha, Miftah. (2005). Birokrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsudin, Mayjen Purn. (2005). Mengapa G 30 S/PKI Gagal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rahayu, Minto. (2007). Pendidikan Kewarnegaraan Menghadapi Jati Diri Bangsa. Jakarta: Grasindo.

Said, Mohammad. (1961). Aceh Sepanjang Abad, Medan: Penerbit Pengarang Sendiri.

Sheehan, Michael. (1996). The Balance of Power: History & Theory. London: Routledge.

Slamet, Sujud P.J., dkk. (2014). Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa Dari Sejarah Lokal Malang Mulai Zaman Prasejarah Sampai Masa Hindu-Budha Abad XI. Malang: Universitas Negeri Malang.

Soemardjan Selo. (1999). Kisah Perjuangan Reformasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suminto, Aqid. (1986). Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Suwardono. (2019). Sejarah Indonesia Masa Hindu Buddha. Yogyakarta: Ombak.

Syafiie, Inu Kencana. (2008). Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama Badrun.

Thoha, Miftah. (2005). Birokrasi dan Politik di Indoneisa. Jakarta: Rajawali Pers.

Trijayanti Nadia. (2019). Sejarah Masyarakat Indonesia Pada Masa Praaksara dan Masa Aksara. Bekasi: Akademia Ubedilah. 2016. Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif. Jakarta: Bumi Aksara.

Wiradyana Ketut. (2018). Arkeologi Pengetahuan Pengetahuan Arkeologi. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia.

Situs Internet

Doni Setyawan. (2016). Pemilu Pada Orde Baru di https://www.donisetyawan.com.

Lili, Romli. (2017). Satelit di https://scholar.google.co.id/

Tata, Chacha. (2018). Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli dan Secara Umum. Di https://www.silintong.com.

Muryanto Amin. (2015). Demokrasi Adalah Pilihan Masyarakat Modern, https://www.usu.ac.id/id/arsip-berita/99-accordion-3/476-muryanto-amin-demokrasi-adalah-pilihan-masyarakat-modern.html

Tano Batak. (2007). Reflexi Peringatan 100 Tahun Gugurnya Raja Sisingamangaraja Xll, https://tanobatak.wordpress.com/2007/08/07/reflexi-peringatan-100-tahun-gugurnya-raja-sisingamangaraja-xll/

Boris Veldhuijzen van Zanten. (2011). The difference between a leader and a primus inter pares, https://thenextweb.com/entrepreneur/2011/09/07/the-difference-between-a-leader-and-a-primus-inter-pares/

Hendri F. Isnaeni. (2019). Dua Sudut Pandang Komunisme. https://historia.id/politik/articles/dua-sudut-pandang-komunisme-DE0V6

Fathimah Fildzah Izzati. (2014). Orde Baru dan Kebencian terhadap Komunisme yang Tak Kunjung Usai. https://indoprogress.com/2014/08/orde-baru-dan-kebencian-terhadap-komunisme-yang-tak-kunjung-usai/

Boy Anugerah. (2016). Nasionalisme Indonesia, Dulu dan Kini. https://mediaindonesia.com/read/detail/52521-nasionalisme-indonesia-dulu-dan-kini

Guru PPKn. (2018). 7 Ciri-Ciri Nasionalisme Dalam Suatu Bangsa. https://guruppkn.com/7-ciri-ciri-nasionalisme-dalam-suatu-bangsa

Sejarah
POLITIK dan KEKUASAAN

Kekuasaan dan Politik adalah sesuatu yang ada dan di dalam kehidupan setiap organisasi tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu.

Politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita sering mendengar kata politik dan kekuasaan, kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain.

Buku ini membahas:
1. Politik dan Kekuasaan
2. Struktur Kekuasaan dan Lahirnya Kekuasaan
3. Politik Dan Kekuasaan Indonesia Masa Kuno: Dari Pra-Sejarah Sampai Hindu-Budha
4. Islam, Nasionalisme, Dan Komunisme Dalam Pusaran Kekuasaan
5. Kekuasaan Kapital Tingkat Lokal (Sumatera Timur)

KITA MENULIS
YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-91758-0-1
9 786239 175801